



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018



LPMP SUMATERA BARAT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN SUMATERA BARAT
2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat dan izin-Nya Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat telah dapat melaksanakan program dan kegiatan sampai pada akhir tahun 2018 dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan dan hasil dari kegiatan tersebut dirangkum dalam suatu Laporan Kinerja LPMP Sumatera Barat Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya yang ada serta dana yang tersedia dalam DIPA LPMP Sumatera Barat Tahun 2018 No: 023.03.2.419525/2018 tanggal 7 Desember 2017.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja LPMP Sumatera Barat tahun 2018. Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sekaligus. **Pertama**, laporan kinerja merupakan media bagi LPMP untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* yang berkepentingan. **Kedua**, laporan kinerja merupakan sumber informasi bagi LPMP sendiri, sebagai bahan dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Kedua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja tahun 2018 dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna mengenai *rencana kinerja* dan *capaian kinerja* pada tahun 2018.

LPMP Sumatera Barat pada tahun 2018 menetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tertuang didalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2018. Secara umum LPMP Sumatera Barat telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tersebut.

Meskipun telah ada capaian keberhasilan, namun masih ada pula permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya, masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar nasional pendidikan, walaupun adanya peningkatan setiap tahun dan upaya tersebut masih terus dilakukan. Kemudian belum semua guru mendapat

pembekalan kurikulum 2013 serta masih kurang maksimalnya keterlibatan *stakeholder* didalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat diselesaikan di tahun berikutnya.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LPMP Sumatera Barat pada tahun 2018. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan hingga pada akhir tahun 2018 dan pihak-pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja LPMP Sumatera Barat tahun 2018 ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, terutama untuk peningkatan mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Padang, 31 Desember 2018
Kepala ,

Drs. Rasoki Lubis, M.Pd
NIP. 196604101991031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL.....	viii
IKHTISAR EKSEKUTIF	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	 1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Dasar Hukum.....	5
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	6
D. Koordinasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan.....	21
E. Isu-Isu Strategis/Permasalahan.....	22
 BAB II RENCANA KERJA LPMP SUMATERA BARAT.....	 24
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	 31
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	31
B. Realisasi Anggaran.....	99
 BAB IV PENUTUP	 106

LAMPIRAN

1. Dokumen Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Daya Serap Format B.19 Kegiatan LPMP Sumatera Barat Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMP Sumatera Barat Permendikbud No. 15 Tahun 2015.....	8
Gambar 1.2 Koordinasi Kelembagaan Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan.....	21
Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pemetaan Mutu Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	40
Gambar 3.2 Kenaikan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan di Sekolah Provinsi Sumatera Barat.....	40
Gambar 3.3 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD Provinsi Sumatera Barat.....	41
Gambar 3.4 Kenaikan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD Provinsi Sumatera Barat.....	42
Gambar 3.5 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat.....	43
Gambar 3.6 Kenaikan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat.....	43
Gambar 3.7 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat.....	45
Gambar 3.8 Kenaikan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat.....	45
Gambar 3.9 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK Provinsi Sumatera Barat.....	46
Gambar 3.10 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK Provinsi Sumatera Barat.....	47
Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Peningkatan Indek Efektifitas Jenjang SD.....	48
Gambar 3.12 Persentase Peningkatan Indek Efektifitas Jenjang SD Tahun 2018 dibanding Tahun 2017.....	49
Gambar 3.13 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Peningkatan Indek Efektifitas Jenjang SMP.....	50
Gambar 3.14 Persentase Peningkatan Indek Efektifitas Jenjang SMP Tahun 2018 dibanding Tahun 2017.....	50
Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Peningkatan Indek Efektifitas Jenjang SMA.....	52
Gambar 3.16 Persentase Peningkatan Indek Efektifitas Jenjang SMA Tahun 2018 dibanding Tahun 2017.....	52
Gambar 3.17 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Peningkatan Indek Efektifitas Jenjang SMK.....	53
Gambar 3.18 Persentase Peningkatan Indek Efektifitas Jenjang SMK Tahun 2018 dibanding Tahun 2017.....	54
Gambar 3.19 Target dan Realisasi Pelaksanaan Sekolah Model Tahun 2018.....	55
Gambar 3.20 Target dan Realisasi Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dari Tahun 2016 s.d 2018.....	56
Gambar 3.21 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SD Tahun 2016 s.d 2018.....	57

Gambar 3.22 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMP dari Tahun 2016 s.d 2018.....	58
Gambar 3.23 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMA dari Tahun 2016 s.d 2018.....	59
Gambar 3.24 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMA dari Tahun 2016 s.d 2018.....	60
Gambar 3.25 Nilai Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	66
Gambar 3.26 Nilai Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	67
Gambar 3.27 Nilai Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	68
Gambar 3.28 Nilai Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	68
Gambar 3.29 Alur Pemetaan Mutu Pendidikan.....	70
Gambar 3.30 Pembentukan TPMPS Jenjang SD.....	77
Gambar 3.31 Pembentukan TPMPS Jenjang SMP.....	77
Gambar 3.32 Pembentukan TPMPS Jenjang SMA.....	78
Gambar 3.33 Pembentukan TPMPS Jenjang SMK.....	78
Gambar 3.34 Pemetaan Hasil Pelaksanaan Siklus SPMI Jenjang SD.....	79
Gambar 3.35 Pemetaan Hasil Pelaksanaan Siklus SPMI Jenjang SMP.....	79
Gambar 3.36 Pemetaan Hasil Pelaksanaan Siklus SPMI Jenjang SMA.....	80
Gambar 3.37 Pemetaan Hasil Pelaksanaan Siklus SPMI Jenjang SMK.....	80
Gambar 3.38 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Jenjang SD.....	81
Gambar 3.39 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Jenjang SMP.....	81
Gambar 3.40 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Jenjang SMA.....	82
Gambar 3.41 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Jenjang SMK.....	82
Gambar 3.42 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Jenjang SD.....	83
Gambar 3.43 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Jenjang SMP.....	83
Gambar 3.44 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Jenjang SMA.....	84
Gambar 3.45 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Jenjang SMK.....	84
Gambar 3.46 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Jenjang SD.....	85
Gambar 3.47 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Jenjang SMP.....	85
Gambar 3.48 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Jenjang SMA.....	86
Gambar 3.49 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Jenjang SMK.....	86
Gambar 3.50 Penetapan Mutu Baru Jenjang SD.....	87
Gambar 3.51 Penetapan Mutu Baru Jenjang SMP.....	87
Gambar 3.52 Penetapan Mutu Baru Jenjang SMA.....	88
Gambar 3.53 Penetapan Mutu Baru Jenjang SMK.....	88
Gambar 3.54 Manajemen Pembelajaran Jenjang SD.....	89
Gambar 3.55 Manajemen Pembelajaran Jenjang SMP.....	89
Gambar 3.56 Manajemen Pembelajaran Jenjang SMA.....	90
Gambar 3.57 Manajemen Pembelajaran Jenjang SMK.....	90
Gambar 3.58 Manajemen Sekolah Jenjang SD.....	91
Gambar 3.59 Manajemen Sekolah Jenjang SMP.....	91
Gambar 3.60 Manajemen Sekolah Jenjang SMA.....	92
Gambar 3.61 Manajemen Sekolah Jenjang SMK.....	92
Gambar 3.62 Budaya Mutu Jenjang SD.....	93

Gambar 3.63 Budaya Mutu Jenjang SMP.....	93
Gambar 3.64 Budaya Mutu Jenjang SMA.....	94
Gambar 3.65 Budaya Mutu Jenjang SMK.....	94
Gambar 3.66 Rekap Daya Serap Anggaran Per Jenis belanja.....	101
Gambar 3.67 Persentase Realiasi Daya Serap Anggaran Per Jenis belanja.....	101
Gambar 4.1 Indikator Kinerja LPMP Sumatera Barat.....	107
Gambar 4.2 Realisasi Indikator Kinerja LPMP Sumatera Barat.....	107
Gambar 4.3 Ringkasan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2018 Dalam Bentuk Grafik.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Jabatan Tahun 2018.....	2
Tabel 1.2 Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Golongan.....	3
Tabel 1.3 Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Pendidikan.....	3
Tabel 1.4 Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Pendidikan.....	3
Tabel 2.1 Target sekolah yang dipetakan mutu pendidikan Tahun 2015-2019.....	24
Tabel 2.2 Target peningkatan indeks efektifitas berdasarkan 8 SNP Tahun 2015-2019.....	24
Tabel 2.3 Target sekolah yang di supervisi mutu pendidikan Tahun 2015-2019....	25
Tabel 2.4 Persentase sekolah pelaksana kurikulum nasional Tahun 2015-2019.....	25
Tabel 2.5 Target kegiatan pendukung sasaran kurikulum nasional Tahun 2015-2019.....	26
Tabel 2.6 Target pengembangan model penjaminan mutu pendidikan Tahun 2015-2019.....	26
Tabel 2.7 Target kemitraan LPMP Sumatera Barat tahun 2015-2019.....	27
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja LPMP Sumatera Barat Tahun 2018.....	28
Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pencapaian sasaran LPMP Sumatera Barat Tahun 2018 Dibandingkan dengan DIPA awal tahun 2018.....	31
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Pencapaian sasaran LPMP Sumatera Barat Tahun 2018 DIPA akhir dibandingkan dengan realisasi.....	36
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pemetaan Mutu Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	39
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD Tahun 2016 s.d 2018.....	41
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP Tahun 2016 s.d 2018.....	42
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA Tahun 2016 s.d 2018.....	44
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK Tahun 2016 s.d Tahun 2018.....	46

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pelaksanaan Sekolah Model Tahun 2018.....	55
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dari Tahun 2016 s.d 2018.....	56
Tabel 3.10 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SD Tahun 2016 s.d 2018.....	57
Tabel 3.11 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMP dari Tahun 2016 s.d 2018.....	58
Tabel 3.12 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMA Hingga Tahun 2018.....	59
Tabel 3.13 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMK Hingga Tahun 2018.....	60
Tabel 3.14 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Per Jenjang Tahun 2016 s.d Tahun 2018.....	61
Tabel 3.15 Nilai Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	66
Tabel 3.16 Nilai Capaian SNP Jenjang SMP Tahun 2016 s.d Tahun 2018.....	66
Tabel 3.17 Nilai Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	67
Tabel 3.18 Nilai Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018.....	68
Tabel 3.19 Jumlah Sekolah dan Pengiriman Data Mutu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.....	69
Tabel 3.20 Hasil Analisis Rapor Mutu Tahun 2018.....	71
Tabel 3.21 Hasil Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan.....	72
Tabel 3.22 Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah kepada Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2018.....	97
Tabel 3.23 Perbandingan Anggaran LPMP Sumatera Barat Menurut Jenis belanja T.A. 2016 dan 2017.....	99
Tabel 3.24 Persentase Anggaran LPMP Sumatera Barat Menurut Jenis belanja T.A. 2018.....	99
Tabel 3.25 Persentase Daya Serap dari Januari s.d. Desember 2018.....	100
Tabel 3.26 Rekap Daya Serap Anggaran Per Jenis belanja.....	101

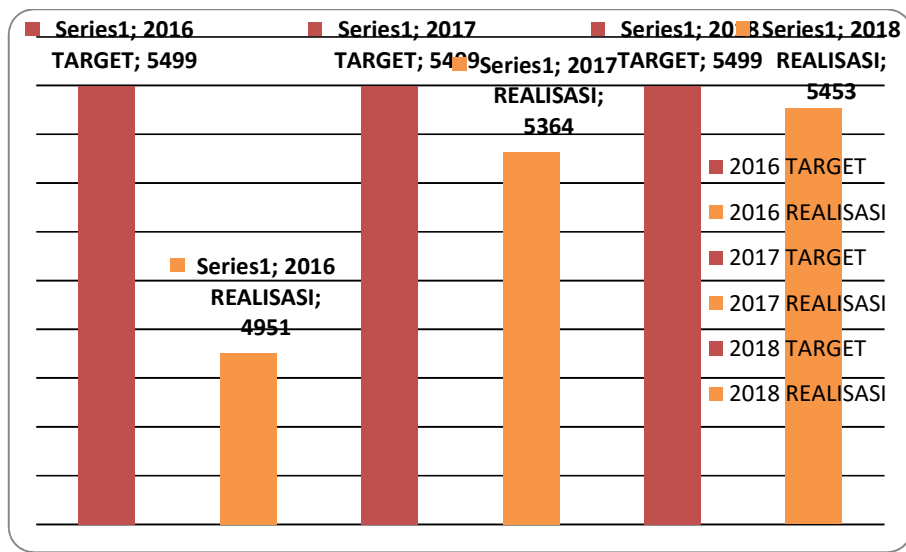
Tabel 3.27 Capaian Daya Serap Secara Garis Besar Tahun 2018.....	103
Tabel 3.28 Riwayat Revisi DIPA LPMP Sumatera Barat Tahun 2018.....	103
Tabel 4.1 Indikator Kinerja LPMP Sumatera Barat Tahun 2018.....	106

IKHTISAR EKSEKUTIF

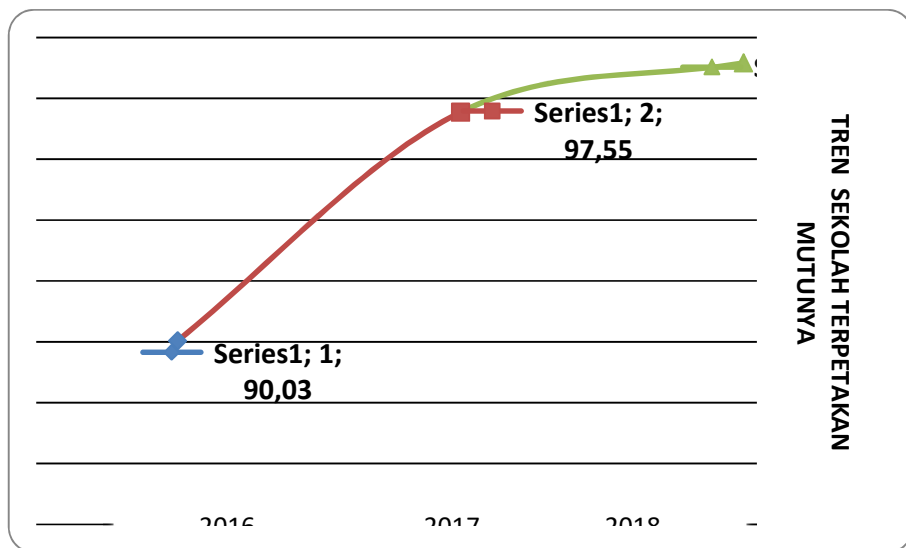
Laporan Kinerja LPMP Sumatera Barat tahun 2018 yang akan dipaparkan merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dipercayakan kepada LPMP Sumatera Barat terhadap publik dan para *stakeholder*. Di dalam Laporan Kinerja ini dipaparkan pernyataan Visi dan Misi, Tujuan Strategis dan Sasaran yang hendak dicapai yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan akuntabilitas kinerja.

Laporan kinerja LPMP Sumatera Barat tahun 2018 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) Sasaran Strategis, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dan 12 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018.

Berdasarkan hasil analisis yang ada dalam format Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) LPMP Sumatera Barat, maka pada tahun 2018 ini realisasi dari pengukuran kinerja kegiatan berdasarkan daya serap anggaran adalah sebesar 89,85%. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik dan non fisik sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi LPMP yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis lima tahunan. Sejalan dengan itu prosentase realisasi fisik mencapai 96,76%. Salah satu capaian tersebut tergambar dari grafik sekolah yang terpetakan mutunya tahun 2016, 2017 dan 2018 serta tren peningkatannya sebagai berikut:

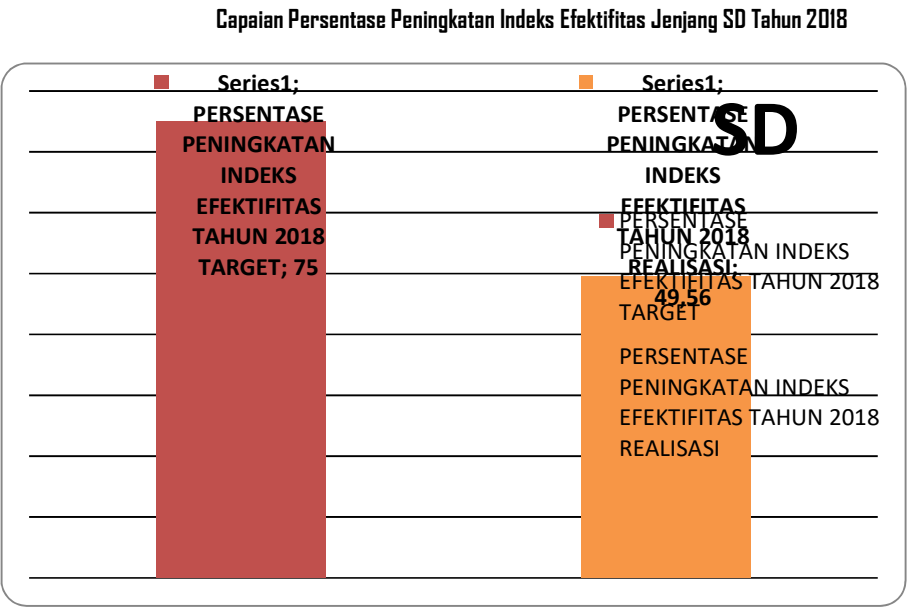


Grafik diatas menunjukkan rekap seluruh sekolah di Sumatera Barat yang terpetakan mutunya dari tahun 2016 hingga 2018.

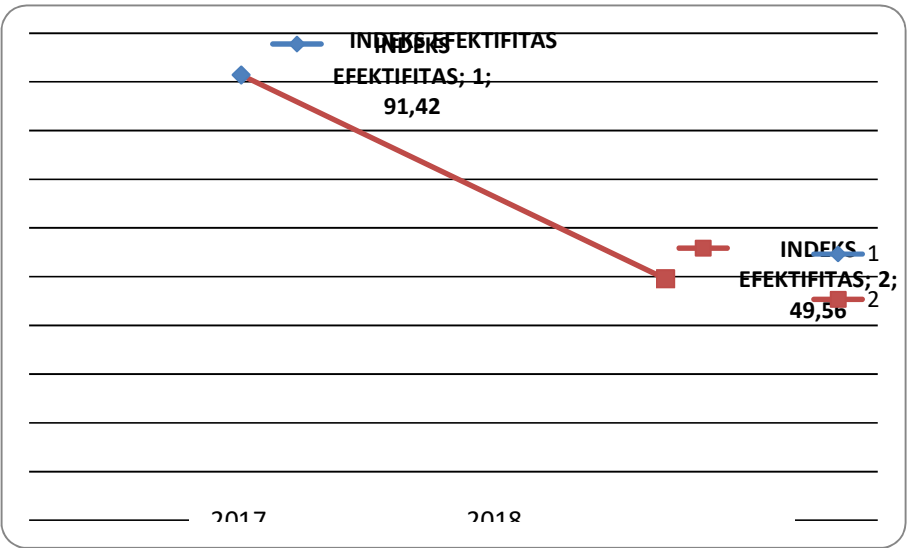


Grafik diatas menunjukkan tren kenaikan seluruh sekolah di Sumatera Barat yang terpetakan mutunya dari tahun 2016 hingga 2018. Sedangkan rincian perjenjang dapat dilihat pada pembahasan di BAB III.

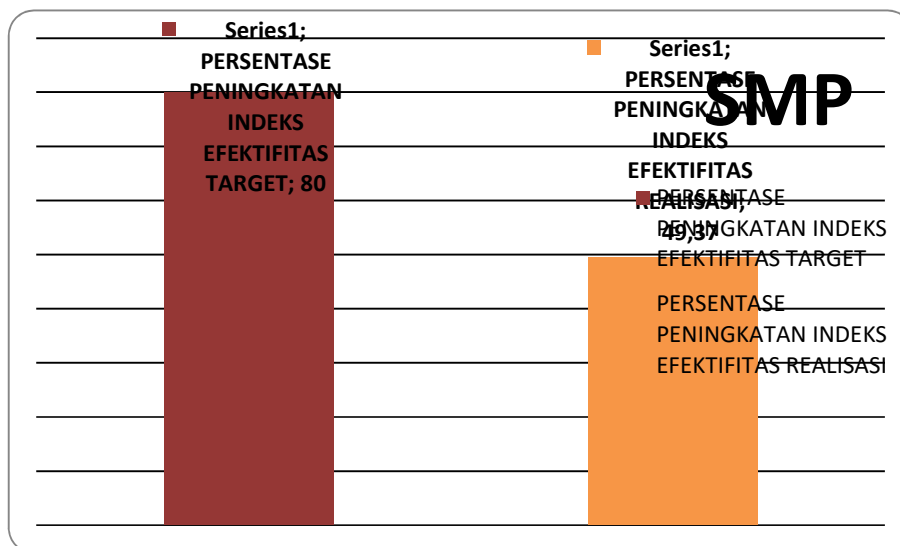
Sedangkan untuk persentase peningkatan indeks efektifitas dapat disajikan sebagai berikut:



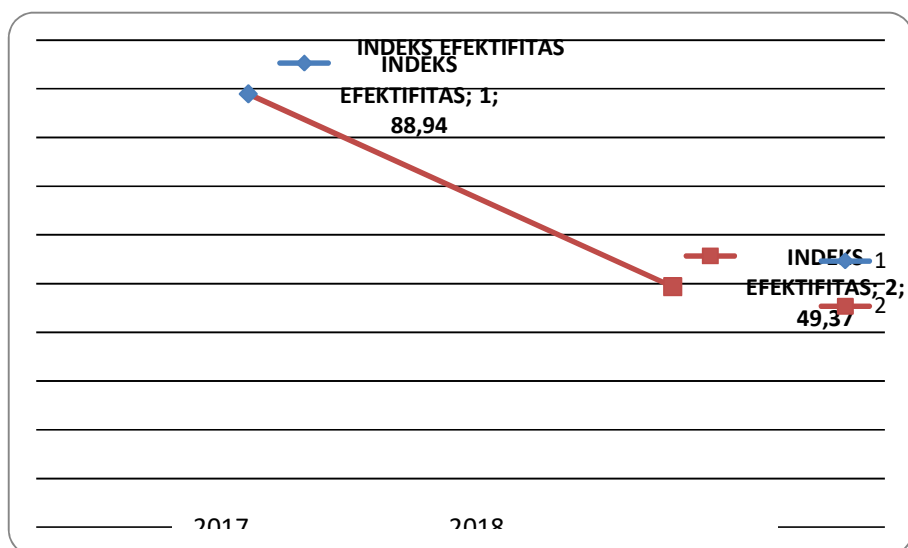
Sedangkan trennya dibandingkan dengan tahun 2017 adalah:



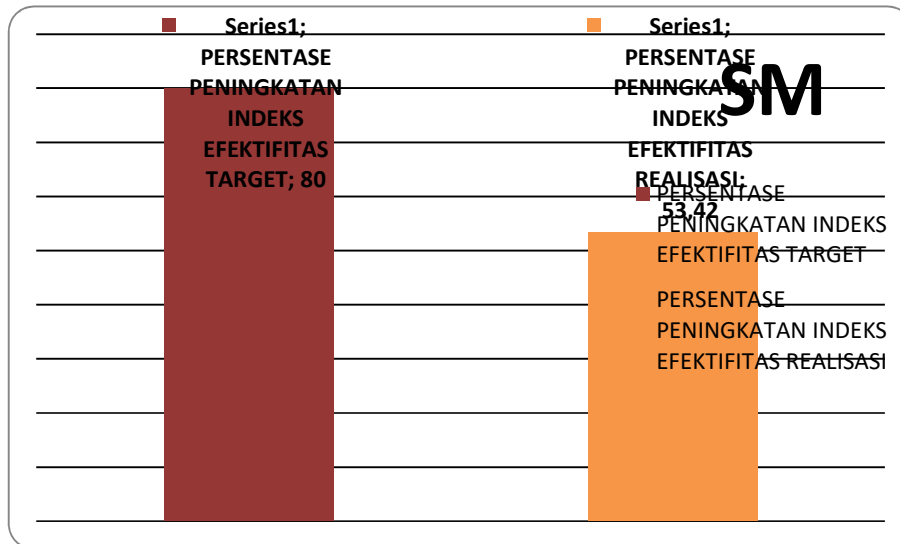
Capaian Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SMP Tahun 2018



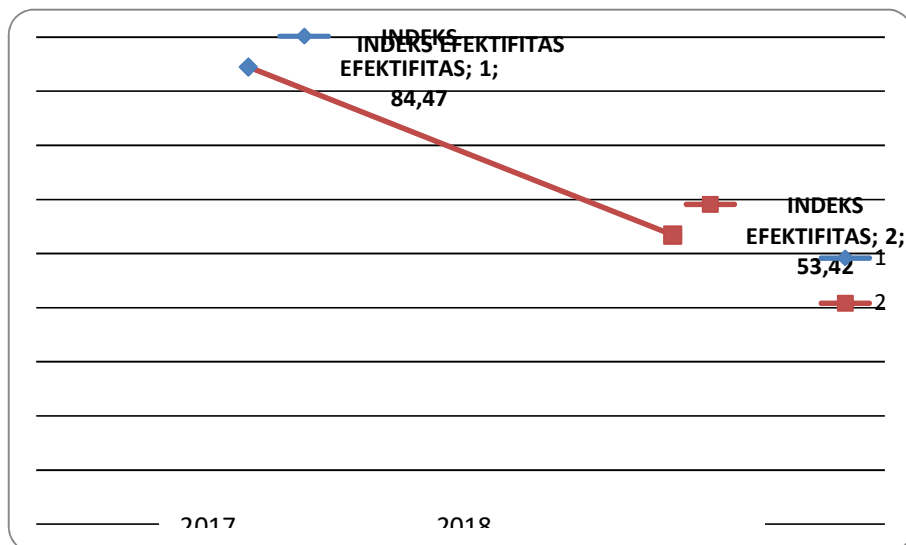
Sedangkan trennya dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:



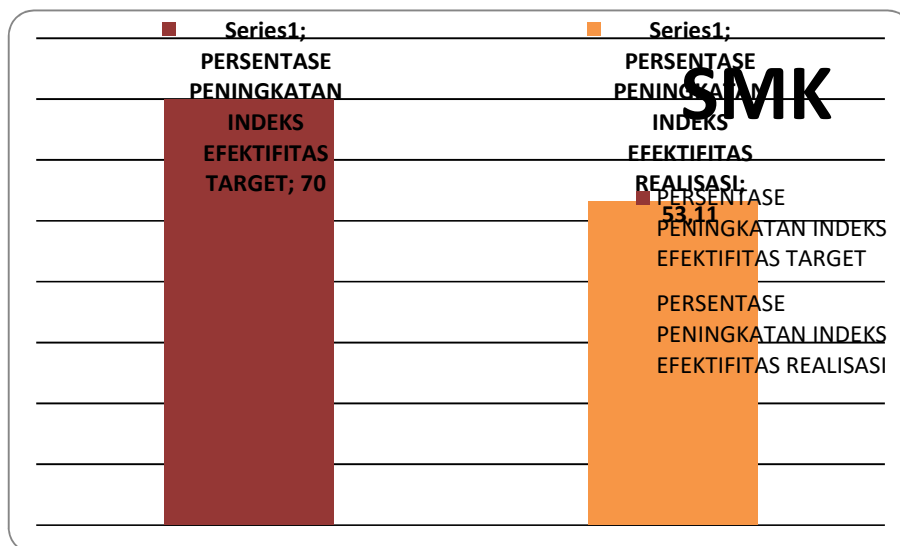
Capaian Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SMA Tahun 2018



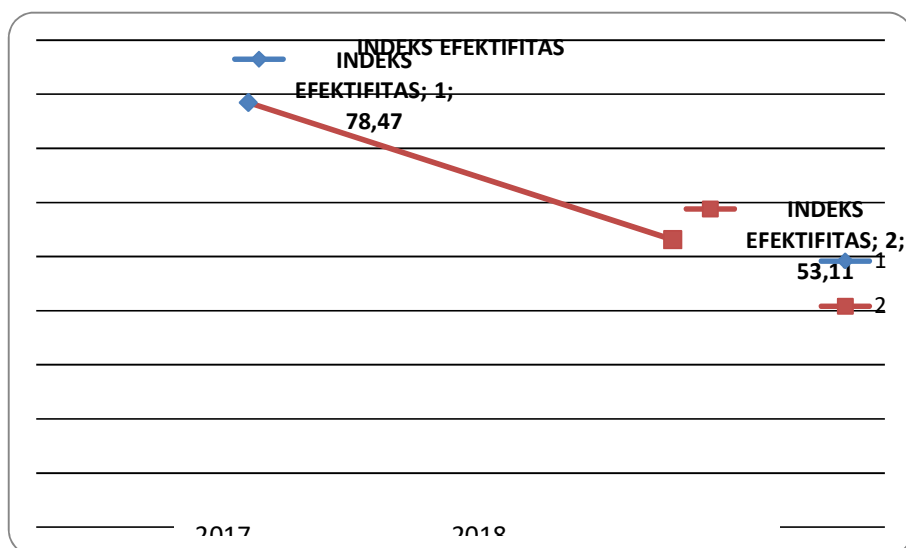
Sedangkan trennya dibandingkan dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut:



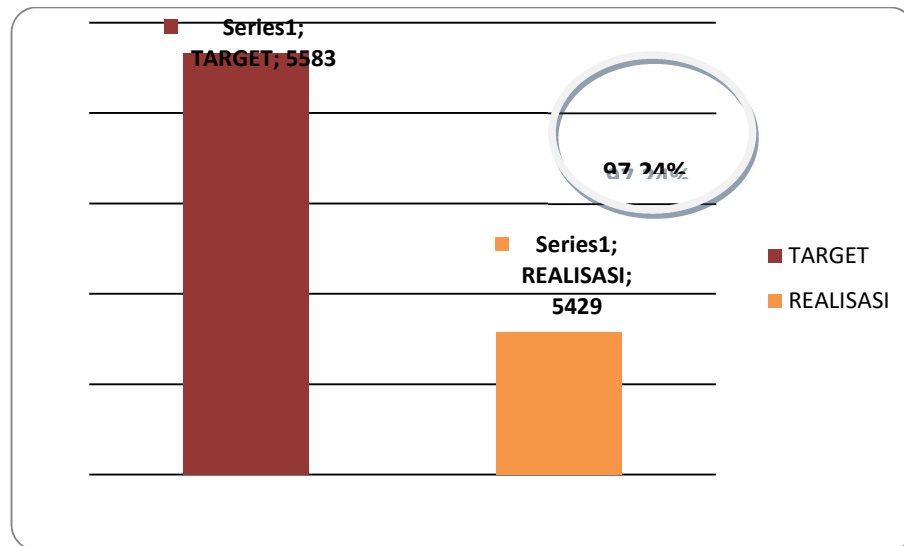
Capaian Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SMK Tahun 2018



Sedangkan trennya dibandingkan dengan tahun 2017 adalah:

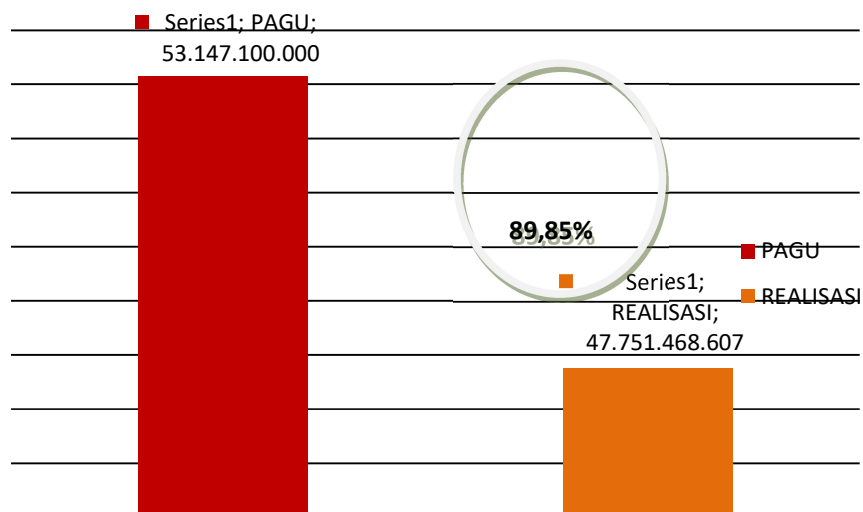


Untuk indikator pelaksanaan kurikulum 2013 hingga tahun 2018, maka dapat disajikan dalam grafik berikut ini:



Grafik tersebut adalah jumlah seluruh sekolah jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dibandingkan dengan realisasi yang telah dilaksanakan hingga tahun 2018. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada BAB III.

Untuk pencapaian kinerja anggaran dapat dilihat pada grafik berikut:



Selanjutnya, selama kurun tahun 2018, pelaksanaan program dan kegiatan LPMP Sumatera Barat menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Masih ada sekolah-sekolah yang tidak terkirim peta mutunya. Hal ini dikarenakan letak geografis sekolah tersebut yang tidak dijangkau oleh sinyal karena daerah tersebut termasuk daerah terisolir. Untuk itu, peran pengawas hendaknya lebih diperkuat didalam memotivasi sekolah-sekolah yang belum mempunyai peta mutu pendidikan.
2. Adanya sekolah model yang tidak melanjutkan programnya karena sudah menjadi sekolah rujukan.
3. Sekolah-sekolah yang difasilitasi kurikulum 2013 oleh LPMP tergantung pada sekolah yang dilakukan Bimtek Guru Sasaran oleh PPPPTK Matematika Yogyakarta. Oleh karena itu, masih ada sekolah yang belum diberikan Bimtek tersebut, sehingga LPMP juga belum dapat memfasilitasi sekolah-sekolah tersebut dengan memberikan dana bantuan pemerintah dan pendampingan kurikulum 2013.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

LPMP Sumatera Barat merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. LPMP Sumatera Barat pada awalnya bernama BPG (Balai Penataran Guru) Padang. BPG Padang lahir berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0116/0/1977 tanggal 23 April 1977.

Seiring dengan semakin kompleksnya masalah pendidikan dan desakan peningkatan mutu pendidikan yang demikian besar, Menteri Pendidikan Nasional melalui SK nomor 087/0/2003 tanggal 4 Juli 2003 tentang organisasi dan tata kelola LPMP, melakukan restrukturisasi dan refungsionalisasi fungsi dan peran dari Balai Penataran Guru (BPG) menjadi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

LPMP sebagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) Depdiknas pada saat itu berada langsung dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 7 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kelola kerja lembaga penjaminan mutu pendidikan, maka LPMP berubah dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan menjadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

LPMP Sumatera Barat diberi mandat untuk mengawal pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. LPMP Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas membantu Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di

Sumatera Barat dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam bentuk memberikan bantuan, arahan, bimbingan, dan fasilitasi. Kegiatan penjaminan mutu diawali dengan uji kompetensi guru pada beberapa kabupaten/kota, dimana hasilnya dianalisis untuk menentukan kebutuhan diklat peningkatan kompetensi guru.

Pada tahun 2007, LPMP Sumatera Barat beserta 30 provinsi lainnya dinilai kelayakannya untuk peningkatan status dari LPMP Eselon III menjadi Eselon II oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Dari 30 LPMP yang dievaluasi, terpilih 3 LPMP yang ditingkatkan statusnya menjadi LPMP Eselon II, yaitu LPMP Sumatera Barat, LPMP Sulawesi Selatan dan LPMP Jawa Tengah. Hal ini didukung dengan keluarnya Permendikbud No. 15 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja LPMP Eselon II.

Saat ini LPMP Sumatera Barat dipimpin oleh Drs. Rasoki Lubis, M.Pd dengan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 93 orang. Berikut gambaran peta formasi yang ada di LPMP Sumatera Barat tahun 2018:

a. Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Jabatan:

Tabel 1. 1 Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II/b	1 Orang
2	Pejabat Eselon III/b	3 Orang
3	Pejabat Eselon IV/b	7 Orang
4	Fungsional Tertentu	15 Orang
5	Fungsional Arsiparis	1 Orang
6	PTP	4 Orang
7	Staf	62 Orang
Jumlah		93 Orang

b. Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Golongan:

Tabel 1.2 Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/b	8 Orang

2	Golongan IV/a	6 Orang
3	Golongan III/d	30 Orang
4	Golongan III/c	11 Orang
5	Golongan III/b	19 Orang
6	Golongan III/a	10 Orang
7	Golongan II/d	2 Orang
8	Golongan II/c	4 Orang
9	Golongan II/b	1 Orang
10	Golongan II/a	2 Orang
Jumlah		93 Orang

c. Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Pendidikan:

Tabel 1.3 Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SMP	2 Orang
2.	SLTA	20 Orang
3.	S.1	44 Orang
4.	S.2	23 Orang
5.	S.3	4 Orang
Jumlah		93 Orang

d. Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Gender

Tabel 1.4 Peta ASN LPMP Sumatera Barat berdasarkan Pendidikan

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Perempuan	31 Orang
2	Laki-laki	62 Orang
Jumlah		93 Orang

Sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam penjaminan mutu pendidikan, LPMP Sumatera Barat harus melaporkan seluruh aktivitasnya agar terjadi transparansi dalam penggunaan anggaran. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 18 ayat 1, maka LPMP Sumatera Barat sebagai lembaga pemerintah di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan wajib menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan

kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam bentuk Laporan Kinerja. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis sebagai mekanisme untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Instruksi Presiden ini diterbitkan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan target pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya pembangunan berbasis kinerja, maka penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu instrumen teknis yang menjadi alat ukur keberhasilan pembangunan yang dijalankan oleh setiap unit instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Selanjutnya, untuk memperkuat pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu laporan kinerja. Peraturan Menteri ini memberikan landasan operasional dalam menyusun dan menetapkan serta mengevaluasi keberhasilan penyelenggaraan pembangunan. Laporan Kinerja ini disusun bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang :

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Sumatera Barat tahun 2018;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat sebagai Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

4. Menjadi sumber informasi bagi *stakeholder* atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam peningkatan mutu pendidikan secara Nasional, khususnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Permendikbud Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPMP Eselon II;
4. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud;
6. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah dan LPMP Sulawesi Selatan;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 023-14.2.419525/2018 tanggal 7 Desember 2017.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

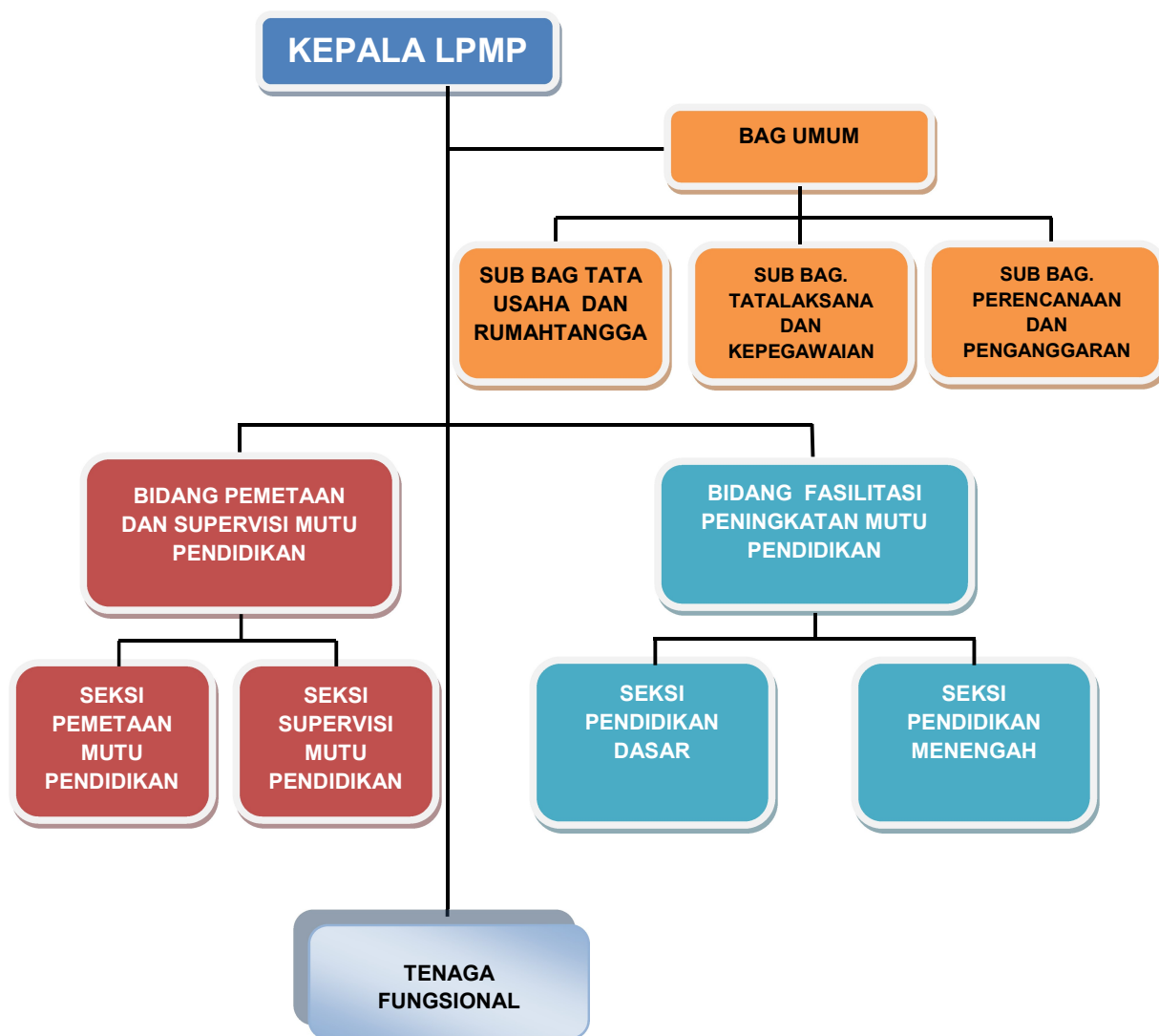
Tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Permendikbud No. 15 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja LPMP Sumatera Barat, LPMP Jawa Tengah, LPMP Sulawesi Selatan, dinyatakan: memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu, pengembangan model dan kemitraan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah;
2. supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
3. fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional;
4. pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara nasional;
5. pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional;
6. pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; dan
7. pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Penjaminan Mutu Pendidikan Sumatera Barat, Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan,
maka Organisasi LPMP Sumatera Barat terdiri dari:

1. Kepala
2. Kepala Bagian Umum
3. Kepala Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan
4. Kepala Bidang Fasilitas Peningkatan Mutu Pendidikan
5. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah tangga
6. Kepala Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian
7. Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
8. Kepala Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan
9. Kepala Seksi Supervisi Mutu Pendidikan
10. Kepala Seksi Pendidikan Dasar
11. Kepala Seksi Pendidikan Menengah
12. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPMP Sumatera Barat Permendikbud No. 15 Tahun 2015

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala LPMP dibantu oleh Bagian Umum, Bidang PSMP dan Bidang FPMP serta Tenaga Fungsional yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tertuang didalam Permendikbud Nomor 26 Tahun 2018, sebagai berikut:

- a) Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.

Sedangkan fungsi dari Bagian Umum tersebut terdiri dari:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Bagian dan konsep program kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
2. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan LPMP;
3. Melaksanakan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LPMP;
4. Melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan;
5. Melaksanakan urusan pengelolaan perpustakaan dan poliklinik; Penyusunan laporan LPMP;
6. Melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat serta dokumentasi kegiatan LPMP;
7. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan barang milik negara;
8. Melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
9. Melaksanakan urusan kepegawaian;
10. Melaksanakan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan IV/e di daerah provinsi wilayah kerjanya;
11. Melaksanakan urusan keuangan;
12. Melaksanakan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LPMP;

13. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LPMP;
14. Melaksanakan penyusunan laporan barang milik Negara di lingkungan LPMP;
15. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bagian; dan
16. Melaksanakan penyusunan laporan Bagian dan konsep laporan LPMP.

Bagian Umum terdiri atas :

a.1). Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
2. Melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar;
3. Melakukan urusan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip;
4. Melakukan pengelolaan perpustakaan, bengkel, poliklinik, dan sarana prasarana lainnya;
5. Melakukan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat serta dokumentasi kegiatan LPMP;
6. Melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas pimpinan;
7. Melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan LPMP;

8. Melakukan urusan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, dan gedung kantor serta sarana dan prasarana lainnya di lingkungan LPMP;
9. Melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pendayagunaan, pemeliharaan, perawatan, pendistribusian, inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan LPMP;
10. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
11. Melakukan penyusunan laporan Subbagian.

a.2). Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian.

Subbagian Tatalaksana dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian;
2. Melakukan penyusunan bahan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja LPMP;
3. Melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan di lingkungan LPMP;
4. Melakukan penyusunan bahan usul formasi dan rencana pengembangan pegawai LPMP;
5. Melakukan penyusunan bahan usul penerimaan, pengangkatan, penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan urusan mutasi lainnya;
6. Melakukan pengadministrasian penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan LPMP;

7. Melakukan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional Guru Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan IV/b sampai dengan Guru Utama pangkat Pembina Utama golongan IV/e di daerah provinsi wilayah kerjanya;
8. Melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi kepegawaian lainnya di lingkungan LPMP;
9. Melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, izin belajar, dan tugas belajar;
10. Melakukan penyusunan usul pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan dokumen kepegawaian lainnya;
11. Melakukan urusan pengembangan, disiplin, dan usul pemberian penghargaan pegawai;
12. Melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai;
13. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
14. Melakukan penyusunan Laporan Subbagian.

a.3). Subbagian Perencanaan dan Penganggaran

Subbagian Perencanaan dan Penganggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program kerja Subbagian, konsep program kerja Bagian, dan konsep program kerja LPMP;

2. Melakukan penyusunan bahan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LPMP;
 3. Melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran LPMP;
 4. Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
 5. Melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan LPMP;
 6. Melakukan administrasi penerimaan negara bukan pajak di lingkungan LPMP;
 7. Melakukan penyusunan bahan usul penghentian pembayaran gaji pegawai yang pensiun, berhenti, pindah, dan meninggal dunia;
 8. Melakukan penyusunan bahan penyelesaian tuntutan perbendaharaan/ganti rugi di lingkungan LPMP;
 9. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran LPMP;
 10. Melakukan penyusunan laporan keuangan LPMP;
 11. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan
 12. Melakukan penyusunan laporan Subbagian, konsep laporan Bagian, dan konsep laporan LPMP.
- b) Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan, pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan, serta pengelolaan dan

pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berikut rincian tugas Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Bidang;
2. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Melaksanakan supervisi mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Melaksanakan analisis hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
5. Melaksanakan diseminasi hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
6. Melaksanakan penyusunan rekomendasi hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
7. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah;
8. Melaksanakan pengkajian rekomendasi hasil pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
9. Melaksanakan pengembangan model pemetaan dan supervisi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
10. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

11. Melaksanakan publikasi peta mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
12. Melaksanakan kemitraan di bidang pemetaan dan supervisi mutu pendidikan;
13. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
14. Melaksanakan penyiapan dan pemeliharaan system informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
15. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pengembangan model pemetaan mutu dan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
16. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
17. Melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Bidang Pemetaan dan Supervisi Mutu Pendidikan terdiri atas :

b.1). Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan.

Seksi Pemetaan Mutu Pendidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. Melakukan penyusunan bahan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
4. Melakukan validasi data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

5. Melakukan analisis hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
6. Melakukan penyusunan bahan rekomendasi hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
7. Melakukan penyusunan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
8. Melakukan penyiapan perangkat sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
9. Melakukan penyusunan bahan pengembangan model pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
10. Melakukan pemutakhiran data dan informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
11. Melakukan penyusunan bahan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
12. Melakukan pemeliharaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
13. Melakukan penyusunan bahan kemitraan di bidang pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
14. Melakukan publikasi peta mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
15. Melakukan evaluasi pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

16. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
17. Melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Bidang.

b.2). Seksi Supervisi Mutu Pendidikan.

Seksi supervisi mutu pendidikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program kerja Seksi;
2. Melakukan penyusunan bahan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional;
3. Melakukan analisis hasil supervisi mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
4. Melakukan penyusunan bahan rekomendasi hasil supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
5. Melakukan penyusunan bahan diseminasi hasil supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota serta pemangku kepentingan lainnya;
6. Melakukan penyusunan laporan hasil supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
7. Melakukan penyusunan bahan pengembangan model supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
8. Melakukan penyusunan bahan pelaksanaan kemitraan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;

9. Melakukan evaluasi pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
 10. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
 11. Melakukan penyusunan laporan Seksi.
- c) Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, pengembangan model peningkatan mutu, dan kemitraan dibidang peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Adapun rincian tugas dari bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyusunan program kerja bidang;
2. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Melaksanakan pengembangan model peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
4. Melaksanakan pengembangan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
5. Melaksanakan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
6. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
7. Melaksanakan penyusunan hasil fasilitasi, pengembangan model, kemitraan, dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
8. Melaksanakan pendayagunaan laboratorium LPMP;

9. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Bidang; dan
10. Melaksanakan penyusunan laporan Bidang.

Bidang Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan terdiri atas :

c.1). Seksi Pendidikan Dasar.

Seksi Pendidikan Dasar mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program kerja Seksi dan konsep program kerja Bidang;
2. Melakukan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar;
3. Melakukan penyusunan bahan pengembangan model peningkatan mutu pendidikan dasar;
4. Melakukan penyusunan bahan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan dasar;
5. Melakukan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar;
6. Melakukan penyusunan hasil fasilitasi, pengembangan model, kemitraan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan dasar;
7. Melakukan pendayagunaan laboratorium LPMP;
8. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
9. Melakukan penyusunan laporan Seksi.

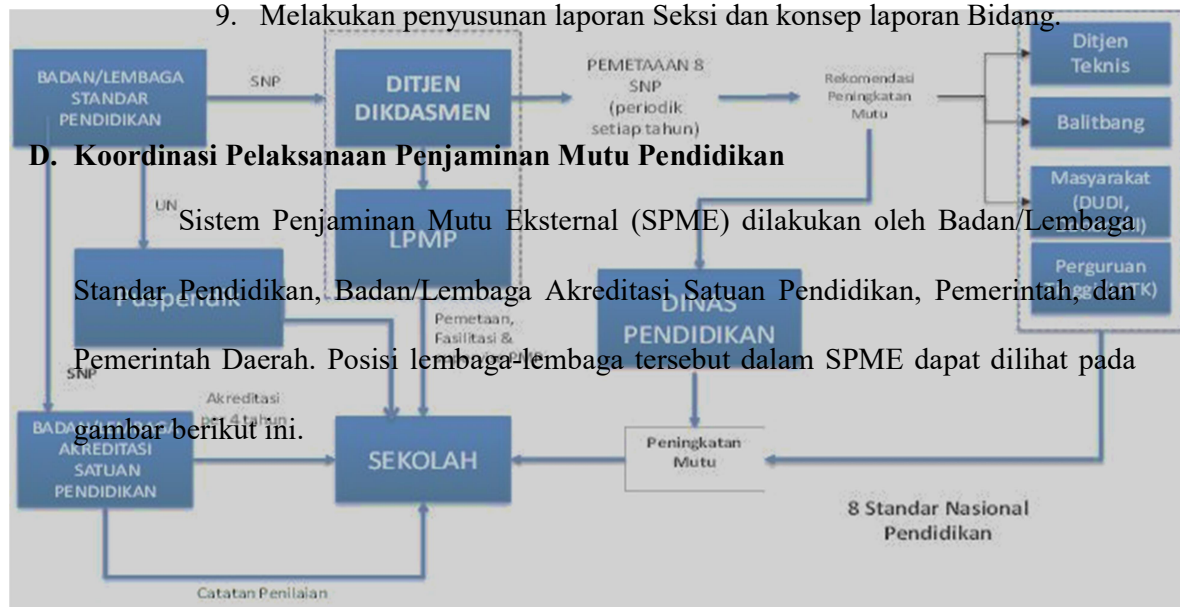
c.2). Seksi Pendidikan Menengah

Seksi Pendidikan Menengah mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan program kerja Seksi;

2. Melakukan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menengah;
3. Melakukan penyusunan bahan pengembangan model peningkatan mutu pendidikan menengah;
4. Melakukan penyusunan bahan pengembangan dan pelaksanaan kemitraan peningkatan mutu pendidikan menengah;
5. Melakukan penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan menengah;
6. Melakukan penyusunan hasil fasilitasi, pengembangan model, kemitraan dan evaluasi peningkatan mutu pendidikan menengah;
7. Melakukan pendayagunaan laboratorium LPMP;
8. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan
9. Melakukan penyusunan laporan Seksi dan konsep laporan Bidang.

D. Koordinasi Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan



Gambar 1.2 Koordinasi Kelembagaan Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan

Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa posisi LPMP merupakan kepanjangan tangan Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Peran LPMP adalah melaksanakan pemetaan mutu pendidikan di wilayah binaan masing-masing dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi ke sekolah dalam penjaminan mutu pendidikan.

Sesuai dengan Permendiknas No 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, selain menjalankan fungsi pelaksanaan urusan administrasi, LPMP menyelenggarakan fungsi:

1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;

4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan.

E. Isu- Isu Strategis/Permasalahan

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis, LPMP Sumatera Barat menghadapi beberapa permasalahan yang dapat dikatakan berpengaruh terhadap pencapaian target-target yang sudah ditetapkan. Permasalahan tersebut diantaranya yaitu:

1. Masih adanya sekolah yang belum mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP);
2. Sekolah dalam membuat Rencana Kerja Sekolah (RKS) masih belum mengacu pada peta mutu
3. Pada kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, dari sebanyak 5.499 sekolah, masih ada sebanyak 46 sekolah yang tidak terkirim data mutunya, atau hanya 5.453 sekolah yang terkirim data mutunya. Hal ini perlu mendapat perhatian agar seluruh sekolah yang ada di Provinsi Sumatera Barat betul-betul mempunyai peta mutu pendidikan yang akurat. Untuk itu, peran pengawas perlu lebih diperkuat.
4. Belum optimalnya pelaksanaan supervisi akademik kepada guru di satuan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran guru di kelas.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA LPMP SUMATERA BARAT

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpedoman kepada rencana kinerja yang telah disusun untuk dilaksanakan selama lima tahun dan selama satu tahun berjalan yang tertuang di dalam rencana strategis (Renstra). Didalam perencanaan kinerja tersebut terdapat target-target yang telah disusun sedemikian rupa yang berpedoman kepada target-target yang ada pada unit utama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adapun target-target yang ada di dalam rencana strategis tersebut dapat dilihat tabel-tabel berikut ini:

1. Sekolah yang dipetakan mutu pendidikan tahun 2015 - 2019

Tabel 2.1 Target sekolah yang dipetakan mutu pendidikan tahun 2015-2019

No.	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang terpetakan mutu pendidikannya	Persen (%)	90,2	100	100	100	100
2	SMP yang terpetakan mutu pendidikannya	Persen (%)	71,5	100	100	100	100
3	SMA yang terpetakan mutu pendidikannya	Persen (%)	71,4	100	100	100	100
4	SMK yang terpetakan mutu pendidikannya	Persen (%)	59,6	65	80	90	100

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa seluruh target terhadap sekolah yang dipetakan mutunya hingga akhir tahun Renstra yaitu tahun 2019 adalah 100%.

2. Target Peningkatan Indeks Efektifitas berdasarkan 8 SNP tahun 2015 - 2019

Tabel 2.2 Target peningkatan indeks efektifitas berdasarkan 8 SNP tahun 2015-2019

No.	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang meningkat efektifitasnya	Persen (%)	5	15	40	75	95
2	SMP yang meningkat efektifitasnya	Persen (%)	20	35	60	80	95
3	SMA yang meningkat efektifitasnya	Persen (%)	20	35	60	80	95

4	SMK yang meningkat efektifitasnya	Persen (%)	10	25	45	70	95
---	-----------------------------------	------------	----	----	----	----	----

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa target peningkatan indeks efektifitas berdasarkan 8 SNP dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

3. Target sekolah yang di supervisi mutu pendidikan tahun 2015 - 2019

Tabel 2.3 Target sekolah yang di supervisi mutu pendidikan tahun 2015-2019

No.	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD yang disupervisi mutu pendidikannya	Persen (%)	16,8	25	40	60	80
2	SMP yang disupervisi mutu pendidikannya	Persen (%)	16,8	25	40	60	80
3	SMA yang disupervisi mutu pendidikannya	Persen (%)	16,8	25	40	60	80
4	SMK yang disupervisi mutu pendidikannya	Persen (%)	16,8	25	40	60	80

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa target sekolah yang di supervisi mutu pendidikan dari tahun 2015 sampai tahun 2019.

4. Target pelaksanaan kurikulum 2013 dari tahun 2015 hingga tahun 2019

Tabel 2.4 Persentase sekolah pelaksana kurikulum nasional tahun 2015-2019

No.	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase sekolah pelaksana kurikulum nasional berdasarkan sekolah pelaksana	Persen (%)	25	50	75	100	100

Tabel 2.4 menunjukkan bahwa target sekolah pelaksana kurikulum 2013 dari tahun 2015 sampai 2019.

5. Target Kegiatan Pendukung Sasaran Kurikulum Nasional Tahun 2015 - 2019

Untuk mendukung ketercapaian kegiatan diatas, maka didukung oleh kegiatan fasilitasi pendidik yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5 Target kegiatan pendukung sasaran kurikulum nasional tahun 2015-2019

No	IKK	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Guru SD yang telah di fasilitasi dalam Pelatihan Kurikulum Nasional	Orang/ Sekolah	10.702 /1014	21.404 /2029	32.105 /3043	42.807 /4057	42.807 /4057
2	Guru SMP yang telah di fasilitasi dalam Pelatihan Kurikulum Nasional	Orang/ Sekolah	4.737 /187	9.474 /375	14.211 /563	18.948 /750	18.948 /750
3	Guru SMA yang telah di fasilitasi dalam Pelatihan Kurikulum Nasional	Orang/ Sekolah	2.919 /72	5.838 /145	8.757 /218	11.676 /290	11.676 /290
4	Guru SMK yang telah di fasilitasi dalam Pelatihan Kurikulum Nasional	Orang/ Sekolah	1.866 /46	3.733 /93	5.599 /139	7.465 /185	7.465 /185

6. Target Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan

Selain fungsi diatas, LPMP Sumatera Barat juga mendapatkan tugas tambahan berupa pengembangan model penjaminan mutu pendidikan. Target pengembangan model penjaminan mutu pendidikan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6 Target pengembangan model penjaminan mutu pendidikan tahun 2015-2019

No.	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pengembangan model pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah	Jenis	1	1	1	1	1
2	Pengembangan model supervisi mutu pendidikan dasar dan menengah	Jenis	1	2	3	4	5

3	Pengembangan model fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah	Kegiatan	2	4	6	8	10
---	--	----------	---	---	---	---	----

7. Target Pelaksanaan Kemitraan tahun 2015 – 2019

Berikut ini adalah target dalam pelaksanaan kemitraan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 Target kemitraan LPMP Sumatera Barat tahun 2015-2019

No.	IKP	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kemitraan dalam pemetaan dan supervisi mutu pendidikan tingkat lembaga/kabupaten/kota /provinsi/nasional/regional	Dokumen	10	20	25	30	35
2	Jumlah kemitraan dalam kegiatan fasilitasi mutu pendidikan tingkat nasional dan regional	Dokumen	1	1	1	1	1

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Barat pada tahun 2018 melaksanakan kegiatan berpedoman pada perjanjian kinerja dengan sasaran strategis meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan. Berdasarkan sasaran strategis tersebut melahirkan tiga indikator kinerja yaitu :

1. Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya
2. Persentase Satuan Pendidikan yang telah di fasilitasi berdasarkan 8 SNP
3. Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013

Ketiga indikator kinerja tersebut dirumuskan untuk menghasilkan output berikut ini:

1. SD yang telah dipetakan mutunya
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya
3. SMP yang telah dipetakan mutunya

4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya
5. SMA yang telah dipetakan mutunya
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya
7. SMK yang telah dipetakan mutunya
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya
9. SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
10. SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
11. SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
12. SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Pada tabel berikut ini ditampilkan Perjanjian Kinerja LPMP Provinsi Sumatera Barat tahun 2018.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja LPMP Sumatera Barat Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SASARAN 2018	ANGGARAN
1	2		3	4
1. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya		10.974 sekolah SD,SMP,SMA,SMK	4.290.854.000
	1	SD yang telah dipetakan mutunya	100%	
	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%	
	Output:			
	<i>SD yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>		8.318 Sekolah	
	3	SMP yang telah dipetakan mutunya	100%	
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
	Output:			
	<i>SMP yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>		1.592 Sekolah	
	5	SMA yang telah dipetakan mutunya	100%	
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%	
	Output:			
	<i>SMA yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>		644 Sekolah	
	7	SMK yang telah dipetakan mutunya	90%	

	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%	
		Output:		
		<i>SMK yang Terpetakan Mutu Pendidikannya</i>	420 Sekolah	
		Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	608 sekolah SD,SMP,SMA, SMK	5.154.664.000
		Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	2.195 sekolah SD,SMP,SMA, SMK	12.636.309.000
	9	SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		<i>a. SD yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)</i>	157 Sekolah	
		<i>b. SD yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)</i>	157 Sekolah	
		<i>c. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	<i>1.664 Sekolah</i>	
	10	SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		<i>a. SMP yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP (Sekolah model)</i>	70 Sekolah	
		<i>b. SMP yang difasilitasi melalui Kemitraan</i>	70 Sekolah	
		<i>c. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	<i>318 Sekolah</i>	
	11	SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		<i>a. SMA yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP (Sekolah model)</i>	41 Sekolah	
		<i>b. SMA yang difasilitasi melalui Kemitraan</i>	41 Sekolah	
		<i>c. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	<i>129 Sekolah</i>	
	12	SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%	
		Output:		
		<i>a. SMK yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)</i>	36 Sekolah	
		<i>b. SMK yang difasilitasi melalui Kemitraan</i>	36 Sekolah	
		<i>c. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013</i>	<i>84 Sekolah</i>	
2. Terwujudnya Tata kelola LPMP Sumatera Barat yang baik	1	<i>Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan, dan terbaru</i>	92%	3.422.290.000
	2	<i>Nilai Minimal SAKIP LPMP Sumatera Barat</i>	78	

Secara keseluruhan DIPA LPMP Provinsi Sumatera Barat pada awal tahun 2018 adalah sebesar Rp. 53.147.100.000,- (Lima puluh tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Pagu anggaran ini tidak berubah hingga akhir tahun DIPA 2018.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Penetapan kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018, LPMP Sumatera Barat berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi atau lembaga. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan instansi atau lembaga dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, maka diperlukan suatu gambaran tentang capaian-capaian kinerja tersebut. Di bawah ini diuraikan hasil capaian kinerja LPMP Sumatera Barat sebagai implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab menuju akuntabilitas program dan anggaran lembaga.

A. Capaian Kinerja LPMP Sumatera Barat

Dalam rangka menciptakan akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan LPMP Sumatera Barat, maka dibutuhkan analisis pencapaian dari masing-masing sasaran yang telah diimplementasikan melalui program-program prioritas yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Pencapaian sasaran LPMP Sumatera Barat Tahun 2018
Dibandingkan dengan DIPA awal tahun 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SASARAN 2018	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			
					SASARAN	%	ANGGARAN	%
1	2		3	4	5	6	7	8
1. Meningkatkan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang	Satuan Pendidikan Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya		10.974 Sekolah SD, SMP, SMA, SMK	4.290.854.000,-	10.880 Sekolah			
	1	Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%		4.141 Sekolah			

pendidikan	2	Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%					
	3	Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%		790 Sekolah			
	4	Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%					
	5	Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%		320 Sekolah			
	6	Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%					
	7	Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	90%		202 Sekolah			
	8	Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%					
	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP		608 Sekolah	5.154.664.000,-	608 Sekolah			
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013		2.195 Sekolah	12.636.309.000,-	1.988 Sekolah			
	9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		4.119 Sekolah			

	a	SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)	157 Sekolah		181 Sekolah			
	b	SD yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)	157 Sekolah		181 Sekolah			
	c	SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	1.664 Sekolah		1.543 Sekolah			
10		Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		828 Sekolah			
	a	SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)	70 Sekolah		80 Sekolah			
	b	SMP yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)	70 Sekolah		80 Sekolah			
	c	SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	318 Sekolah		275 Sekolah			
11		Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam	60%		294 Sekolah			

		pencapaian SNP					
	a	SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)	41 Sekolah		44 Sekolah		
	b	SMA yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)	41 Sekolah		44 Sekolah		
	c	SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	129 Sekolah		106 Sekolah		
12		Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		188 Sekolah		
	a	SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)	36 Sekolah		35 Sekolah		
	b	SMK yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)	36 Sekolah		35 Sekolah		
	c	SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	84 Sekolah		64 Sekolah		

Tabel pengukuran kinerja di atas persentasenya belum dimasukkan, dikarenakan ada beberapa perubahan terkait dengan data perjanjian kinerja, baik itu berupa target, maupun anggaran, yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pada indikator kinerja Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya, targetnya di perjanjian kinerja yang ditulis diawal tahun dan yang tertera di RKAKL adalah sebanyak 10.974 Sekolah, sementara data yang bisa diambil dari yang telah dipublikasikan adalah sebanyak 5.499 Sekolah yang terdiri dari SD 4.163 Sekolah, SMP 802 Sekolah, SMA 324 Sekolah dan SMK 210 Sekolah. Terjadi perubahan dari sisi anggaran yang semula Rp. 4.290.854.000,- berubah menjadi Rp. 3.601.176.000,-
2. Pada indikator Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, target awalnya yang muncul di RKAKL adalah 608 Sekolah, sementara data yang betul adalah separoh dari angka tersebut atau 304 Sekolah yang diambil dari Sekolah sasaran tahun 2016 dan 2017, kemudian ada penambahan 40 Sekolah tahun 2018, sehingga menjadi 344 Sekolah. Terjadi perubahan anggaran dari semula Rp. 5.154.664.000,- menjadi Rp. 6.166.874.000,-
3. Pada indikator Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013, target yang muncul di RKAKL adalah sebanyak 2.195 Sekolah, kemudian ada perubahan menjadi 2.053 Sekolah. Indikator kinerja ini juga mengalami perubahan anggaran yang semula Rp. 12.636.309.000,- menjadi Rp. 13.218.379.000,-

Berikut ini ditampilkan data pengukuran kinerja LPMP Sumatera Barat tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Pencapaian sasaran LPMP Sumatera Barat Tahun 2018 DIPA akhir dibandingkan dengan realisasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN 2018	ANGGARAN (Rp)	REALISASI			
				SASARAN	%	ANGGARAN (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan	Satuan Pendidikan Yang Terpetakan Mutu Pendidikan-nya	5.499 Sekolah SD, SMP, SMA, SMK	3.601.176.000	5.45 Sekolah	99.16	2.717.516.574	75.46
	1 Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%		4.141 Sekolah	99.47		
	2 Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya	75%		2.061 Sekolah	49,56		
	3 Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%		790 Sekolah	98.5		
	4 Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya	80%		393 Sekolah	49,37		
	5 Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%		320 Sekolah	98.77		
	6 Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya	80%		172 Sekolah	53,42		
	7 Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	90%		202 Sekolah	96.19		
	8 Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya	70%		111 Sekolah	53,11		
	Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	344 Sekolah	6.166.874.000	340 Sekolah	98.84	5.748.516.770	93.22
	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	2.053 Sekolah	13.218.379.000	1.988 Sekolah	96.83	12.365.343.960	93.53

9	Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		4.119 Sekolah	98.02		
	a. SD yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)	181 Sekolah		181 Sekolah	100		
	b. SD yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)	181 Sekolah		181 Sekolah	100		
	c. SD yang melaksanakan Kurikulum 2013	1.578 Sekolah	6.312.000.000	1.543 Sekolah	97.78	6.172.000.000	
10	Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		828 Sekolah	97.76		
	a. SMP yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)	81 Sekolah		80 Sekolah	98,77		
	b. SMP yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)	81 Sekolah		80 Sekolah	98,77		
	c. SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013	287 Sekolah	2.296.000.000	275 Sekolah	95.82	2.200.000.000	
	11 Persentase SMA yang	60%		294 Sekolah	90.74		

		telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP					
		a. SMA yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)	45 Sekolah		44 Sekolah	97,77	
		b. SMA yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)	45 Sekolah		44 Sekolah	97,77	
		c. SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013	111 Sekolah	1.110.000.000	106 Sekolah	95.5	1.060.000.000
	12	Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	60%		188 Sekolah	89.52	
		a. SMK yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP (Sekolah Model)	37 Sekolah		35 Sekolah	94,59	
		b. SMK yang difasilitasi melalui Kemitraan (Sekolah Model)	37 Sekolah		35 Sekolah	94,59	
		c. SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013	77 Sekolah	Rp. 770.000.000	64 Sekolah	83.12	Rp. 640.000.000

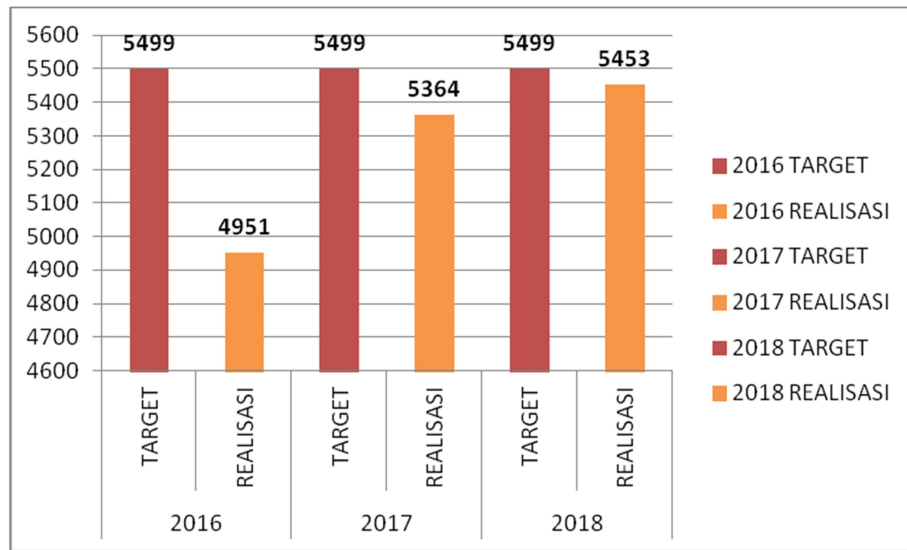
Tabel 3.2 menggambarkan capaian kinerja LPMP Sumatera Barat selama kurun waktu 2018. Penjelasan hasil pengukuran kinerja LPMP Sumatera Barat berikut ini:

1. Indikator kinerja satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya, dari 5.499 sekolah yang menjadi target (jenjang SD, SMP, SMA dan SMK), sebanyak 5.453 sekolah yang terkirim data mutunya atau 99,16%. Masih tersisa 46 Sekolah yang belum terkirim data mutunya untuk tahun 2018. Perbandingan target dan realisasi 2 (dua) tahun terakhir untuk sekolah yang terpetakan mutu pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

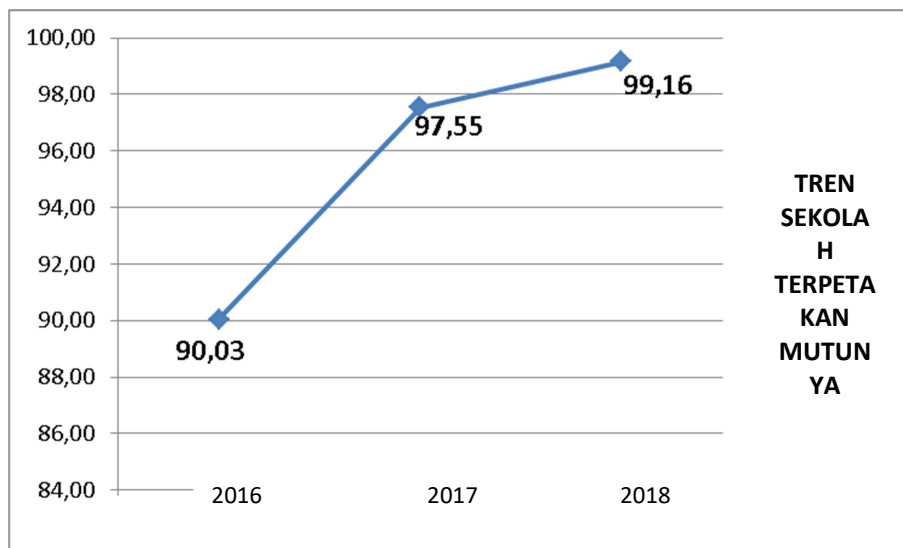
Tabel 3.3 Target dan Realisasi Pemetaan Mutu Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen (%)
1	2016	5.499	4.951	90,03
2	2017	5.499	5.364	97,55
3	2018	5.499	5.453	99,16

Tabel 3.3 dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram batang terlihat pada Gambar 3.1. Visualisasi Gambar 3.1 menunjukkan kecenderungan naiknya realisasi pemetaan mutu pendidikan di sekolah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tren kenaikan realisasi pemetaan mutu pendidikan di sekolah Provinsi Sumatera Barat dalam persentase divisualisasikan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.1 Target dan Realisasi Pemetaan Mutu Pendidikan Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018



Gambar 3.2 Kenaikan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan di Sekolah Provinsi Sumatera Barat

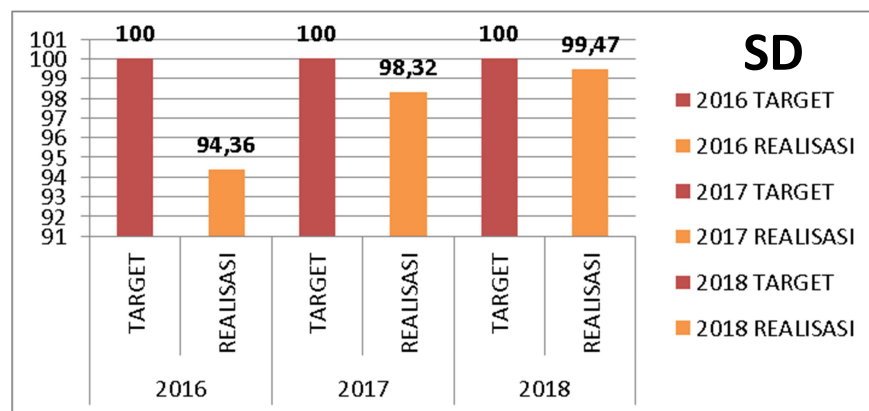
Gambar 3.2 menunjukkan tren kenaikan persentase realisasi pemetaan mutu pendidikan di sekolah Provinsi Sumatera Barat, hal ini menunjukkan bahwa sekolah sudah peduli terhadap pengiriman data pemetaan mutu pendidikan dari tahun 2016 sehingga tahun 2018.

2. Sub indikator persentase SD yang telah dipetakan mutunya, dari 4.163 Sekolah yang menjadi target pengiriman data mutu, sebanyak 4.141 Sekolah yang terkirim data mutunya atau 99.47%. masih ada 22 Sekolah yang belum terkirim data mutunya. Perbandingan target dan realisasi persentase pemetaan mutu pendidikan jenjang SD untuk 2 (dua) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

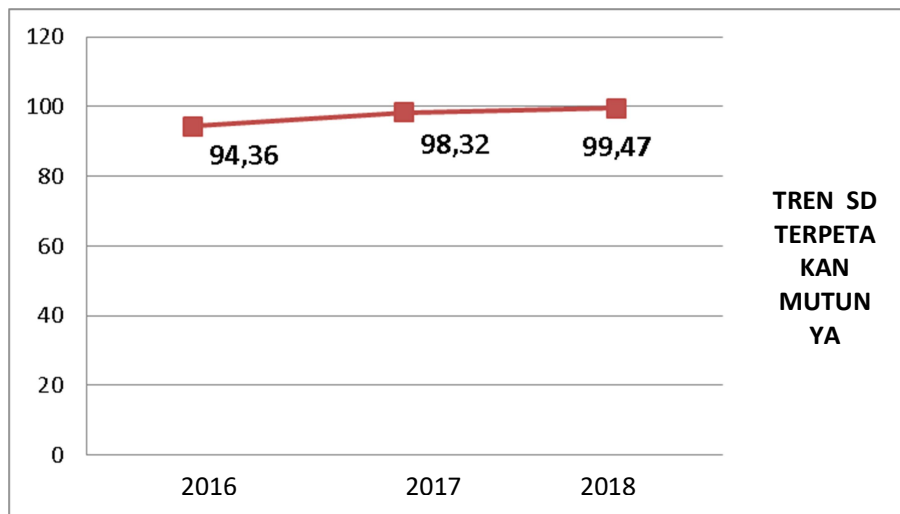
Tabel 3.4 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD Tahun 2016 s.d 2018

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	100	94.36
2	2017	100	98.32
3	2018	100	99.47

Tabel 3.4 dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram batang terlihat pada Gambar 3.3. Visualisasi Gambar 3.3 menunjukkan kecenderungan naiknya persentase realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SD Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tren kenaikan persentase realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SD Provinsi Sumatera Barat dalam persentase divisualisasikan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.3 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.4 Kenaikan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SD Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3.4 menunjukkan tren kenaikan realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SD Provinsi Sumatera Barat, hal ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang SD sudah mulai peduli terhadap pengiriman data pemetaan mutu pendidikan dari tahun 2016 sehingga tahun 2018.

3. Sub indikator persentase SMP yang telah dipetakan mutunya, dari 802 Sekolah yang menjadi target, sebanyak 790 Sekolah yang terkirim data mutunya atau 98,5%. Sisanya sebanyak 12 Sekolah yang belum terkirim data mutunya. Perbandingan target dan realisasi persentase pemetaan mutu pendidikan jenjang SMP untuk 2 (dua) tahun terakhir, maka dapat dilihat dari tabel berikut:

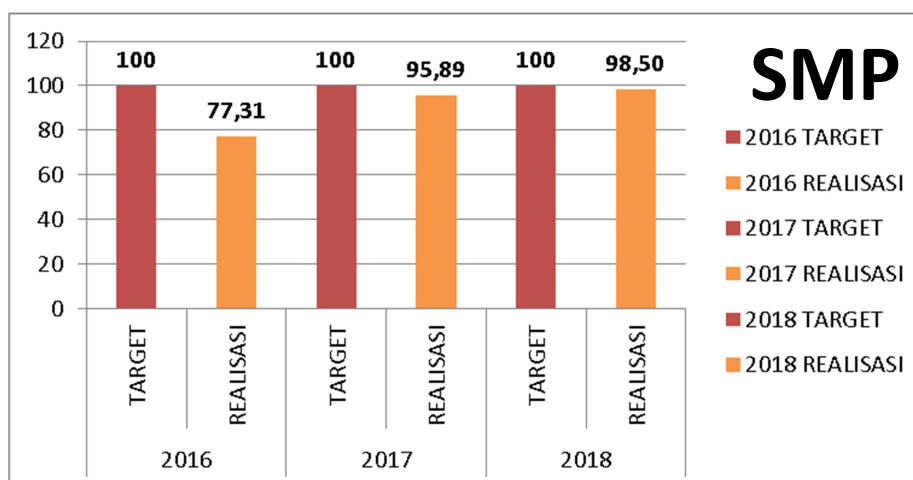
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP Tahun 2016 s.d 2018

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	100	77.31
2	2017	100	95.89
3	2018	100	98.50

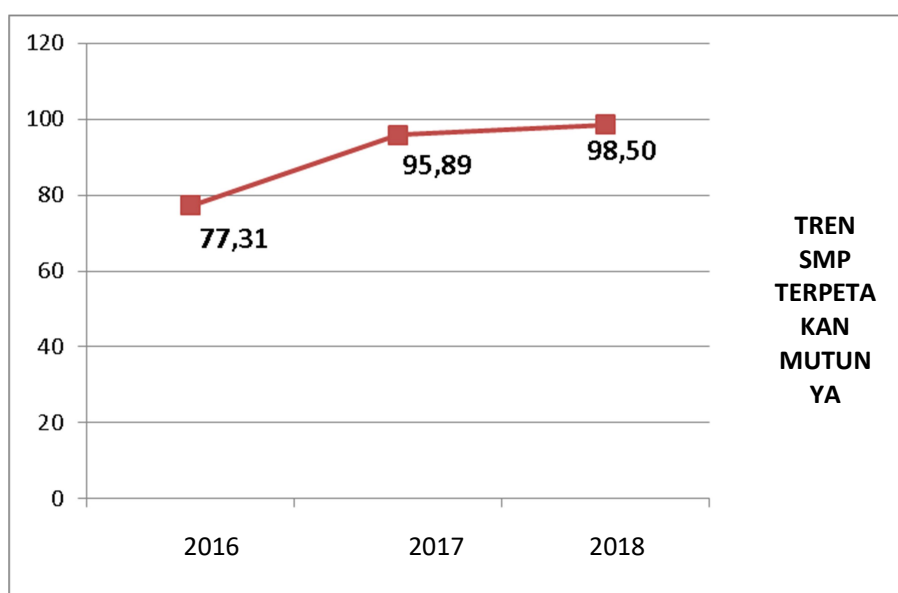
Tabel 3.5 dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram batang terlihat pada Gambar

3.5. Visualisasi Gambar 3.5 menunjukkan kecenderungan naiknya realisasi

pemetaan mutu pendidikan jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tren kenaikan realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat dalam persentase divisualisasikan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.5 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.6 Kenaikan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3.6 menunjukkan tren kenaikan persentase realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat, hal ini menunjukkan bahwa

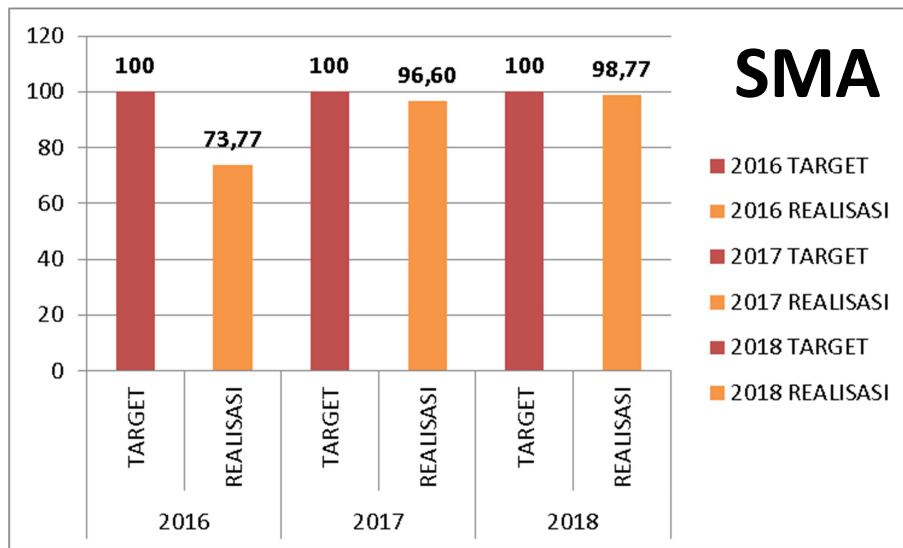
sekolah jenjang SMP sudah mulai peduli terhadap pengiriman data pemetaan mutu pendidikan dari tahun 2016 sehingga tahun 2018.

4. Sub indikator persentase SMA yang telah dipetakan mutunya, dari 324 Sekolah yang menjadi target pengiriman peta mutu, sebanyak 320 Sekolah yang terkirim atau 98,77%. Masih ada sebanyak 4 Sekolah yang belum terkirim data mutunya. Perbandingan target dan realisasi persentase pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA untuk 2 (dua) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

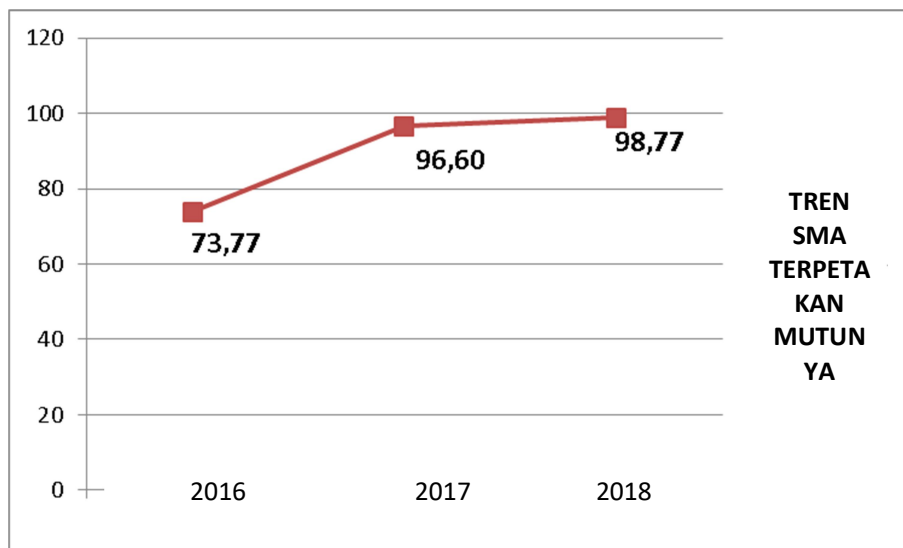
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA Tahun 2016 s.d 2018

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	100	73.77
2	2017	100	96.60
3	2018	100	98.77

Tabel 3.6 dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram batang terlihat pada Gambar 3.7. Visualisasi Gambar 3.7 menunjukkan kecenderungan naiknya realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tren kenaikan realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat dalam persentase divisualisasikan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.7 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.8 Kenaikan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat

Gambar 3.8 menunjukkan tren kenaikan persentase realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat, hal ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang SMA sudah mulai peduli terhadap pengiriman data pemetaan mutu pendidikan dari tahun 2016 sehingga tahun 2018.

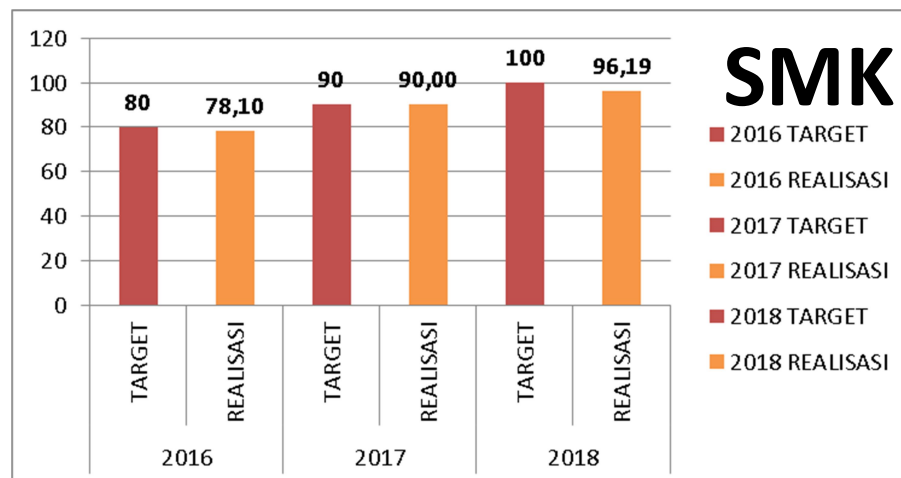
5. Sub indikator persentase SMK yang telah dipetakan mutunya, dari 210 Sekolah yang mejadi target, sebanyak 202 Sekolah yang terkirim data mutunya atau 96,19%. Masih ada sebanyak 8 Sekolah yang belum terkirim data mutunya. Perbandingan target dan realisasi persentase pemetaan mutu pendidikan jenjang SMK untuk 2 (dua) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut ini::

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK Tahun 2016 s.d Tahun 2018

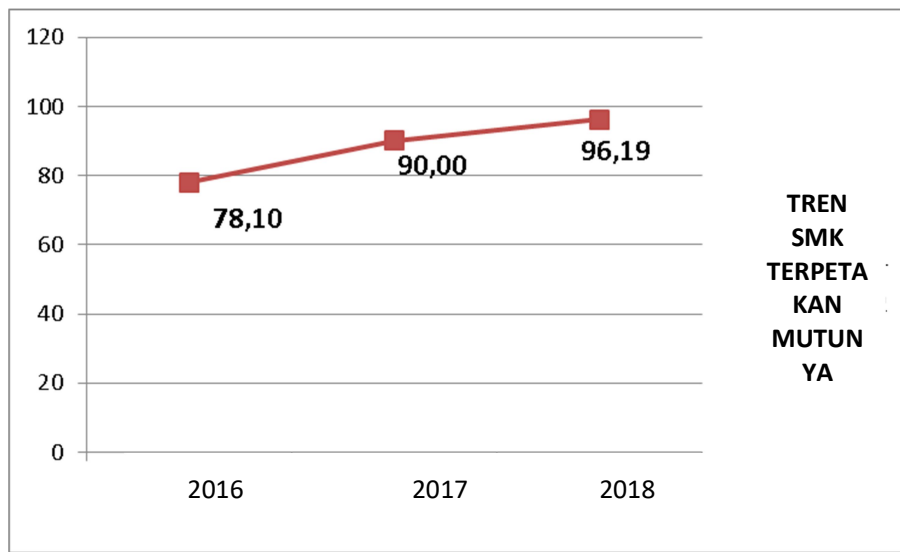
No	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	80	78.10
2	2017	90	90
3	2018	100	96.19

Tabel 3.7 dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram batang terlihat pada Gambar

3.9. Visualisasi Gambar 3.9 menunjukkan kecenderungan naiknya realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tren kenaikan realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat dalam persentase divisualisasikan pada Gambar 3.10.



Gambar 3.9 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK Provinsi Sumatera Barat



Gambar 3.10 Target dan Realisasi Persentase Pemetaan Mutu Pendidikan Jenjang SMK Provinsi Sumatera Barat

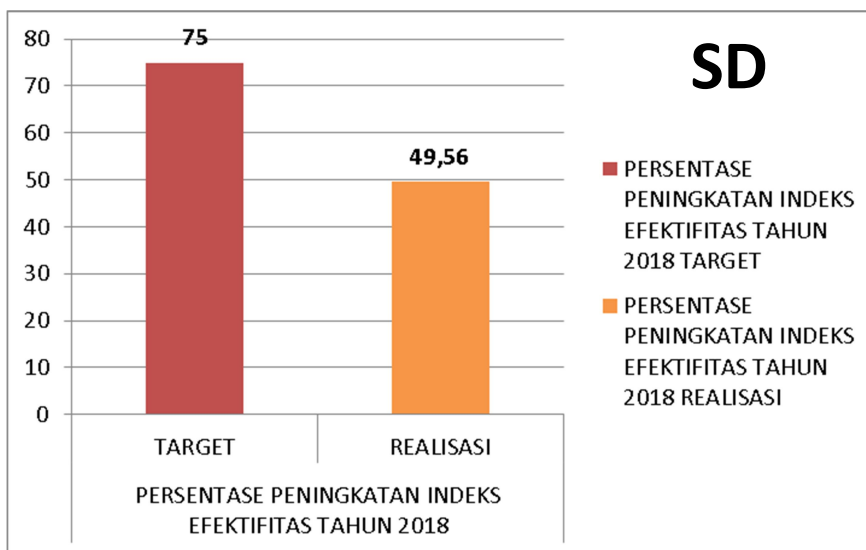
Gambar 3.10 menunjukkan tren kenaikan persentase realisasi pemetaan mutu pendidikan jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat, hal ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang SMA sudah mulai peduli terhadap pengiriman data pemetaan mutu pendidikan dari tahun 2016 sehingga tahun 2018.

Dari data di atas terlihat ada sekolah-sekolah yang belum mengirimkan data mutu.

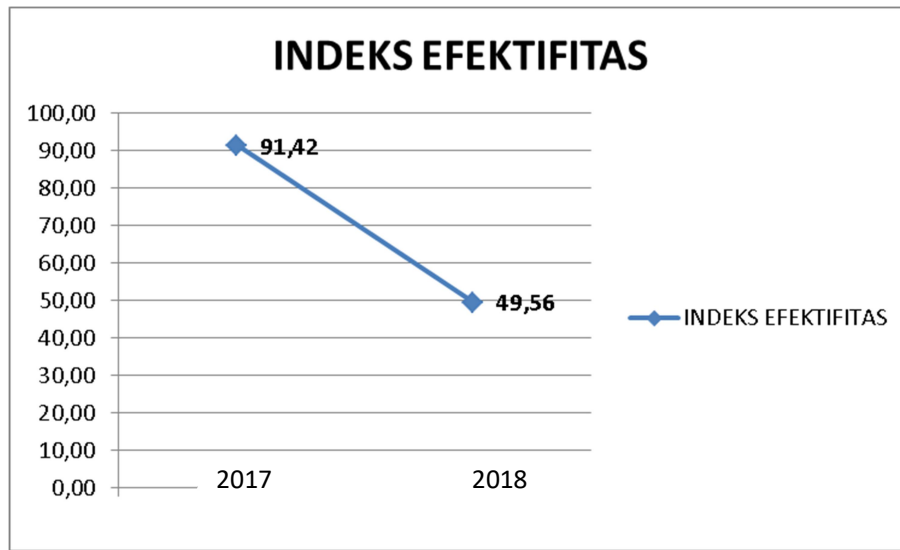
Hal ini disebabkan oleh:

- masih ada operator sekolah yang belum memahami penggunaan aplikasi dan pengiriman data PMP;
- kondisi geografis sekolah masih ada sulit untuk mendapatkan akses internet dan listrik;
- masih kurangnya kesadaran pihak sekolah mengenai pentingnya data PMP;
- masih ada beberapa sekolah yang baru keluar NPSN nya menjelang *cut off* pengiriman data PMP sehingga tidak dapat menarik prefill dapodik sekolah;

- e. masih ada beberapa sekolah yang tidak optimal operasionalnya namun NPSN nya masih aktif.
6. Sub indikator peningkatan indeks efektifitas jenjang SD tahun 2018 sebesar 2.061 dari 4.159 Sekolah (49.55%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan target dan realisasi peningkatan indeks efektifitas jenjang SD tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.11. Sedangkan tren presentase peningkatan indek efektifitas jenjang SD tahun 2018 dibanding dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.12.



Gambar 3.11 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SD

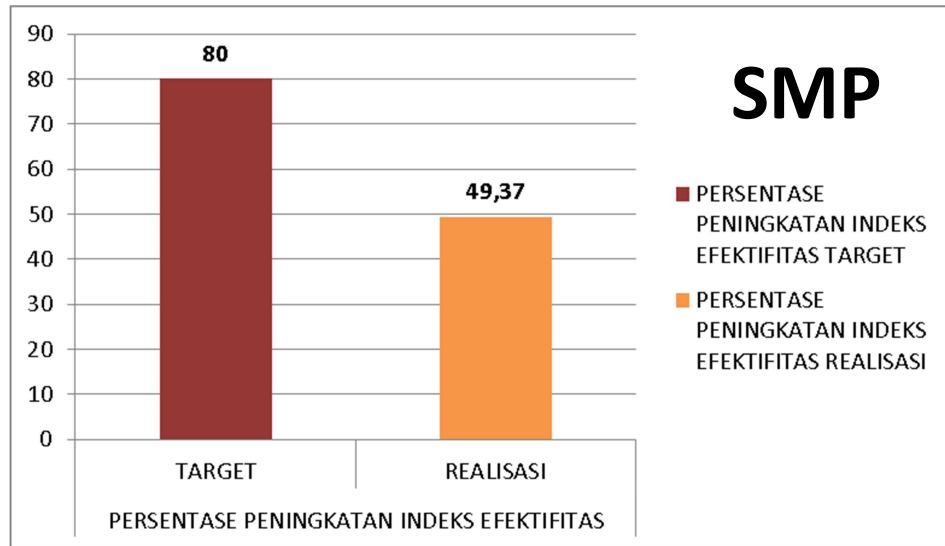


Gambar 3.12 Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SD tahun 2018 dibanding Tahun 2017

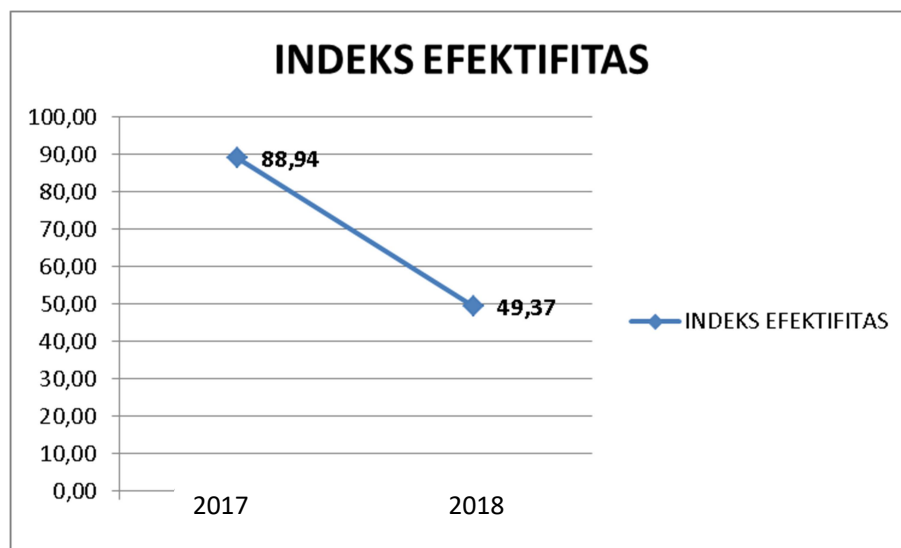
Gambar 3.12 menunjukkan bahwa persentase peningkatan indeks efektifitas jenjang SD tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya terkoreksi sebesar 49.56%. Ada beberapa hal yang menjadi indikasi terkait terkoreksinya capaian SNP jenjang SD menjadi lebih rendah di tahun 2018, dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertama, adanya himbauan dalam pengisian data Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) sekolah mengisi dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Kedua, adanya kesadaran sekolah tentang pentingnya data untuk kepentingan penyusunan perencanaan anggaran sekolah, Ketiga meningkatnya kualitas pendampingan oleh pengawas pembina saat pengisian data PMP, Keempat masih ada beberapa sekolah yang belum selesai pengolahan data PMP tetapi sudah dihitung capaian SNP (dengan rata-rata capaian menuju SNP 1 (0 – 2.04)).

6. Sub indikator peningkatan indeks efektifitas jenjang SMP tahun 2018 sebesar 393 dari 796 sekolah (49,37%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan target dan realisasi peningkatan indeks efektifitas jenjang SMP tahun 2018 dapat

dilihat pada Gambar 3.13. Sedangkan tren presentase peningkatan indeks efektifitas jenjang SD tahun 2018 dibanding dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.14.



Gambar 3.13 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SMP

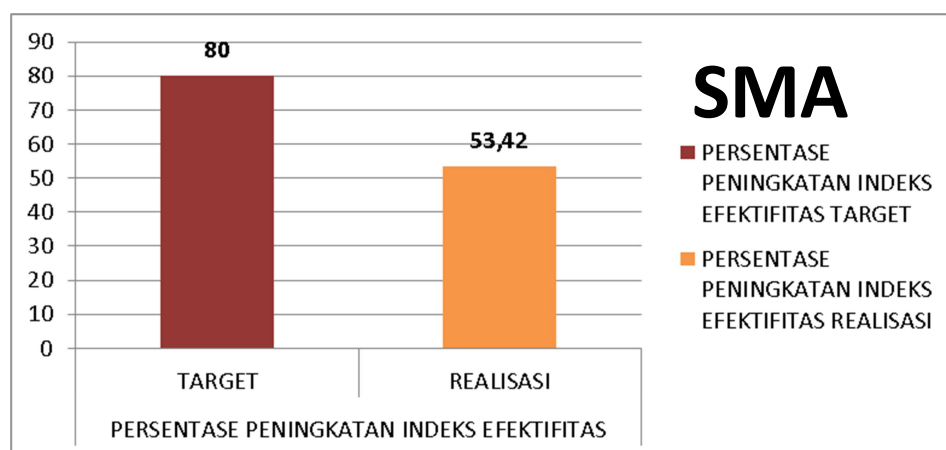


Gambar 3.14 Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SMP tahun 2018 dibanding Tahun 2017

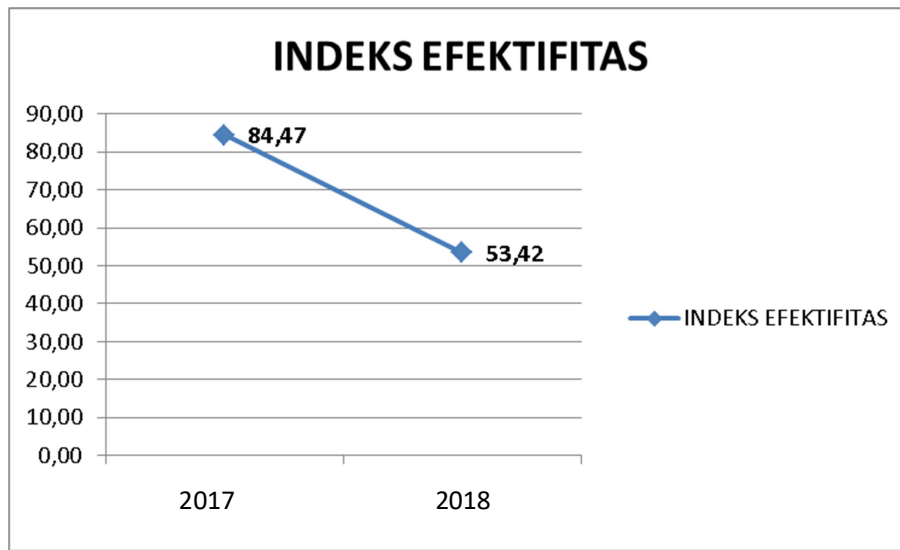
Gambar 3.14 menunjukkan bahwa persentase peningkatan indeks efektifitas jenjang SMP tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya terkoreksi sebesar 49.37%.

Ada beberapa hal yang menjadi indikasi terkait terkoreksinya capaian SNP jenjang SMP menjadi lebih rendah di tahun 2018, dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertama, adanya himbauan dalam pengisian data Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) sekolah mengisi dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Kedua, adanya kesadaran sekolah tentang pentingnya data untuk kepentingan penyusunan perencanaan anggaran sekolah, Ketiga meningkatnya kualitas pendampingan oleh pengawas pembina saat pengisian data PMP, Keempat masih ada beberapa sekolah yang belum selesai pengolahan data PMP tetapi sudah dihitung capaian SNP (dengan rata-rata capaian menuju SNP 1 (0 – 2.04)).

7. Sub indikator peningkatan indeks efektifitas jenjang SMA tahun 2018 sebesar 172 dari 322 Sekolah (53,42%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan target dan realisasi peningkatan indeks efektifitas jenjang SMA tahun 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.15. Sedangkan tren presentase peningkatan indeks efektifitas jenjang SD tahun 2018 dibanding dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.16.



Gambar 3.15 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SMA

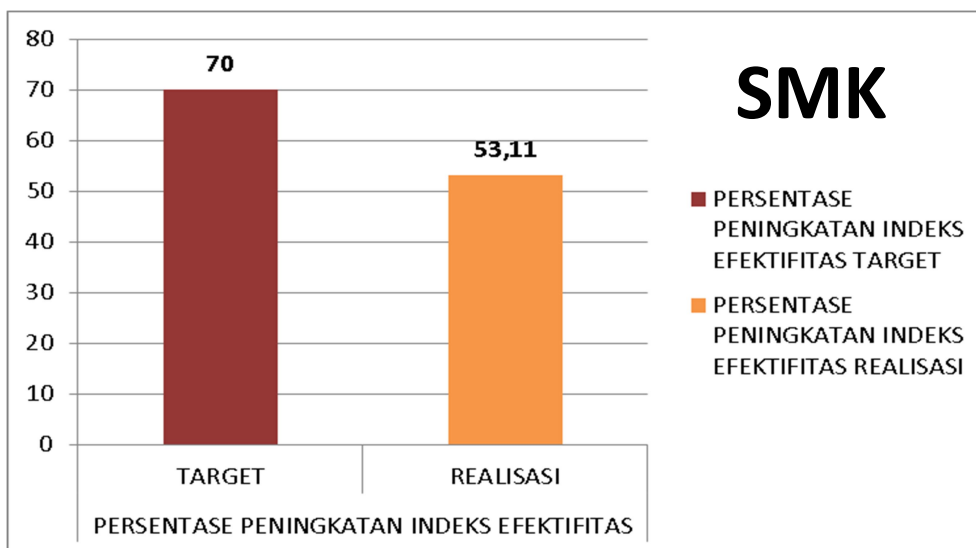


Gambar 3.16 Persentase Peningkatan Index Efektifitas Jenjang SMA tahun 2018 dibanding Tahun 2017

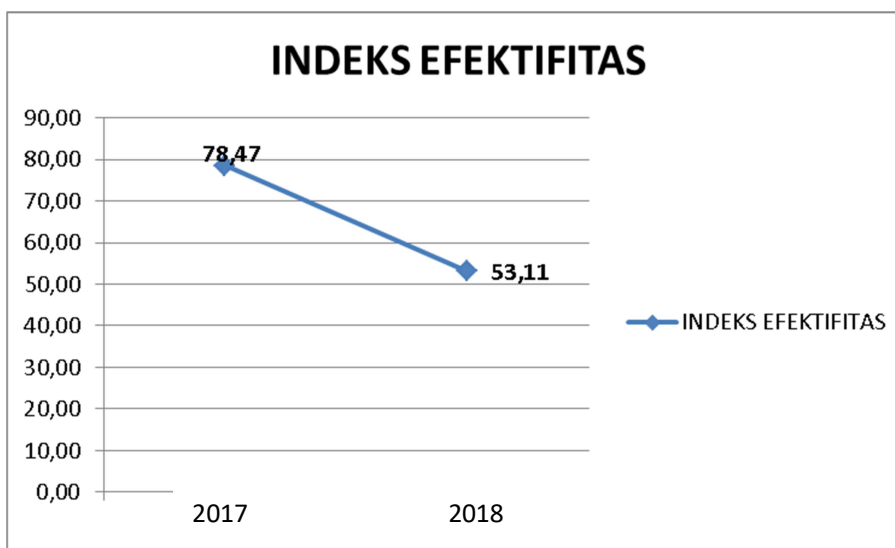
Gambar 3.16 menunjukkan bahwa persentase peningkatan indeks efektifitas jenjang SMA tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya terkoreksi sebesar 53.42%. Ada beberapa hal yang menjadi indikasi terkait terkoreksinya capaian SNP jenjang SMP menjadi lebih rendah di tahun 2018, dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertama, adanya himbauan dalam pengisian data Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) sekolah mengisi dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Kedua, adanya kesadaran sekolah tentang pentingnya data untuk kepentingan penyusunan perencanaan anggaran sekolah, Ketiga meningkatnya kualitas pendampingan oleh pengawas pembina saat pengisian data PMP, Keempat masih ada beberapa sekolah yang belum selesai pengolahan data PMP tetapi sudah dihitung capaian SNP (dengan rata-rata capaian menuju SNP 1 (0 – 2.04)).

8. Sub indikator peningkatan indeks efektifitas jenjang SMK tahun 2018 sebesar 111 dari 209 Sekolah (53,11%) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbandingan target dan realisasi peningkatan indeks efektifitas jenjang SMK tahun 2018 dapat

dilihat pada Gambar 3.17. Sedangkan tren presentase peningkatan indeks efektifitas jenjang SD tahun 2018 dibanding dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3.18



Gambar 3.17 Perbandingan Persentase Target dan Realisasi Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SMK



Gambar 3.18 Persentase Peningkatan Indeks Efektifitas Jenjang SMK tahun 2018 dibanding Tahun 2017

Gambar 3.18 menunjukkan bahwa persentase peningkatan indeks efektifitas jenjang SMK tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya terkoreksi sebesar 53.11%. Ada

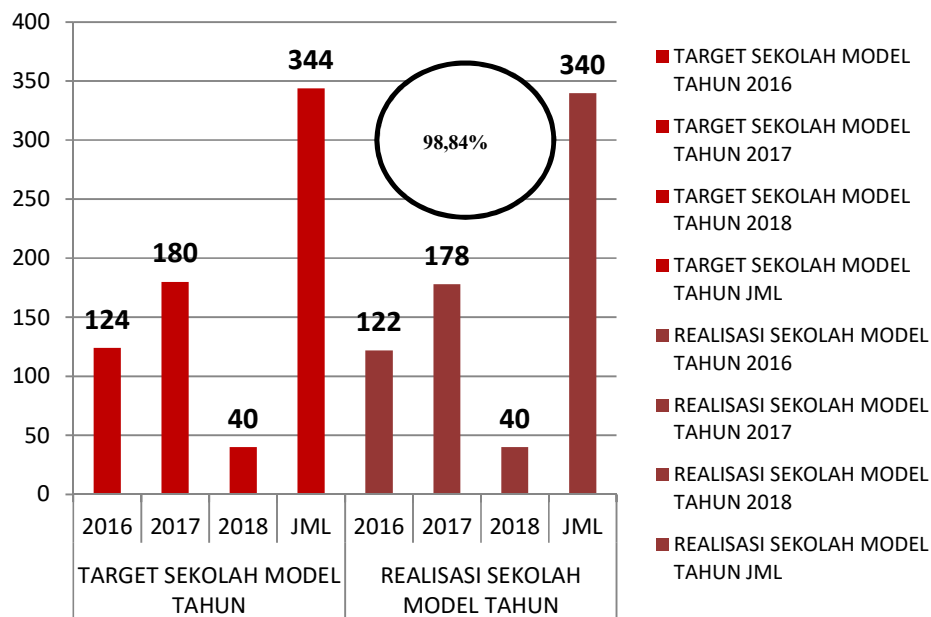
beberapa hal yang menjadi indikasi terkait terkoreksinya capaian SNP jenjang SMP menjadi lebih rendah di tahun 2018, dibanding dengan tahun sebelumnya. Pertama, adanya himbauan dalam pengisian data Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP) sekolah mengisi dengan jujur sesuai kondisi sebenarnya. Kedua, adanya kesadaran sekolah tentang pentingnya data untuk kepentingan penyusunan perencanaan anggaran sekolah, Ketiga meningkatnya kualitas pendampingan oleh pengawas pembina saat pengisian data PMP, Keempat masih ada beberapa sekolah yang belum selesai pengolahan data PMP tetapi sudah dihitung capaian SNP (dengan rata-rata capaian menuju SNP 1 (0 – 2.04)).

9. Indikator kinerja satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, yang terkait dengan sekolah model. Dari 344 Sekolah yang ditargetkan, teralisasi sebanyak 340 Sekolah atau 98,84%. Sekolah model tahun 2016 sebanyak 124 Sekolah, tahun 2017 sebanyak 180 Sekolah, dan tahun 2018 sebanyak 40 Sekolah. Jumlah sekolah model pertahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pelaksanaan Sekolah Model Tahun 2018

TARGET SEKOLAH MODEL TAHUN				REALISASI SEKOLAH MODEL TAHUN				
2016	2017	2018	JML	2016	2017	2018	JML	%
124	180	40	344	122	178	40	340	98.84

Tabel 3.8 dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram batang terlihat pada Gambar 3.19.

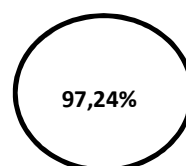


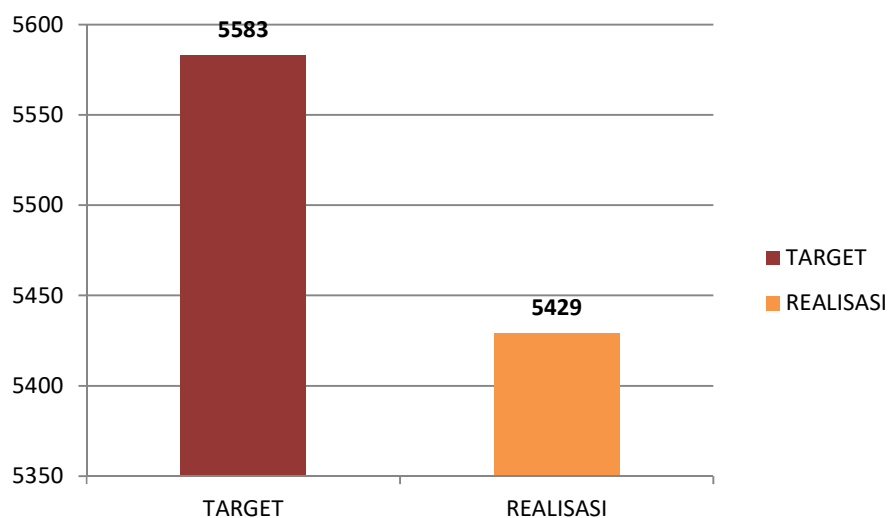
Gambar 3.19 Target dan Realisasi Pelaksanaan Sekolah Model Tahun 2018

10. Indikator satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013, tahun 2018 target sebesar 2.053 Sekolah, terealisasi sebanyak 1.988 Sekolah (96,83%), dan masih ada 65 Sekolah yang belum melaksanakan kurikulum 2013 karena guru-guru nya belum mengikuti Bimtek Guru Sasaran Kurikulum 2013 yang diselenggarakan oleh PPPPTK, sehingga penyaluran dana Bantuan Pemerintah dan pendampingannya tidak bisa dilakukan oleh LPMP Sumatera Barat. Target dan realisasi pelaksana program Kurikulum 2013 jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dari tahun 2016 s.d 2018

TARGET	REALISASI	%
5.583	5.429	97.24





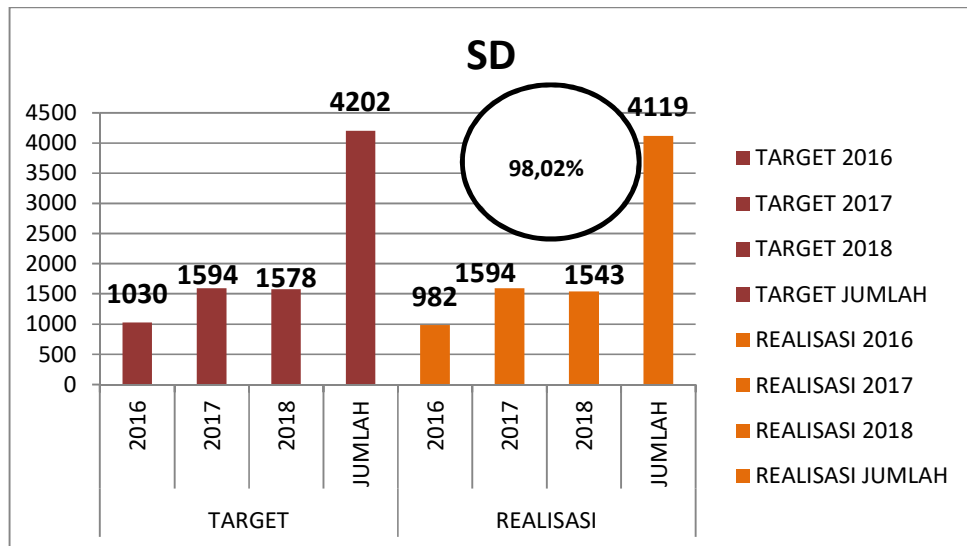
Gambar 3.20 Target dan Realisasi Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dari tahun 2016 s.d 2018

Tabel 3.9 dan Gambar 3.20 menunjukkan bahwa realisasi pelaksana program Kurikulum 2013 jenjang SD, SMP, SMA dan SMK dari 2016 s.d 2018 sebesar 5.429 Sekolah dari 5.583 sekolah (97,24%).

11. Sub indikator persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP. Target jenjang SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 4.202 Sekolah yang terealisasi sebanyak 4.119 Sekolah (98,02%, dan sisa yang tidak terrealisasi sebanyak 83 sekolah, sehingga penyaluran dana Bantuan Pemerintah dan pendampingan kurikulum 2013 tahun 2018 tidak dapat dilakukan oleh LPMP Sumatera Barat.

Tabel 3.10 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SD tahun 2016 s.d 2018

	TARGET				REALISASI				
	2016	2017	2018	JUMLAH	2016	2017	2018	JUMLAH	%
SD	1.030	1.594	1.578	4.202	982	1.594	1.543	4.119	98.02



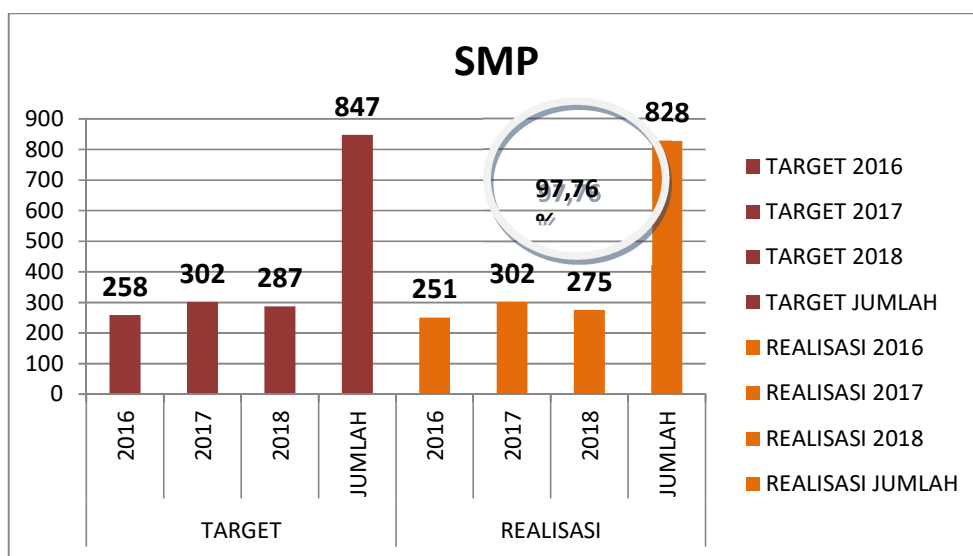
Gambar 3.21 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SD tahun 2016 s.d 2018

Gambar 3.21 menunjukkan target pelaksana program kurikulum jenjang SD tahun 2016 sampai dengan 2018 .

12. Sub indikator persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP. Target jenjang SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 847 Sekolah yang teralisasi sebanyak 828 (97,76%). Pelaksana Program Kurikulum 2013 jenjang SMP dari Tahun 2016 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMP dari Tahun 2016 s.d 2018

	TARGET				REALISASI				
	2016	2017	2018	JUMLAH	2016	2017	2018	JUMLAH	%
SMP	258	302	287	847	251	302	275	828	97.76

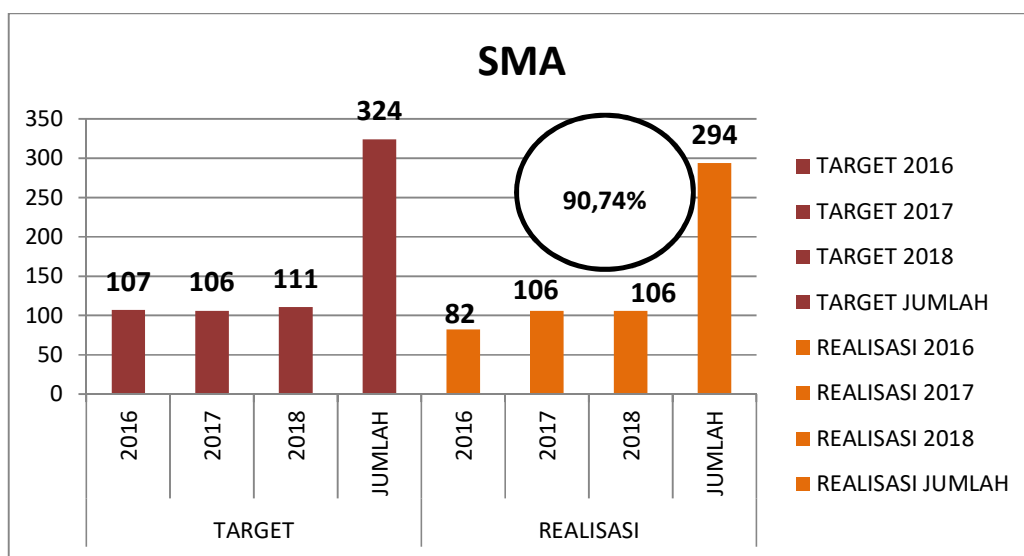


Gambar 3.22 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMP dari Tahun 2016 s.d 2018

13. Sub indikator persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP. Target SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dari tahun 2016 s.d 2018 sebanyak 324 Sekolah dan yang terealisasi sebanyak 294 sekolah (90,74%). Pelaksana Program Kurikulum 2013 jenjang SMP dari Tahun 2016 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.12 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMA Hingga Tahun 2018

	TARGET				REALISASI				
	2016	2017	2018	JUMLAH	2016	2017	2018	JUMLAH	%
SMA	107	106	111	324	82	106	106	294	90.74



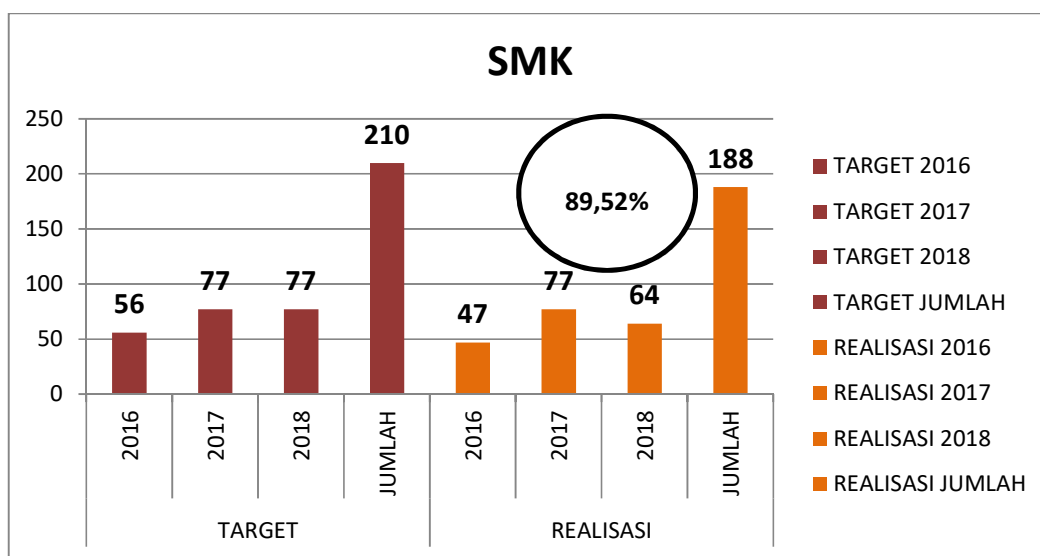
Gambar 3.23 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMA dari Tahun 2016 s.d 2018

Gambar 3.23 menunjukkan sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013 dari tahun 2016 sampai 2018 jenjang SMA.

14. Sub indikator persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP. Target jenjang SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebanyak 210 Sekolah yang terealisasi sebanyak 188 Sekolah (89,52%). Pelaksana Program Kurikulum 2013 jenjang SMP dari Tahun 2016 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMK Hingga Tahun 2018

	TARGET				REALISASI				
	2016	2017	2018	JUMLAH	2016	2017	2018	JUMLAH	%
SMK	56	77	77	210	47	77	64	188	89.52



Gambar 3.24 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Jenjang SMA dari Tahun 2016 s.d 2018

Gambar 3.24 memperlihatkan bahwa pada jenjang SMK yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 sebanyak 90,87% sekolah, sehingga masih ada 9,13% sekolah yang belum melaksanakan Kurikulum 2013, karena guru pada sekolah tersebut belum mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh PPPPTK pada tahun 2018.

Keseluruhan pelaksanaan kurikulum 2013 dari tahun 2016 hingga tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Pelaksana Program Kurikulum 2013 Per Jenjang Tahun 2016 s.d Tahun 2018

	TARGET				REALISASI				
	2016	2017	2018	JUMLAH	2016	2017	2018	JUMLAH	%
SD	1.030	1.594	1.578	4.202	982	1.594	1.543	4.119	98.02
SMP	258	302	287	847	251	302	275	828	97.76
SMA	107	106	111	324	82	106	106	294	90.74
SMK	56	77	77	210	47	77	64	188	89.52
JUMLAH	1.451	2.079	2.053	5.583	1.362	2.079	1.988	5.429	97.24

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja LPMP Sumatera Barat tahun 2018 didukung oleh beberapa kegiatan berikut:



1. Satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di Provinsi Sumatera Barat

Indikator kinerja Satuan Pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di Provinsi Sumatera Barat, capaian realisasinya didukung oleh kegiatan, yaitu:

1. Sosialisasi penjaminan mutu pendidikan

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan penjaminan mutu pendidikan kepada pejabat dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota serta membentuk tim penjaminan mutu pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota. Hasil kegiatan ini adalah terinformasikannya program-program penjaminan mutu pendidikan di Sumatera Barat, terbentuknya koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan SPMP Dasar dan Menengah tahun 2018 serta adanya evaluasi pelaksanaan PMP tahun 2017 serta terbentuknya draft SK tim penjaminan mutu pendidikan di provinsi dan kabupaten/kota.

2. Bimtek fasilitator daerah pengumpulan data

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon fasilitator daerah agar mampu melatih pengawas sekolah yang akan melakukan pengumpulan data mutu sekolah. Dari kegiatan ini diharapkan, 1). Peserta dapat memahami dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengumpulan data mutu satuan pendidikan, 2). Peserta dapat memahami dan menjelaskan isi instrumen pengumpulan data mutu satuan

pendidikan, 3). Peserta dapat menjelaskan dan mengoperasikan aplikasi pengumpulan data mutu satuan pendidikan dan 4). Peserta dapat berperan sebagai fasilitator dalam penyiapan pengawas sekolah sebagai koordinator dalam pelaksanaan pengumpulan data mutu pendidikan pada satuan pendidikan.

3. Bimbingan teknis pengawas

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempersiapkan pengawas agar mampu memandu, memverifikasi dan memvalidasi proses pengumpulan data di sekolah, sehingga akuntabilitas pengumpulan dan kredibilitas data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di sekolah terjamin. Dari kegiatan ini diharapkan, 1). Peserta mampu memahami dan menjelaskan isi instrumen pemetaan, 2). peserta mampu memahami mekanisme pelaksanaan pemetaan, 3). Peserta mampu berperan sebagai koordinator pengumpulan data pada sekolah-sekolah yang menjadi tanggungjawabnya, serta 4). Peserta mampu memverifikasi dan memvalidasi data mutu sekolah.

4. Pelaksanaan pengumpulan data

Kegiatan ini bertujuan agar dilaksanakannya pembinaan oleh pengawas kepada satuan pendidikan untuk mendapatkan data mutu satuan pendidikan di kabupaten/kota. Dari kegiatan ini diharapkan dapat terkumpul data pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan kabupaten/kota yang valid dan *update*.

5. Verifikasi dan validasi

Kegiatan ini bertujuan yaitu, 1). Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan mekanisme pengumpulan data mutu sekolah, 2). Untuk mengetahui efektifitas pelibatan fungsi kepengawasan dalam pelaksanaan pengumpulan data mutu yang valid di sekolah, 3). Untuk melihat efektifitas instrument dalam menangkap kondisi

mutu sekolah, 4). Untuk melihat efektifitas aplikasi dalam memudahkan pengumpulan data mutu sekolah, serta 5). Untuk mengetahui akselerasi penggunaan aplikasi pengumpulan data oleh operator sekolah. Dari kegiatan ini diharapkan adanya data tentang efektivitas pelaksanaan pengumpulan data mutu di satuan pendidikan dan kendala-kendala yang terjadi selama proses pengumpulan data beserta solusi yang dilakukan, sehingga data mutu pendidikan yang terkirim meningkat jumlahnya.

6. Penyusunan peta mutu dan pengelolaan data mutu

Kegiatan ini bertujuan untuk mengolah hasil pengumpulan data mutu pendidikan per sub indikator. Hasil kegiatan ini adalah 1). Diperolehnya informasi rapor mutu tahun 2018 (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/v2/index.php) dan rapor mutu Kabupaten/Kota/Provinsi jenjang SD, SMP, SMA dan SMK, 2). Teridentifikasinya pernyataan dalam instrumen PMP untuk masing-masing sub indikator, 3). Diperolehnya data sekolah yang sudah terolah rapor mutunya untuk Kabupaten/Kota/Provinsi, 4) Adanya tabel dan grafik untuk masing-masing standar per jenjang untuk Kabupaten/Kota/ Provinsi.

7. Analisis data mutu

Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis data hasil penyusunan peta dan pengolahan data mutu pendidikan per sub indikator. Hasil kegiatan ini berupa 1). Adanya analisis rapor mutu untuk 5 standar (SKL, ISI, Proses, Penilaian dan Pengelolaan) (nilai capaian, deskripsi, kondisi riil, kekuatan, kelemahan, akar masalah, akibat dan alternatif solusi) pada sub indikator, 2). Adanya laporan analisis untuk masing-masing tabel pada setiap standar dan indikator pada jenjang SD, SMP Kabupaten/Kota dan SMA, SMK Provinsi (deskripsi). yang diharapkan

berupa analisis data mutu pendidikan per sub indikator untuk provinsi dan kabupaten/kota per jenjang.

8. Penyusunan rekomendasi peningkatan mutu

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi peningkatan mutu yang dilihat dari hasil analisis data mutu di satuan pendidikan. Hasil kegiatan ini berupa: 1). Diperolehnya rekomendasi untuk 5 standar (SKL, ISI, Proses, Penilaian dan Pengelolaan) pada sub indikator, 2). Diperolehnya program dan kegiatan untuk 5 standar (SKL, ISI, Proses, Penilaian dan Pengelolaan) pada sub indikator, 3). Adanya laporan peta mutu untuk setiap Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai dengan wilayahnya diharapkan tersusunnya rekomendasi untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil analisis data mutu pendidikan.

9. Diseminasi pemetaan mutu

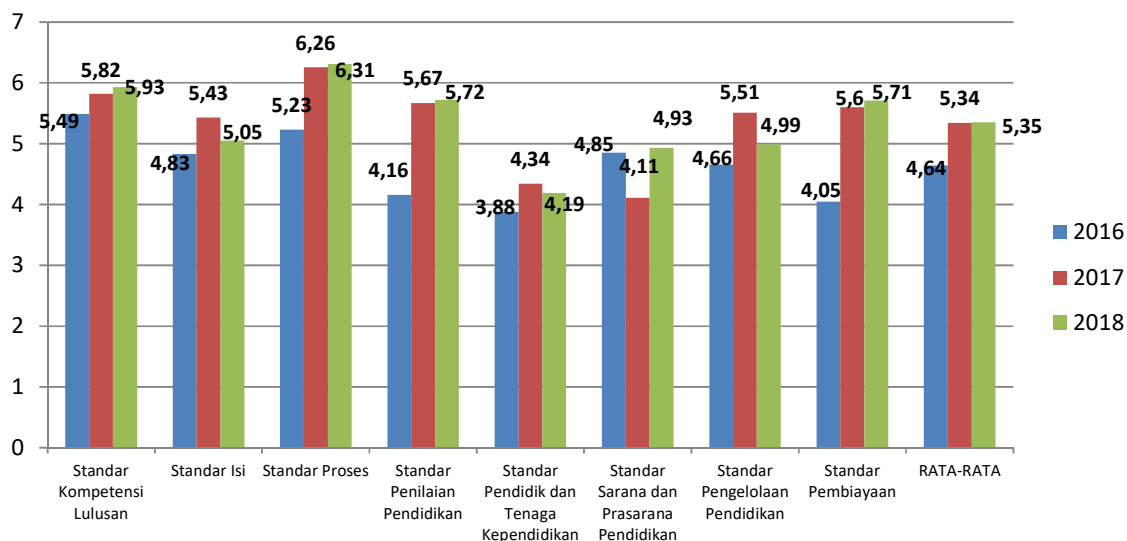
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan hasil pemetaan mutu pendidikan kepada *stakeholder*, sehingga kelemahan dan kekurangan penyelenggaraan pendidikan dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Hasil kegiatan ini berupa: 1). Diperolehnya informasi tentang pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tahun 2018, 2). Diperolehnya informasi tentang pemanfaatan peta/rapor mutu dalam penguatan perencanaan di tingkat sekolah dan wilayah, 3). Diperolehnya informasi tentang tahapan analisis rapor mutu, 4). Terinformasikan nya hasil analisis peta mutu pendidikan dan penyusunan program/kegiatan, 5). Refleksi peran TPMPD tahun 2018 dan solusi ke depan, dan 6). Jadwal program

tindak lanjut kegiatan desiminasi pemetaan mutu pendidikan oleh dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Seluruh kegiatan diatas sudah selesai dilaksanakan selama kurun waktu 2018. Adapun secara keseluruhan dapat dirangkum persentase ketercapaian dari satuan pendidikan yang terpetakan mutu pendidikannya di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebesar 5.543 sekolah dari 5.499 sekolah (99,16%) yang menjadi target pemetaan mutu pendidikannya. Hasil pengiriman data pemetaan mutu pendidikan dapat dilihat pada website pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id. Sekolah yang terpetakan mutu pendidikan sebesar 5.453 adalah jumlah sekolah yang telah mengirim data mutu pendidikan melalui aplikasi PMP pada batas waktu yang sudah ditetapkan, sedangkan sekolah yang belum terkirim data mutunya sebanyak 46 sekolah. Berikut gambaran Nilai capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Provinsi Sumatera Barat:

Tabel 3.15 Nilai Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s.d 2018

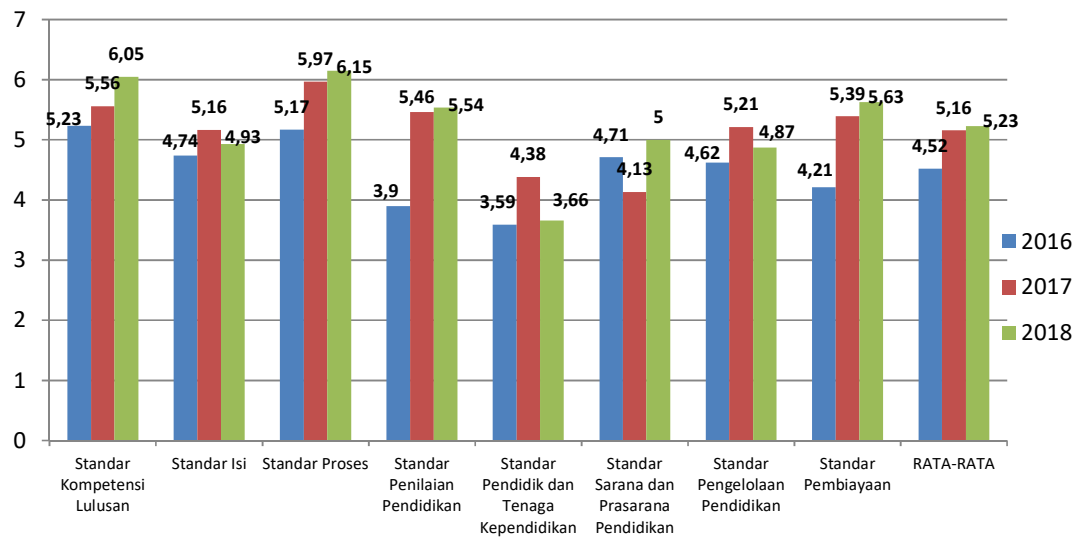
No	Standar	2016	2017	2018
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.49	5.82	5.93
2.	Standar Isi	4.83	5.43	5.05
3.	Standar Proses	5.23	6.26	6.31
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.16	5.67	5.72
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.88	4.34	4.19
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.85	4.11	4.93
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.66	5.51	4.99
8.	Standar Pembiayaan	4.05	5.6	5.71
RATA-RATA		4.64	5.34	5.35



Gambar 3.25 Nilai Capaian SNP Jenjang SD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s.d 2018

Tabel 3.16 Nilai Capaian SNP Jenjang SMP Tahun 2016 s.d Tahun 2018

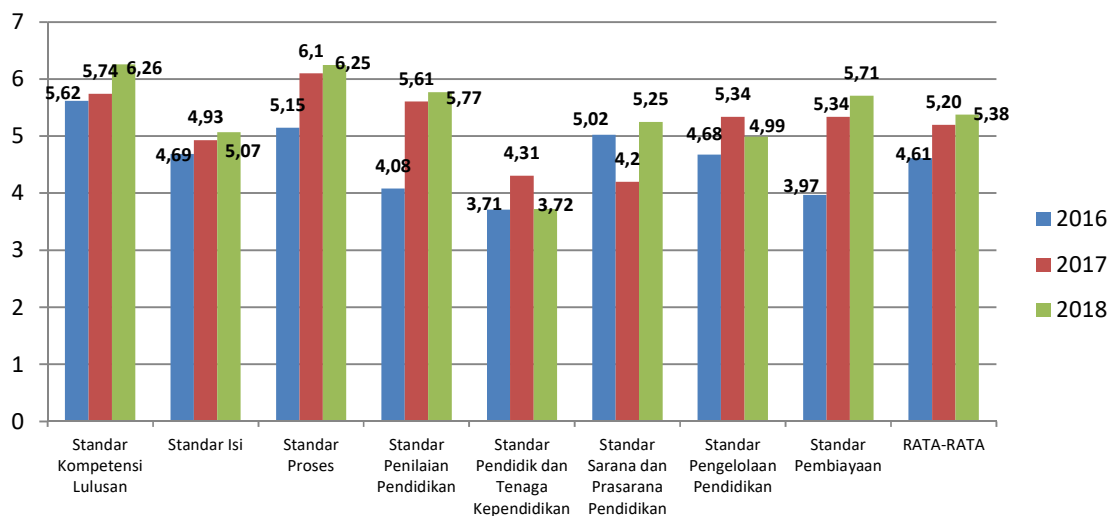
No	Standar	2016	2017	2018
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.23	5.56	6.05
2.	Standar Isi	4.74	5.16	4.93
3.	Standar Proses	5.17	5.97	6.15
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.9	5.46	5.54
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.59	4.38	3.66
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4.71	4.13	5
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.62	5.21	4.87
8.	Standar Pembiayaan	4.21	5.39	5.63
RATA-RATA		4.52	5.16	5.23



Gambar 3.26 Nilai Capaian SNP Jenjang SMP Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s.d 2018

Tabel 3.17 Nilai Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018

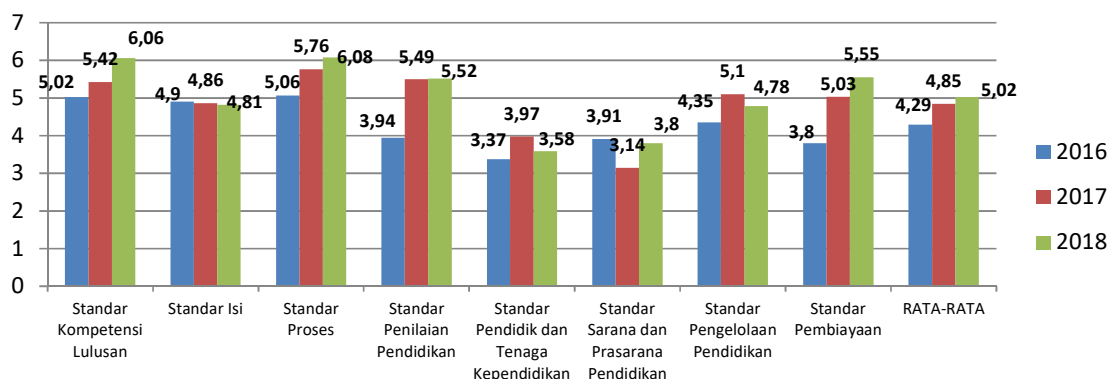
No	Standar	2016	2017	2018
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.62	5.74	6.26
2.	Standar Isi	4.69	4.93	5.07
3.	Standar Proses	5.15	6.10	6.25
4.	Standar Penilaian Pendidikan	4.08	5.61	5.77
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.71	4.31	3.72
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	5.02	4.20	5.25
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.68	5.34	4.99
8.	Standar Pembiayaan	3.97	5.34	5.71
RATA-RATA		4.62	5.20	5.38



Gambar 3.27 Nilai Capaian SNP Jenjang SMA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018

Tabel 3.18 Nilai Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 s.d 2018

No	Standar	2016	2017	2018
1.	Standar Kompetensi Lulusan	5.02	5.42	6.06
2.	Standar Isi	4.90	4.86	4.81
3.	Standar Proses	5.06	5.76	6.08
4.	Standar Penilaian Pendidikan	3.94	5.49	5.52
5.	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.37	3.97	3.58
6.	Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	3.91	3.14	3.8
7.	Standar Pengelolaan Pendidikan	4.35	5.1	4.78
8.	Standar Pembiayaan	3.8	5.03	5.55
RATA-RATA		4.29	4.85	5.02



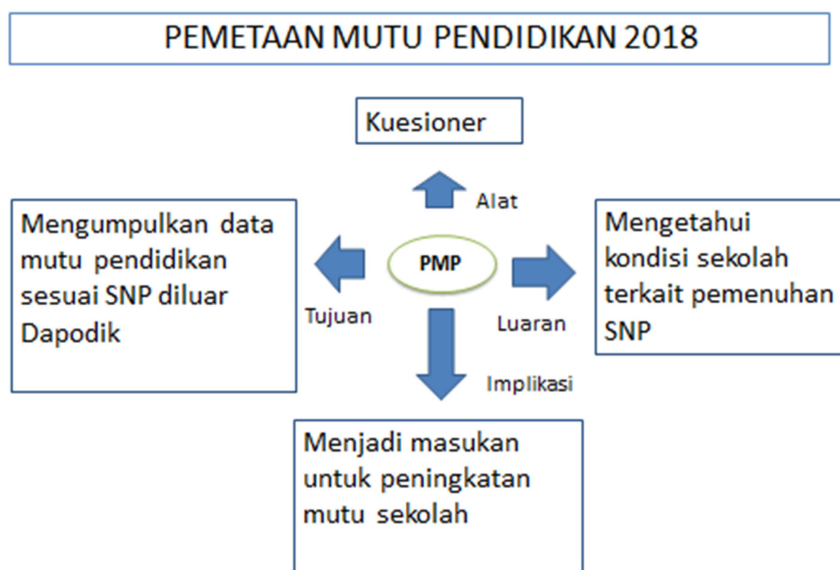
Gambar 3.28 Nilai Capaian SNP Jenjang SMK Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s.d 2018

Jumlah sekolah Provinsi Sumatera Barat per jenjang pada masing-masing Kabupaten/Kota beserta pengiriman data mutu sekolah tahun 2018.

Tabel 3.19 Jumlah Sekolah dan Pengiriman Data Mutu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

NO.	KAB.KOTA	%	TOT SKLH	KRM	SISA	SD			SMP			SMA			SMK		
						JML	KRM	SISA	JML	KRM	SISA	JML	KRM	SISA	JML	KRM	SISA
1	Kota Sawahlunto	100%	77	77	0	59	59	0	11	11	0	4	4	0	3	3	0
2	Kota Solok	100%	62	62	0	44	44	0	7	7	0	6	6	0	5	5	0
3	Kota Padang Panjang	100%	62	62	0	38	38	0	13	13	0	7	7	0	4	4	0
4	Kab. Pasaman	99.67%	307	306	1	245	245	0	38	38	0	15	15	0	9	8	1
5	Kota Padang	99.67%	600	598	2	408	408	0	97	96	1	54	54	0	41	40	1
6	Kab. Sijunjung	99.65%	283	282	1	208	208	0	51	50	1	14	14	0	10	10	0
7	Kab. Lima Puluh Koto	99.55%	446	444	2	369	368	1	53	53	0	16	16	0	8	7	1
8	Kab. Solok Selatan	99.50%	201	200	1	146	145	1	38	38	0	11	11	0	6	6	0
9	Kab. Tanah Datar	99.48%	387	385	2	305	304	1	55	54	1	19	19	0	8	8	0
10	Kab. Padang Pariaman	99.41%	509	506	3	408	408	0	60	60	0	25	24	1	16	14	2
11	Kab. Pesisir Selatan	99.21%	505	501	4	390	387	3	76	75	1	23	23	0	16	16	0
12	Kab. Pasaman Barat	99.18%	368	365	3	263	263	0	64	63	1	24	22	2	17	17	0
13	Kota Payakumbuh	99.13%	115	114	1	77	77	0	18	17	1	11	11	0	9	9	0
14	Kab. Solok	99.12%	456	452	4	351	349	2	70	68	2	22	22	0	13	13	0
15	Kab. Dharmasraya	99.06%	212	210	2	153	152	1	36	36	0	16	15	1	7	7	0
16	Kota Bukittinggi	98.95%	95	94	1	59	59	0	13	13	0	11	11	0	12	11	1
17	Kab. Agam	98.91%	550	544	6	448	443	5	62	62	0	26	26	0	14	13	1
18	Kota Pariaman	98.06%	103	101	2	75	75	0	12	11	1	7	7	0	9	8	1
19	Kab. Kep. Mentawai	93.17%	161	150	11	117	109	8	28	25	3	13	13	0	3	3	0
TOTAL		99.16%	5.499	5.45	46	4.2	4.14	22	802	790	12	324	320	4	210	202	8

Alur pemetaan mutu pendidikan dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 3.29 Alur Pemetaan Mutu Pendidikan

Gambar 3.29 menunjukkan bahwa kegiatan pemetaan mutu dimulai dengan adanya instrumen yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya instrumen yang sudah diisi oleh responden dimasukkan pada aplikasi PMP baru dikirim ke server pusat. Tujuan pemetaan mutu pendidikan untuk mengumpulkan data mutu pendidikan sesuai SNP diluar Dapodik. Luaran dari hasil pemetaan mutu pendidikan adalah untuk mengetahui kondisi sekolah terkait pemenuhan SNP, selanjutnya sekolah melakukan analisis rapor mutu untuk menjadi masukan didalam peningkatan mutu sekolah dimasa yang akan datang.

Contoh hasil analisis rapor mutu tahun 2018 yang sudah dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Hasil Analisis Rapor Mutu Tahun 2018

HASIL ANALISIS DATA MUTU									
NO	Standar/ Indikator/ Sub Indikator	Capaian	Deskripsi (SNP)	Kondisi Saat Ini	Kekuatan	Kelemahan	Akibat	Akar Masalah	Alternatif solusi
7	Standar Pengelolaan Pendidikan								
7.1.	Sekolah melakukan perencanaan pengelolaan								
7.1.1.	Memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas sesuai ketentuan	IV	Sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah Visi mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan Misi menjadi dasar program pokok sekolah dengan menekankan pada kualitas layanan siswa dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah Tujuan mengacu pada visi, misi, tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan Pemerintah serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan, serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional, diputuskan dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah dan pihak-pihak pemangku kepentingan, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan.	Sekolah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah Visi mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan Misi menjadi dasar program pokok sekolah dengan menekankan pada kualitas layanan siswa dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah Tujuan mengacu pada visi, misi, tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan Pemerintah serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan, serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional, diputuskan dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah dan pihak-pihak pemangku kepentingan, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan.	Sebagian besar Sekolah sudah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah Visi mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan kekuatan pada warga sekolah dan segenap pihak yang berkepentingan Misi menjadi dasar program pokok sekolah dengan menekankan pada kualitas layanan siswa dan mutu lulusan yang diharapkan oleh sekolah Tujuan mengacu pada visi, misi, tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan yang sudah ditetapkan oleh sekolah dan Pemerintah serta relevan dengan kebutuhan masyarakat, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari warga sekolah, komite sekolah, dan pihak-pihak pemangku kepentingan, serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional, diputuskan dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah, ditetapkan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah dan pihak-pihak pemangku kepentingan, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan pendidikan.	Sebagian kecil sekolah belum sepenuhnya dalam menyusun program sekolah yang mengacu pada visi, misi dan tujuan sekolah	Pengelolaan sekolah tidak mengarah pada pembentukan lulusan yang selaras dengan visi institusi dan visi pendidikan nasional.	Kepala sekolah kurang mampu menjalankan tugas kepemimpinan	1. membimbing kepala sekolah dalam menjalankan tugas kepemimpinan 2. memberikan pelatihan kepemimpinan kepada kepala sekolah

Contoh hasil penyusunan rekomendasi pemetaan mutu pendidikan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.21 Hasil Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu Pendidikan

HASIL PENYUSUNAN REKOMENDASI PENINGKATAN MUTU

NO	Standar/In dikator/ Sub Indikator	Nilai	Cap aian	Deskripsi (SNP)	Kondisi Ril	Kekuata n	Kelemah an	Akar Masalah Penyebab	Akibat	Alternatif solusi	Rekomendasi	Program	Kegiatan
2	Standar Isi	4,80	SNP 3										
2.1	Perangkat pembelajaran sesuai rumusan kompetensi lulusan	3,26	SNP 2										
2.1.1	Perangkat pembelajaran memuat karakteristik kompetensi sikap	4,07	SNP 3	Perangkat pembelajaran yang disusun guru sesuai kompetensi sikap spiritual dan sosial yaitu menghayati dan mengamalkan: ajaran agama yang dianut, perilaku jujur, perilaku disiplin, perilaku santun, perilaku peduli, perilaku bertanggung jawab, perilaku percaya diri, perilaku sehat jasmani dan rohani, serta perilaku pembelajar sepanjang hayat. Perangkat pembelajaran meliputi program tahunan, program semester, silabus, RPP, buku yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran, lembar tugas terstruktur dan kegiatan mandiri, handout, alat evaluasi dan buku nilai. Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di KKG/ MGMP tentang penguatan pendidikan karakter siswa pada kompetensi sikap. Rancangan dan hasil penilaian sikap berupa jurnal penilaian, dokumen observasi, penilaian diri, dan penilaian antar teman. Terdapat program kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan kagamaan, kegiatan krida, latihan olah bakat dan latihan olah-minat.	Kurangnya kompetensi guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran, pemahaman guru terkait kompetensi sikap siswa belum menyeluruh, dan Visi, misi dan tujuan sekolah tidak fokus pada pencapaian kompetensi sikap	adanya Pelaksanaan Pengemaran Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di KKG/ MGMP tentang penguatan pendidikan karakter siswa pada kompetensi sikap.	Masih ada sekolah yang belum memiliki perangkat ajar kurang. 2. Visi, misi dan tujuan sekolah tidak fokus pada pencapaian kompetensi sikap 3. Siswa tidak memiliki kompetensi sikap yang ditetapkan.	1. Proses pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler tidak mengarah pada pencapaian kompetensi sikap. 2. Mendorong sekolah untuk merevisi visi, misi dan tujuan sekolah agar fokus pada pencapaian kompetensi sikap melalui perberdayaan pengawas 3. Meningkatkan pelaksanaan penilaian sikap siswa sesuai ketentuan melalui surat edaran.	Dinas Pendidikan perlu melakukan perbaikan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran sesuai kompetensi sikap spiritual dan sosial melalui Bintek	Peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran	Bimtek Peningkatan kompetensi guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang memuat kompetensi sikap spiritual dan sosial		

Kendala dan permasalahan ataupun tantangan didalam pemetaan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Rapor mutu tidak dapat disajikan dengan baik karena penarikan data dapodik tidak maksimal;
2. Rapor mutu selalu terlambat pengolahannya oleh tim satgas sehingga sebagian sekolah yang belum terolah tidak dapat memanfaatkannya;
3. Pengawas satuan pendidikan berharap adanya peningkatan transport untuk melakukan pendampingan dalam pengumpulan data di sekolah yang saat ini dirasakan sangat tidak memadai;
4. Operator sekolah yang menangani pendataan PMP kebanyakan tenaga honorer sehingga perlu adanya bantuan dana untuk memfasilitasi tugas mereka dalam kegiatan pengumpulan data PMP (mengentry dan mengirimkan data PMP ke server pusat);
5. Beberapa sekolah tidak memiliki operator untuk membantu kegiatan pendataan PMP sehingga ada operator yang diminta menangani beberapa sekolah sekaligus (bahkan ada satu operator untuk satu kecamatan);
6. Pada saat pengumpulan data PMP sedang berlangsung aplikasi Dapodik 2019 sudah dirilis sehingga ada beberapa sekolah sudah menginstall aplikasi Dapodik 2019 yang menyebabkan aplikasi PMP 2018.07 tidak dapat terhubung menunggu aplikasi PMP 2018.08 dirilis;
7. Alamat website rapor berubah-ubah setiap tahun sehingga sekolah kesulitan untuk mendownloadnya rapor mutu tahun 2018 (pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/v2/index.php) dengan akun admin LPMP Sumbar, akun dapodik dinas pendidikan, akun dapodik sekolah.



2. Satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP

Indikator kinerja satuan pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu:

1. Verifikasi sekolah model

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan sekolah yang mempunyai komitmen dan konsisten dalam menjalankan program sekolah model. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu adanya data sekolah model yang sudah di verifikasi.

2. Bimbingan teknis fasilitator daerah sekolah model

Tujuan dari kegiatan ini untuk memantapkan pemahaman fasilitator daerah tentang konsep peningkatan mutu pendidikan melalui sistem penjaminan mutu internal, mengoptimalkan pemahaman fasilitator daerah untuk mengimplementasikan program pencapaian SNP. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini yaitu adanya rancangan program SPMI dan dokumen mutu SPMI (panduan, modul, lembar kerja dan format-format dokumen mutu).

3. Bimbingan teknis SPMI

Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman Pengawas satuan pendidikan tentang konsep peningkatan mutu pendidikan melalui sistem penjaminan mutu internal, mengoptimalkan pemahaman pengawas satuan pendidikan untuk mengimplementasikan program pencapaian SNP. Adapun hasil yang diharapkan yaitu adanya rancangan program SPMI dan dokumen mutu SPMI (panduan, modul, lembar kerja, dan format-format dokumen mutu).

4. Pendampingan sekolah model

Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi satuan pendidikan dalam pelaksanaan program sekolah model yang dilakukan oleh pengawas. Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya laporan pendampingan ke sekolah model.

5. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan SPMI di kabupaten/kota, mengevaluasi pelaksanaan SPMI di kabupaten/kota. Adapun hasilnya diharapkan adanya hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI di daerah.

6. Penyaluran bantuan pemerintah bagi sekolah model

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bantuan operasional kepada sekolah model yang ditunjuk sebagai induk klaster dan sekolah imbas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan SPMI di sekolah. Hasil dari kegiatan ini diharapkan sekolah mampu melaksanakan prinsip-prinsip SPMI yang baik yang sesuai dengan apa yang telah diarahkan.

7. Bimbingan teknis Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sistem penjaminan mutu pendidikan dan rangkaian kegiatan penjaminan mutu pendidikan kepada peserta dari dinas kabupaten/kota di Sumatera Barat. Hasil dari kegiatan ini diharapkan peserta paham tentang sistem penjaminan mutu dan rangkaian kegiatan penjaminan mutu pendidikan.

8. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan SPME di kabupaten/kota. Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya laporan hasil pelaksanaan SPME di daerah.

9. Diseminasi hasil sekolah model

Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan hasil kegiatan supervisi mutu/sekolah model kepada *stakeholder*. Hasil dari kegiatan ini diharapkan tersosialisasikannya hasil kegiatan supervisi mutu/sekolah model satuan pendidikan kepada *stakeholder*.

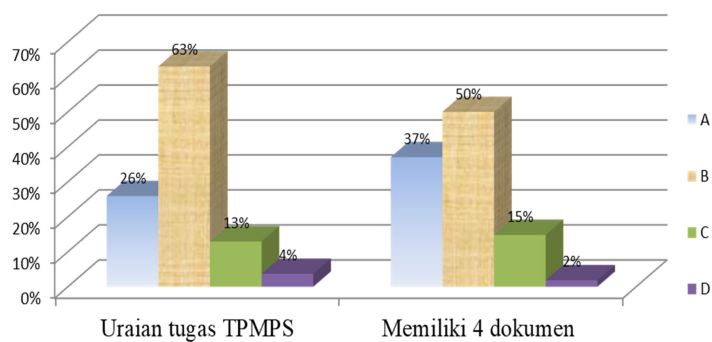
Seluruh kegiatan di atas sudah selesai dilaksanakan, dan secara keseluruhan ketercapaian dari indikator satuan pendidikan yang difasilitasi berdasarkan 8 SNP adalah sebesar 340 dari 344 Sekolah (98,84%).

Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sekolah model yang sudah menerapkan siklus SPMI di sekolah adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS)

Sebelum melakukan siklus SPMI sekolah perlu perencanaan manajemen yang akan memudahkan pelaksanaan siklus SPMI. Salah satu hal yang dilaksanakan adalah pembentukan TPMPS. Gambar di bawah ini menjelaskan bagaimana proses pembentukan TPMPS pada semua jenjang pendidikan.

Jenjang SD

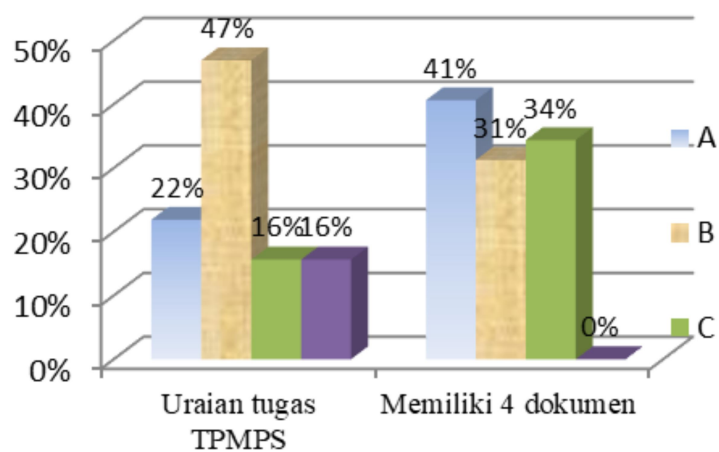


Keterangan:

- A. Sangat Lengkap/ 4 dokumen
- B. Lengkap/ 3 dokumen
- C. Kurang Lengkap/ 2 dokumen
- D. Tidak lengkap/1 dokumen

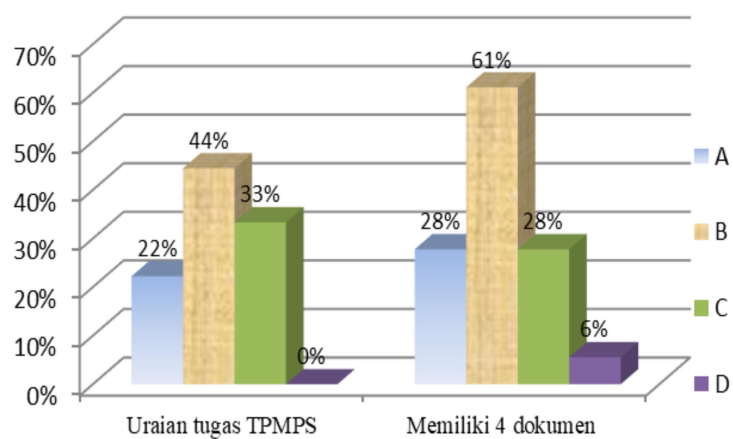
Gambar 3.30 Pembentukan TPMPPS Jenjang SD

Jenjang SMP



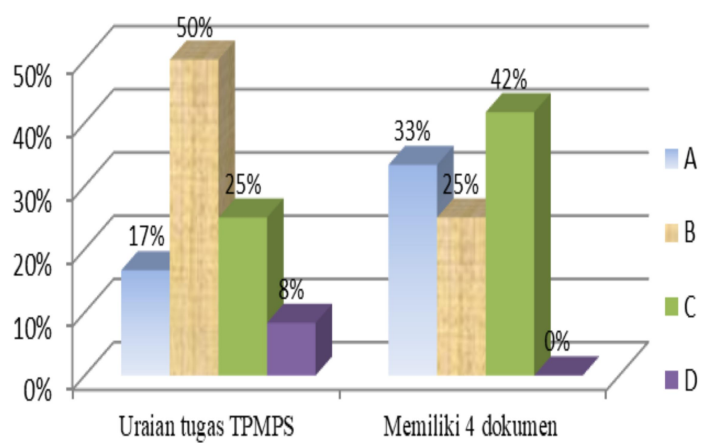
Gambar 3.31 Pembentukan TPMPPS Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.32 Pembentukan TPMPS Jenjang SMA

Jenjang SMK

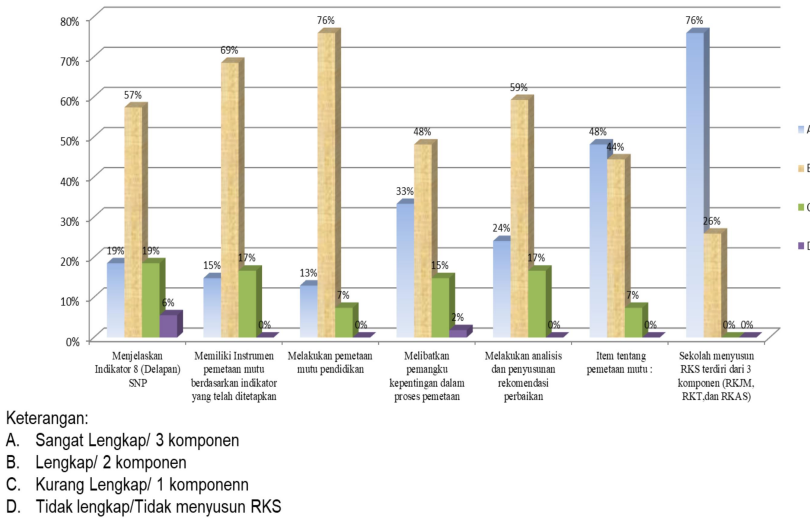


Gambar 3.33 Pembentukan TPMPS Jenjang SMK

2. Hasil Pelaksanaan siklus SPMI

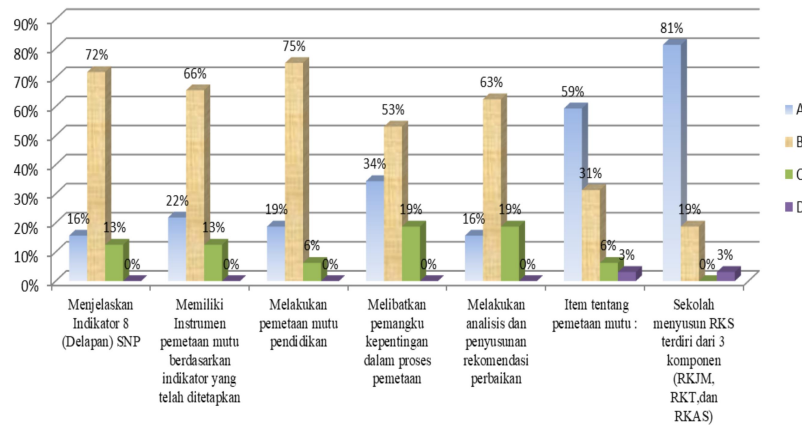
a. Pemetaan Mutu

Jenjang SD



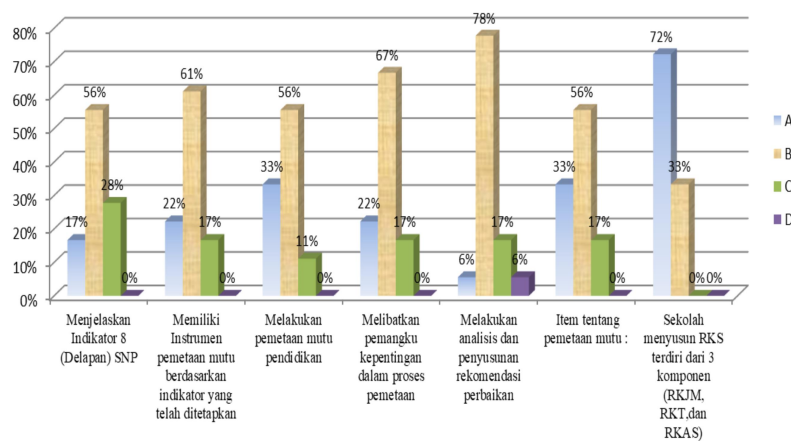
Gambar 3.34 Pemetaan Hasil Pelaksanaan Siklus SPMI Jenjang SD

Jenjang SMP



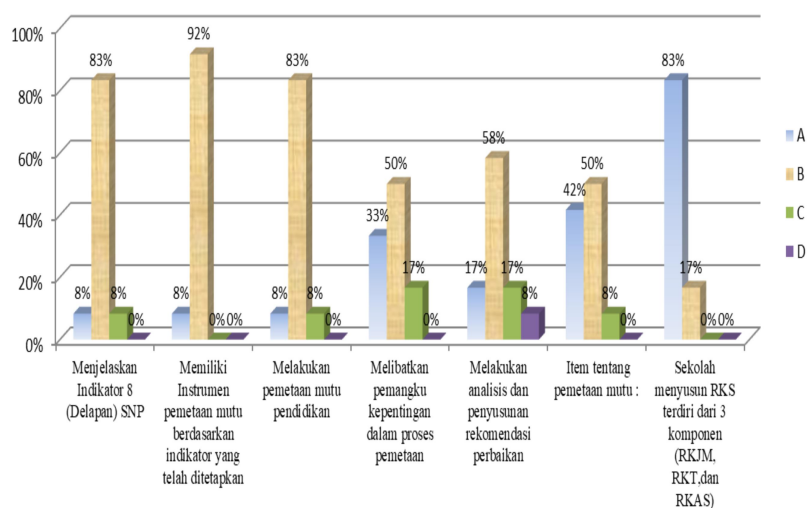
Gambar 3.35 Pemetaan Hasil Pelaksanaan Siklus SPMI Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.36 Pemetaan Hasil Pelaksanaan Siklus SPMI Jenjang SMA

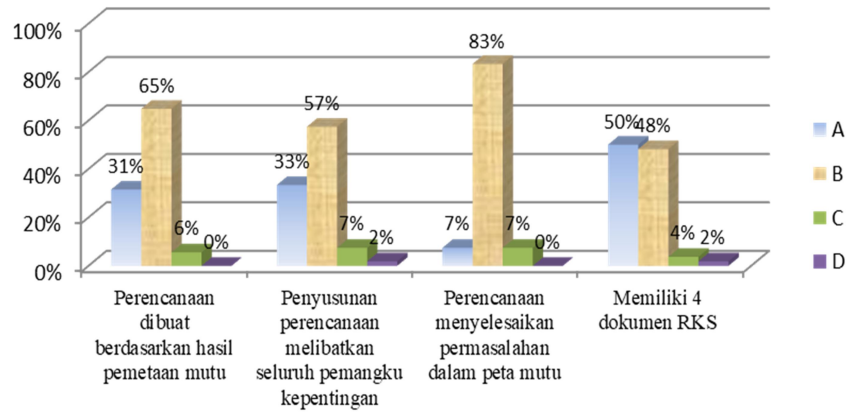
Jenjang SMK



Gambar 3.37 Pemetaan Hasil Pelaksanaan Siklus SPMI Jenjang SMK

b. Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu

Jenjang SD

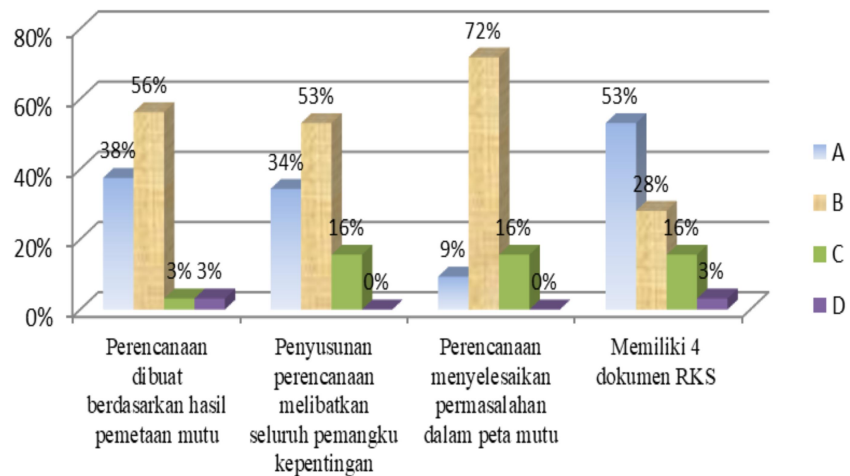


Keterangan:

- A. Seluruh/ 4 dokumen
- B. Sebagian Besar/ 3 dokumen
- C. Sebagian Kecil/ 2 dokumen
- D. belum/ 1 dokumen

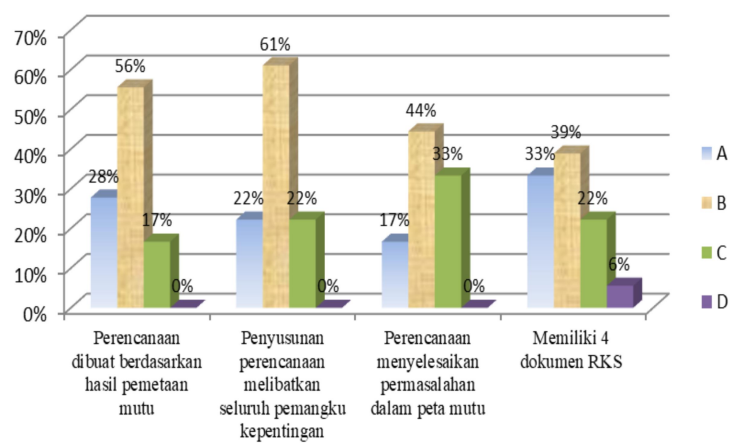
Gambar 3.38 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Jenjang SD

Jenjang SMP



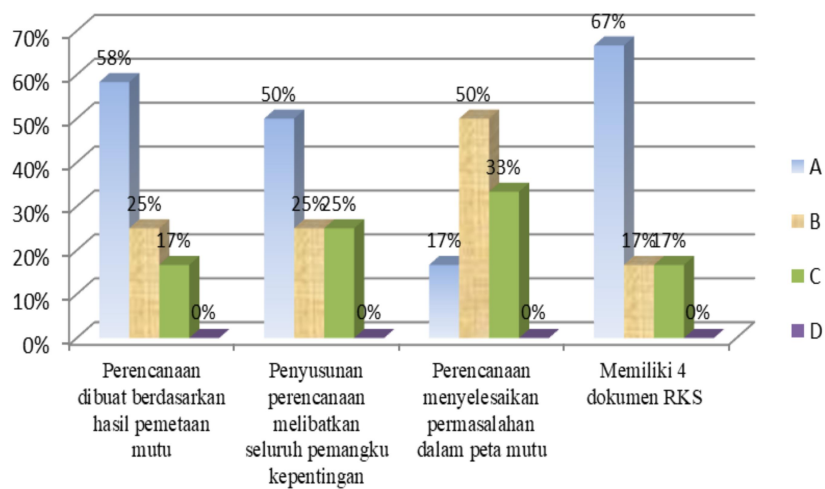
Gambar 3.39 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.40 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Jenjang SMA

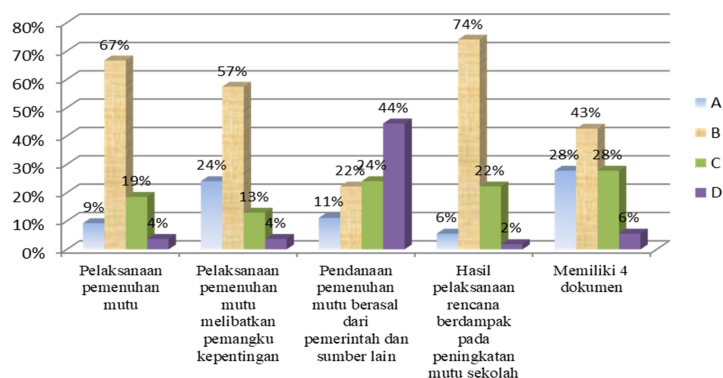
Jenjang SMK



Gambar 3.41 Penyusunan Rencana Pemenuhan Mutu Jenjang SMK

c. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu

Jenjang SD

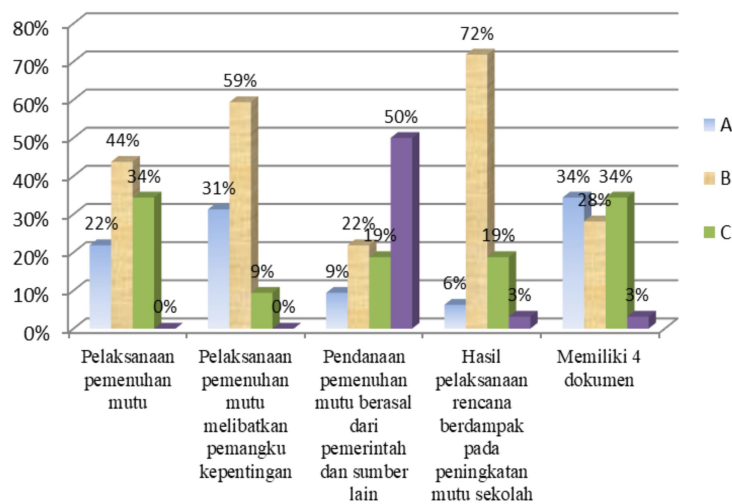


Keterangan:

- A. 95-100%/ 4 dokumen
- B. 80-94%/ 3 dokumen
- C. 60-75%/ 2 dokumen
- D. <60%/ 1 dokumen

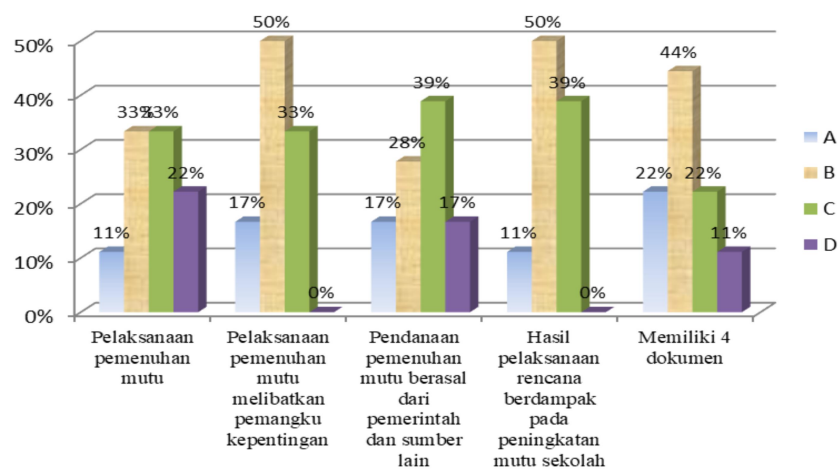
Gambar 3.42 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Jenjang SD

Jenjang SMP



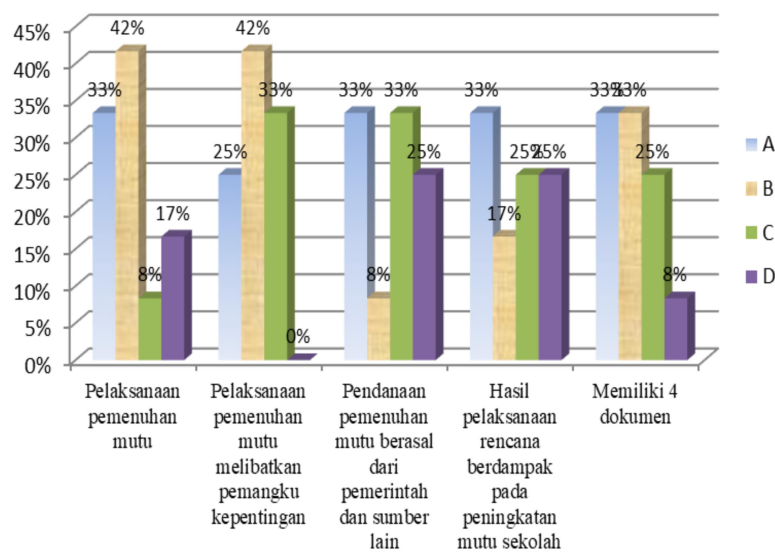
Gambar 3.43 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.44 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Jenjang SMA

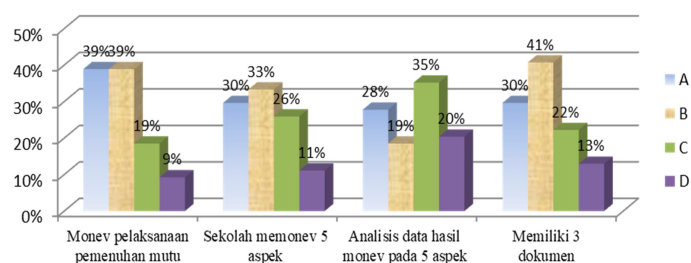
Jenjang SMK



Gambar 3.45 Pelaksanaan Pemenuhan Mutu Jenjang SMK

d. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu

Jenjang SD

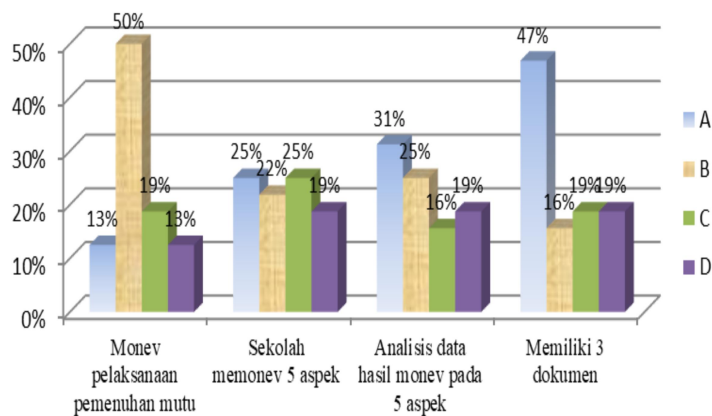


Keterangan:

- A. 5 aspek/ 3 dokumen
- B. 4 aspek/ 2 dokumen
- C. 3 aspek/ 1 dokumen
- D. 2 aspek/ tidak memiliki dokumen

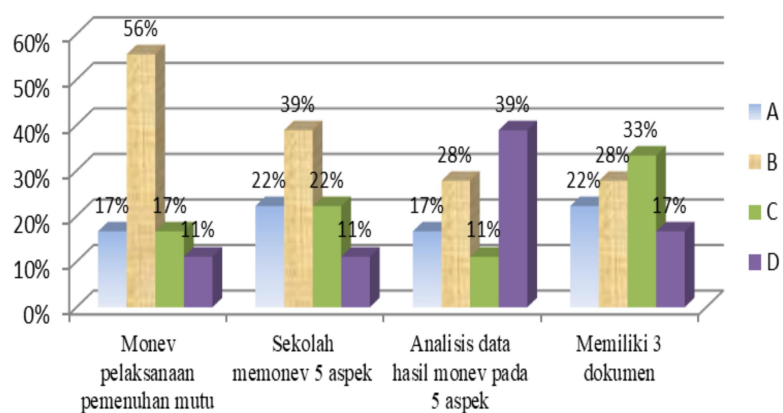
Gambar 3.46 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Jenjang SD

Jenjang SMP



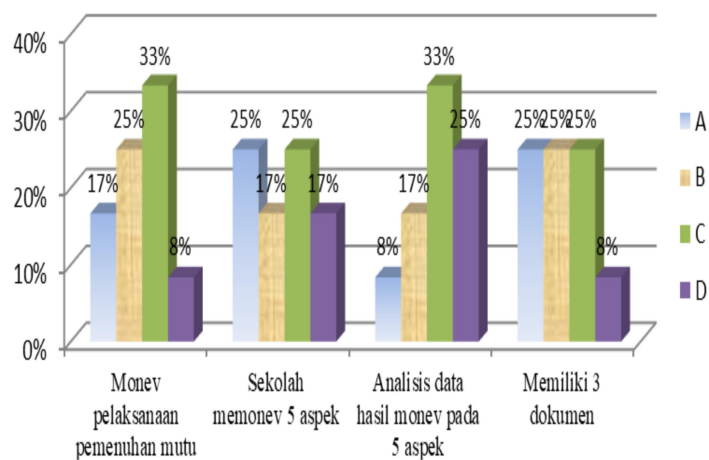
Gambar 3.47 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.48 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Jenjang SMA

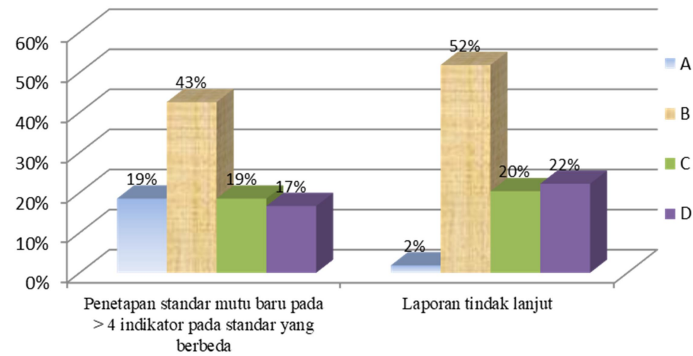
Jenjang SMK



Gambar 3.49 Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Mutu Jenjang SMK

e. Penetapan Mutu Baru

Jenjang SD

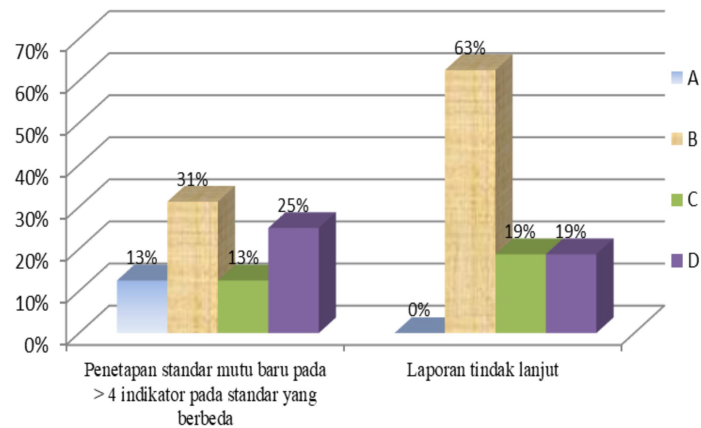


Keterangan:

- A. 4 indikator/ Sangat lengkap
- B. 3 indikator / Lengkap
- C. 2 indikator / Kurang lengkap
- D. 1 indikator / tidak memiliki

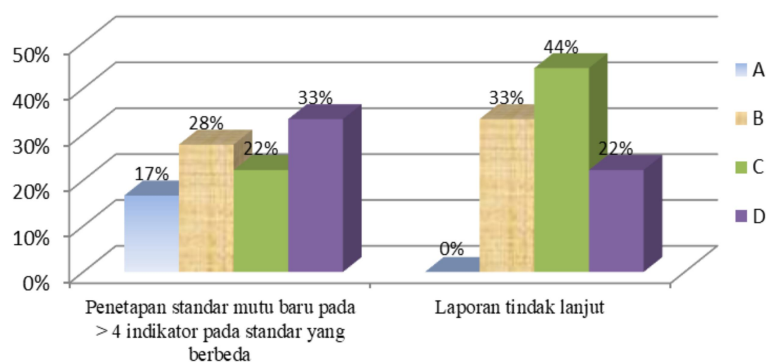
Gambar 3.50 Penetapan Mutu Baru Jenjang SD

Jenjang SMP



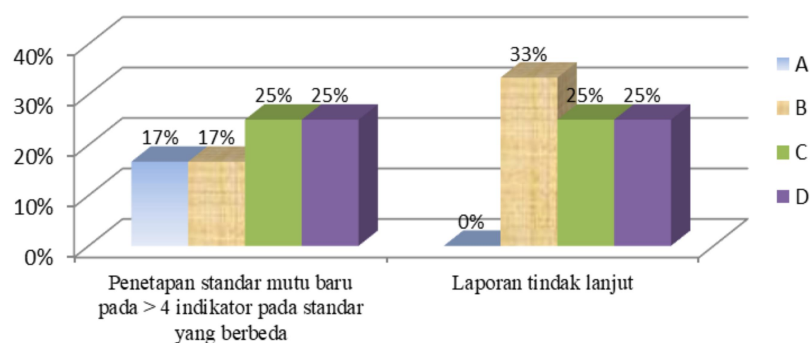
Gambar 3.51 Penetapan Mutu Baru Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.52 Penetapan Mutu Baru Jenjang SMA

Jenjang SMK



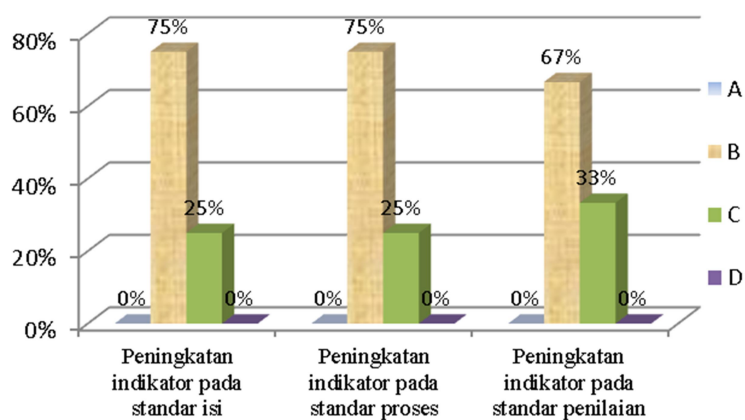
Gambar 3.53 Penetapan Mutu Baru Jenjang SMK

Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sekolah model pada tahun sebelumnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

1. Manajemen Pembelajaran

Hasil evaluasi manajemen pembelajaran pada gambar dibawah menggambarkan peningkatan pada 3 standar yaitu : standar isi, standar proses, standar penilaian.

Jenjang SD

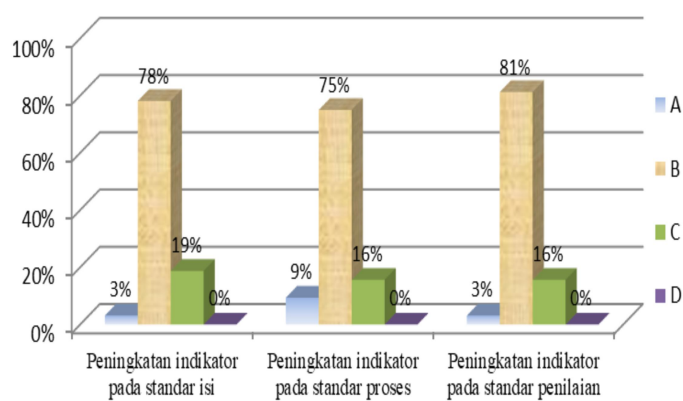


Keterangan:

- A. Seluruh Indikator naik
- B. Sebagian besar indikator naik
- C. Sebagian kecil indikator naik
- D. Tidak ada indikator yang naik

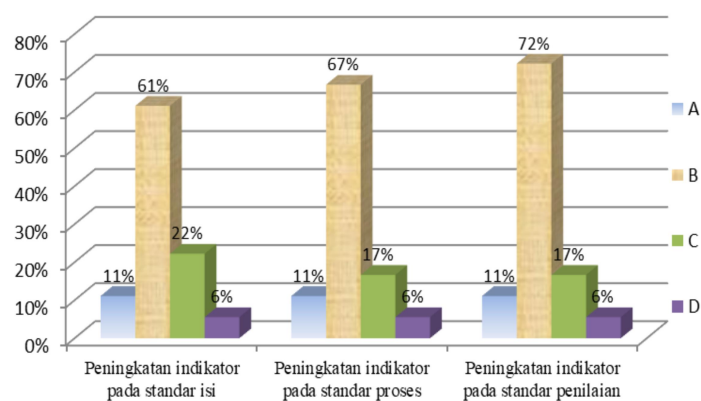
Gambar 3.54 Manajemen Pembelajaran Jenjang SD

Jenjang SMP



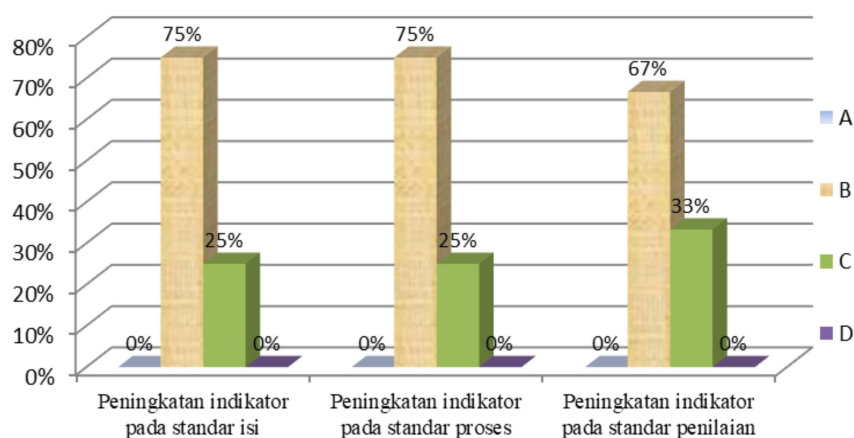
Gambar 3.55 Manajemen Pembelajaran Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.56 Manajemen Pembelajaran Jenjang SMA

Jenjang SMK

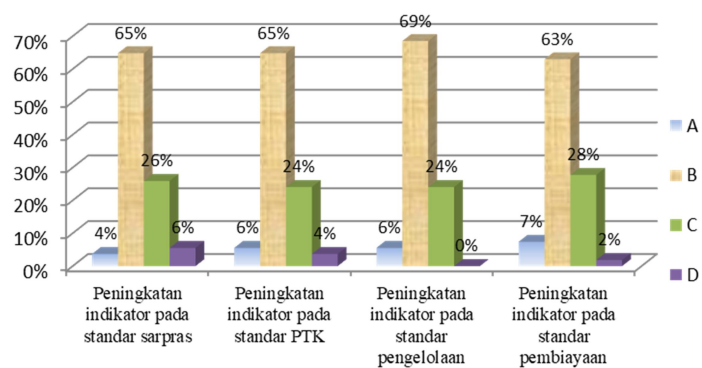


Gambar 3.57 Manajemen Pembelajaran Jenjang SMK

2. Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah pada tabel di bawah menggambarkan peningkatan pada 4 standar yaitu : standar sarpras, standar PTK, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.

Jenjang SD

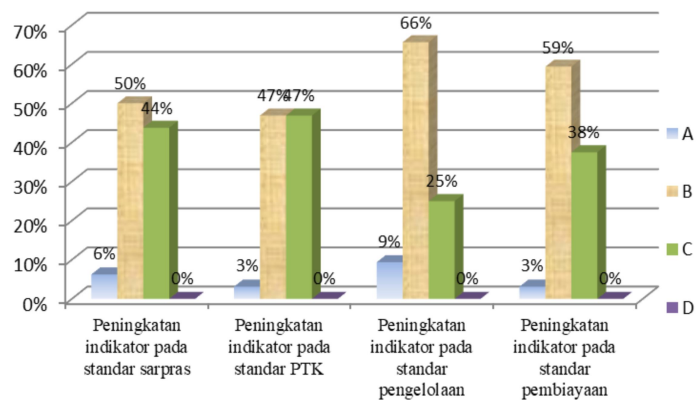


Keterangan:

- A. Seluruh Indikator naik
- B. Sebagian besar indikator naik
- C. Sebagian kecil indikator naik
- D. Tidak ada indikator yang naik

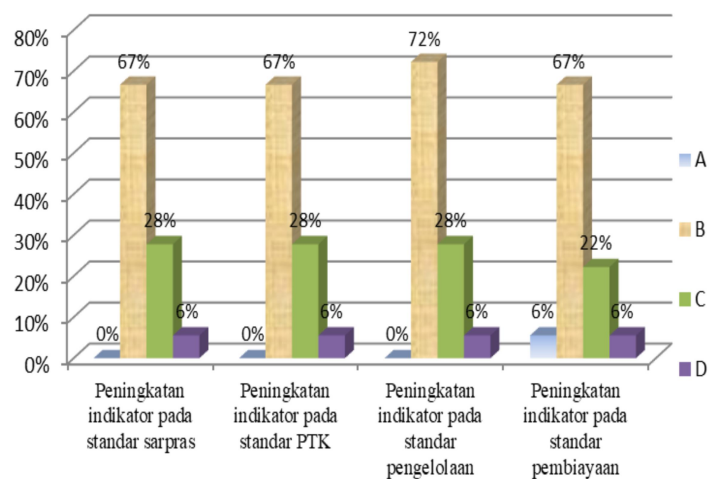
Gambar 3.58 Manajemen Sekolah Jenjang SD

Jenjang SMP



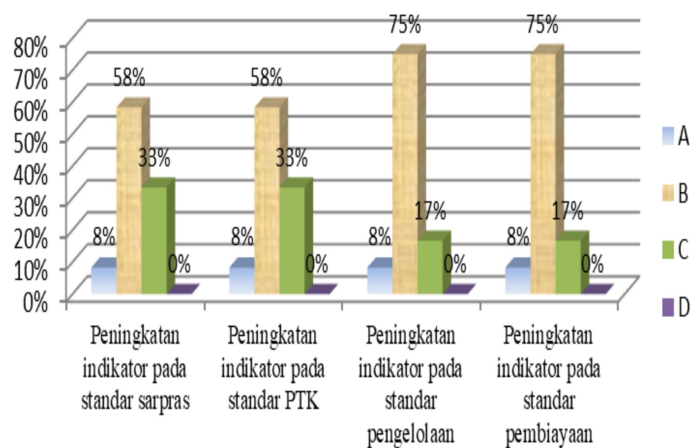
Gambar 3.59 Manajemen Sekolah Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.60 Manajemen Sekolah Jenjang SMA

Jenjang SMK



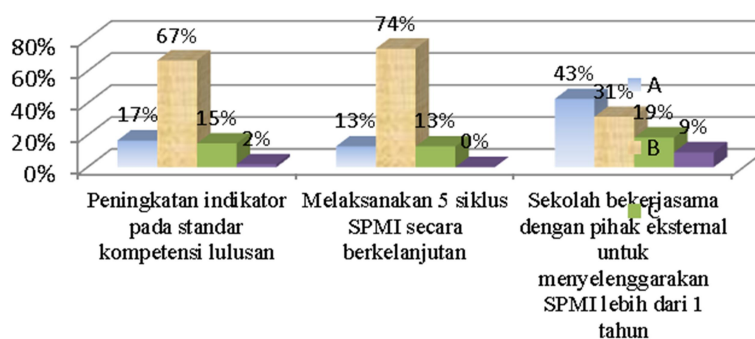
Gambar 3.61 Manajemen Sekolah Jenjang SMK

3. Budaya Mutu

Pada gambar di bawah menggambarkan bagaimana budaya mutu sudah mulai diterapkan di sekolah :

- peningkatan pada standar kompetensi lulusan yang terlihat peningkatan di sebagian besar indikatornya;
- sudah terbangun budaya mutu dengan melakukan SPMI secara berkelanjutan;
- sudah terbangun kerjasama dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan siklus SPMI.

Jenjang SD

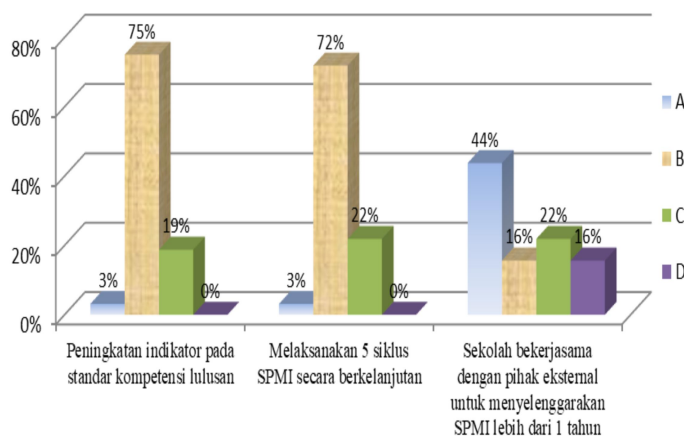


Keterangan:

- Seluruh Indikator naik/ bekerjasama > 1 tahun
- Sebagian besar indikator naik/ bekerjasama < 1 tahun
- Sebagian kecil indikator naik/ mulai menjalin kerjasama
- Tidak ada indikator yang naik/ belum bekerjasama

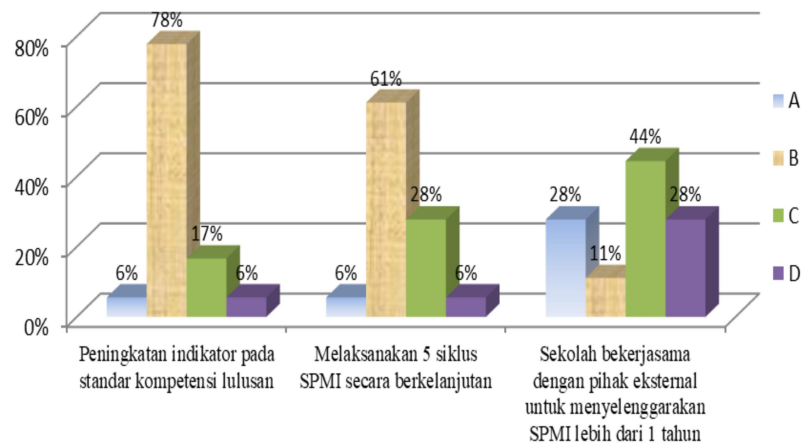
Gambar 3.62 Budaya Mutu Jenjang SD

Jenjang SMP



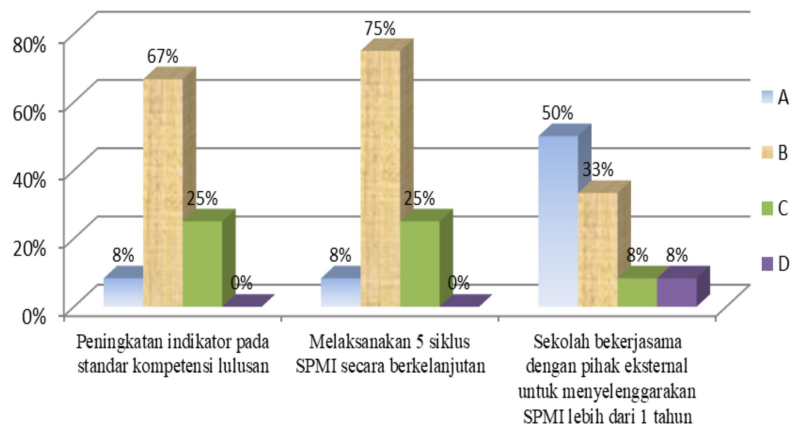
Gambar 3.63 Budaya Mutu Jenjang SMP

Jenjang SMA



Gambar 3.64 Budaya Mutu Jenjang SMA

Jenjang SMK



Gambar 3.65 Budaya Mutu Jenjang SMK

Dampak dari pelaksanaan sekolah model sebagai berikut:

1. Dokumen perangkat pembelajaran dan penilaian sudah lengkap;
2. Kualitas guru mengajar semakin meningkat dengan menggunakan model model pembelajaran;
3. Media pembelajaran yang sudah bervariasi;
4. Pemanfaatan IT dalam pembelajaran;

5. Penerapan literasi;
6. Adanya program pembiasaan seperti gerakan seribu tiap jum'at, bersih-bersih, kultum dan sebagainya.

Kendala dan permasalahan didalam pelaksanaan kegiatan SPMI dan sekolah model yaitu:

1. Masih ada Pengawas Pembina yang belum memahami siklus SPMI secara utuh .
2. Di beberapa klaster terjadi ketidakefektifan pelaksanaan kegiatan dalam Pendampingan karena jarak yang terlalu jauh dari sekolah ke klaster.
3. Keterlambatan kegiatan penyegaran fasnas di pusat sehingga berimbas kepada pelaksanaan sekolah model menjadi singkat.
4. Dana bantah program sekolah model kurang mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan.
5. Masih ada sekolah yang komitmennya masih rendah walaupun dan pembinaan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota yang masih belum optimal.



3. Sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013

Indikator kinerja sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 didukung oleh beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:

1. Bimtek tim pengembang kurikulum 2013

Tujuan dari kegiatan ini adalah terpahaminya konsep kurikulum 2013 oleh tim pengembang Kurikulum atau Instruktur Kurikulum (IK) kabupaten/kota. Hasil yang diharapkan yaitu terlatihnya Tim Pengembang kurikulum (IK Kabupaten/kota) yang akan melatih guru untuk melaksanakan kurikulum di sekolah.

2. Bintek guru sasaran kurikulum 2013

Kegiatan ini bertujuan untuk melatih guru sasaran dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Hasil yang diharapkan yaitu peserta atau guru-guru tersebut siap melaksanakan konsep kurikulum 2013 di sekolah.

3. Asistensi bantuan pendampingan sekolah pelaksana kurikulum 2013

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan bantuan pendampingan sekolah pelaksana kurikulum 2013. Hasilnya adalah tersosialisasikannya bantuan pendampingan sekolah pelaksana kurikulum 2013, sehingga dana yang akan digunakan betul-betul tepat sasaran.

4. Bimtek penyusunan laporan bagi sekolah penerima bantuan pemerintah

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyampaikan petunjuk teknis penggunaan dana dan bantuan pemerintah kurikulum 2013. Hasil yang

diharapkan yaitu tersusunnya proposal kegiatan sesuai dengan juknis yang telah ditentukan.

5. Rakor implementasi kurikulum 2013

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota tentang kegiatan implementasi kurikulum 2013 dan penyaluran dana bantuan pemerintah. Hasilnya adalah lahirnya kesepakatan tentang bentuk kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kab/Kota tentang pelaksanaan kegiatan implementasi kurikulum 2013 untuk seluruh jenjang pendidikan.

6. Monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap bantuan yang diberikan. Hasilnya adalah adanya laporan monitoring sebagai bahan evaluasi terhadap penyaluran dana bantuan pemerintah.

Secara keseluruhan kegiatan tersebut di atas sudah selesai dilaksanakan. Ketercapaian sasaran dari target yang ditetapkan sebanyak 1.988 sekolah dari 2.053 sekolah (96.83%). Uraian berikut tentang penyaluran dana Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan LPMP Sumatera Barat kepada sekolah-sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013 untuk tahun 2018:

Tabel 3.22 Penyaluran Dana Bantuan Pemerintah kepada Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2018

NO.	OUTPUT KEGIATAN	JENJANG	SATUAN	2018		%
				RENCANA	REALISASI	
1	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013	SD	Sekolah	1578	1543	97,78
			Rupiah	6.312.000.000	6.172.000.000	97,78
		SMP	Sekolah	287	275	95,82
			Rupiah	2.296.000.000	2.200.000.000	95,82
		SMA	Sekolah	111	106	95,50
			Rupiah	1.110.000.000	1.060.000.000	95,50
		SMK	Sekolah	77	64	83,12
			Rupiah	770.000.000	640.000.000	83,12
		JUMLAH	Sekolah	2053	1988	96,83
			Rupiah	10.488.000.000	10.072.000.000	96,03

Selain 3 (tiga) indikator kinerja yang telah dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala LPMP Sumatera Barat dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, juga terdapat kegiatan penunjang berupa dukungan manajemen dan tata kelola pelaksanaan tugas penjaminan mutu pendidikan dengan beberapa *output* sebagai berikut:

1. Layanan dukungan manajemen eselon I

Layanan dukungan manajemen ini terdiri dari 7 layanan. Pada umumnya layanan ini adalah berupa workshop dan peningkatan kompetensi pegawai serta konsultasi yang didukung oleh Narasumber dari unit utama (eselon I). secara keseluruhan, ketercapaian *output* ini adalah 85,71% atau 6 dari 7 layanan.

2. Layanan internal

Layanan internal ini terdiri dari 4 layanan, yaitu pengadaan kendaraan bermotor roda empat, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran, serta pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan. Ketercapaian 4 layanan ini secara keseluruhan adalah 100%.

3. Layanan perkantoran

Output ini terdiri dari 12 bulan layanan. Sedangkan komponennya terdiri dari pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. Secara keseluruhan, ketercapaian dari output layanan perkantoran ini adalah 100%.

A. Realisasi Anggaran

Anggaran DIPA LPMP Sumatera Barat pada awal hingga akhir tahun 2018 berjumlah **Rp. 53.147.100.000,-**. Dibanding alokasi anggaran pada akhir tahun 2017 yaitu sebesar **Rp. 64.579.879.000,-**. Kalau dibandingkan alokasi anggaran tahun 2017 dengan tahun 2016, maka ada penurunan angka sebesar Rp. 11.432.779.000,-. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kegiatan kurikulum 2013 yang dilaksanakan oleh PPPPTK serta belanja modal pada pembangunan gedung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.23 Perbandingan Anggaran LPMP Sumatera Barat Menurut Jenis belanja T.A. 2016 dan 2017

Uraian Jenis Belanja	T.A. 2017	T.A. 2018	Selisih	% Selisih Anggaran	Keterangan
BELANJA PEGAWAI	7.267.538.000	12.234.586.000	4.967.048.000	68,35	Naik
BELANJA BARANG	42.150.736.000	32.368.614.000	-9.782.122.000	-23,21	Turun
BELANJA MODAL	15.161.605.000	8.543.900.000	-6.617.705.000	-43,65	Turun
Jumlah	64.579.879.000	53.147.100.000	11.432.779.000	-17,70	Turun

Tabel 3.24 Persentase Anggaran LPMP Sumatera Barat Menurut Jenis belanja T.A. 2018

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	T.A. 2017	% Anggaran
51	BELANJA PEGAWAI	12.234.586.000	23,02
52	BELANJA BARANG	32.368.614.000	60,90
53	BELANJA MODAL	8.543.900.000	16,08
	Jumlah	53.147.100.000	100,00

Pada tabel di atas terlihat bahwa porsi anggaran terbesar ada pada belanja barang untuk pelaksanaan kurikulum 2013 dan penyaluran dana bantuan pemerintah. Tabel berikut ini akan menjelaskan persentase daya serap anggaran LPMP Sumatera Barat.

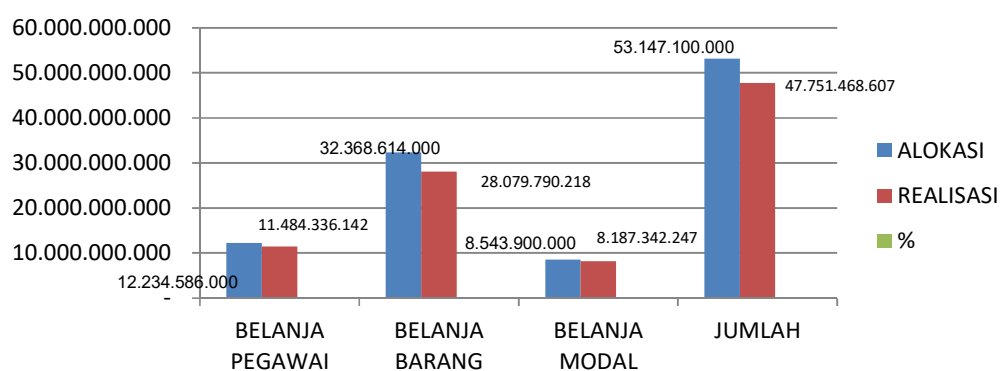
Tabel 3.25 Persentase Daya Serap dari Januari s.d. Desember 2018

Tabel 3.25 Penerimaan Daya Serap dari Jandaan s.d. Desember 2016				
NO	BULAN	DAYA SERAP		
		Keuangan	% Keuangan	% Fisik
Unit Utama: Ditjen Dikdasmen				
Pagu Dana: Rp. 53.147.100.000,-				
1	Januari	1.291.267.994	2,43	1,39
2	Februari	2.576.272.645	4,85	7,54
3	Maret	4.757.588.359	8,95	8,93
4	April	6.336.238.787	11,92	10,32
5	Mei	10.863.813.860	20,44	21,02
6	Juni	13.201.237.333	24,84	24,79
7	Juli	17.487.007.977	32,90	37,51
8	Agustus	28.989.232.245	54,55	67,69
9	September	34.400.485.036	64,73	83,65
10	Oktober	37.372.833.283	70,32	85,05
11	November	40.840.512.906	76,84	90,61
12	Desember	47.751.468.607	89,85	96,76

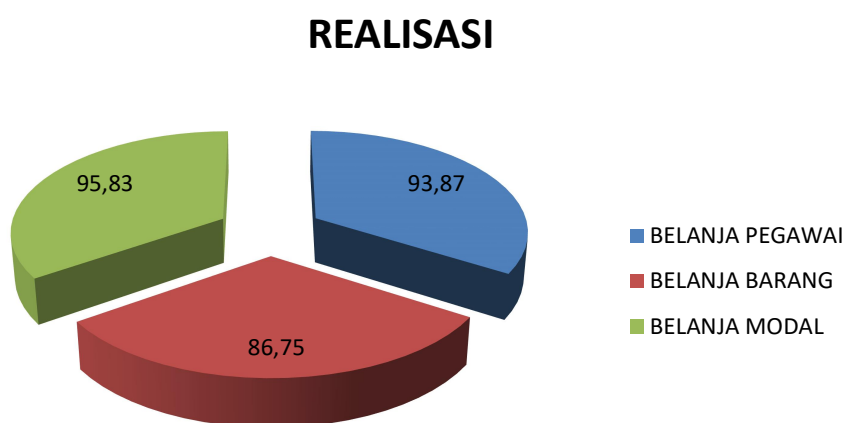
Rekap daya serap anggaran per jenis belanja pada posisi Desember 2018 pelaksanaan anggaran terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.26 Rekap Daya Serap Anggaran Per Jenis belanja

JENIS BELANJA	ALOKASI	REALISASI	%	SISA	%
BELANJA PEGAWAI	12,234,586,000	11,484,336,142	93.87	750,249,858	6.13
BELANJA BARANG	32,368,614,000	28,079,790,218	86.75	4,288,823,782	13.25
BELANJA MODAL	8,543,900,000	8,187,342,247	95.83	356,557,753	4.17
JUMLAH	53,147,100,000	47,751,468,607	89.85	5,395,631,393	10.15



Gambar 3.66 Rekap Daya Serap Anggaran Per Jenis belanja



Gambar 3.67 Persentase Realiasi Daya Serap Anggaran Per Jenis belanja

Beberapa hal yang menyebabkan dana yang tidak terserap antara lain:

1. Pada belanja pegawai:
 - a. Berkurangnya jumlah ASN dikarenakan pensiun dan pindah;
 - b. Revisi RKAKL untuk tunjangan kinerja tidak jadi dicairkan
2. Pada belanja barang:
 - a. Efisiensi belanja barang yang terkait dengan ATK, konsumsi, dan lain-lain;
 - b. Dana bantuan pemerintah yang tidak terserap;
 - c. Perubahan pola kegiatan (semula dianggarkan untuk narasumber pusat, tetapi pada pelaksanaannya tidak ada narasumber pusat
3. Pada belanja modal, yaitu sisa lelang yang tidak bisa dioptimalisasi

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember tahun 2018 adalah sebesar Rp. 47.751.468.607,- atau 89,85%.

Selanjutnya alokasi anggaran unit kerja di lingkungan LPMP Sumatera Barat untuk pagu anggaran LPMP Sumatera Barat dalam DIPA tahun 2018 dibagi dalam 3 (tiga) pos pengeluaran belanja, yaitu: (1) Belanja Pegawai, (2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja Pegawai yaitu pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, seperti gaji dan tunjangan. Pos pengeluaran belanja Barang meliputi belanja operasional, non operasional, jasa dan perjalanan dinas. Pos pengeluaran belanja Modal meliputi kegiatan pengadaan sarana prasarana yang merupakan aset tetap. Secara garis besar, capaian kinerja LPMP Sumatera Barat selama tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.27 Capaian Daya Serap Secara Garis Besar Tahun 2018

NO	ALOKASI	DANA
1	Anggaran	Rp. 53.147.100.000,-
2	Daya Serap Keuangan	89,85 %
3	Daya Serap Fisik	96,76%

Dalam hal akuntabilitas keuangan, terdapat beberapa catatan penting LPMP Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018, yaitu tahun 2018 LPMP Sumatera Barat memiliki DIPA dengan dokumen nomor : SP DIPA-023.03.2.419525/2018 tanggal 07 Desember 2017 dengan pagu sebesar Rp. 53.147.100.000,-. Adapun rincian revisi DIPA yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.28 Riwayat Revisi DIPA LPMP Sumatera Barat Tahun 2018

NO.	REVISI	URAIAN REVISI	KETERANGAN
1	00	DIPA awal dengan pagua anggaran Rp. 53.147.100.000,-	Tanggal 05 Desember 2017
2	01	Revisi ini merupakan revisi DIPA eselon I (Ditjen Dikdasmen) dan secara otomatis semua Satker dibawahnya diikutsertakan	Revisi DJA Tanggal 15 Februari 2018
3	02	Revisi ke-2 ini merupakan revisi buka blokir (halaman IV DIPA), berkenaan dengan belanja modal pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (satu unit) senilai Rp. 482.074.000,- dan lanjutan pembangunan gedung Assesment Centre senilai Rp. 4.219.700.000,- . Termasuk revisi pergeseran rincian pada kegiatan, namun pagu anggaran dan volume per output tidak berubah, hal ini berkenaan dengan kebijakan adanya kegiatan baru (level sub komponen) seperti kegiatan; Pemantauan	Revisi DJA Tanggal 02 Mei 2018

		UN SMP/SMA/SMK, Rapat Evaluasi Pemetaan Mutu, Pendampingan Klaster Sekolah Model oleh LPMP, Penyusun Potret Sekolah Model, Bimtek Tim Pengembang Kurikulum 2013 (Pengawas Sekolah), Reviu Renstra LPMP, Penguatan Tata Kelola Kelembagaan, Pengembangan Kapasitas Pegawai LPMP, dan Peringatan Hardiksan tahun 2018	
4	03	Revisi ke3 ini merupakan revisi pergeseran rincian pada kegiatan, namun pagua nggaran dan volume per output tidak berubah, hal ini berkenaan dengan kebijakan adanya kegiatan baru (level sub komponen) seperti kegitan; Rakornas Penjaminan Mutu Pendidikan tahun 2018. Disamping itu termasuk revisi perubahan rencana penarikan (revisi halaman III DIPA)	Revisi Kanwil DJPB Tanggal 07 Juni 2018
5	04	Revisi ke-4 inimerupakan revisi pergeseran rincian pada kegiatan, namun pagua anggaran dan volume per output tidak berubah, hal ini berkenaan dengan kebijakan adanya kegiatan baru (level sub komponen) dalam hal ini kegiatan; Gala Siswa Indonesia (GSI) SMP tingkat SMP tahun 2018. Disamping itu revisi perubahan rencana penarikan (revisi halaman III DIPA)	Revisi Kanwil DJPB Tanggal 06 September 2018
6	05	Revisi ke-5 ini merupakan revisi pergeseran rincian pada kegiatan, namun pagu anggaran dan volume per output tidak berubah, hal ini berkenaan dengan kebijakan adanya	Revisi Kanwil DJPB Tanggal 27 November 2018

		kegiatan baru (level sub komponen) dalam hal ini kegiatan; Proyek perubahan pemanfaatan peta mutu untuk pembangunan budaya mutu di sekolah. Disamping itu, revisi perubahan rencana penarikan (revisi halaman III DIPA)	
--	--	---	--

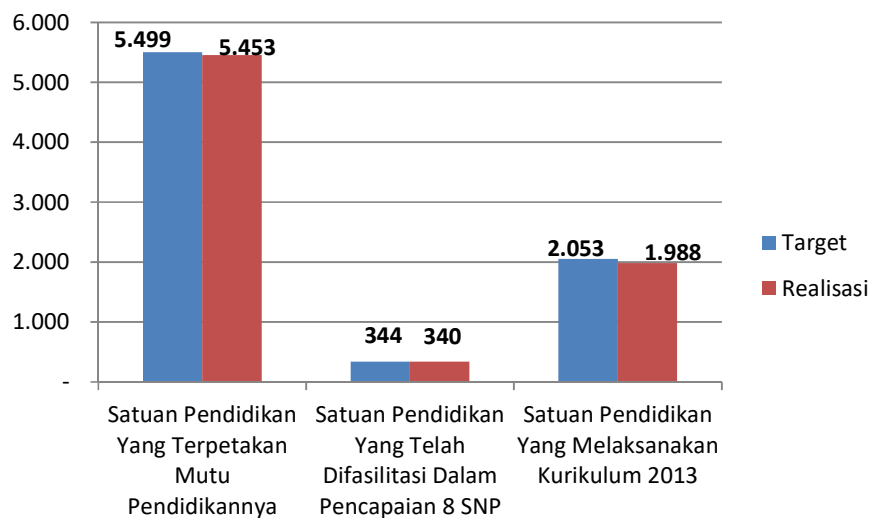
BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja LPMP Sumatera Barat tahun 2018 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan LPMP Sumatera Barat kepada semua elemen masyarakat yang menjadi *stakeholders* dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018.

Secara umum, LPMP Provinsi Sumatera Barat sudah merealisasikan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2018, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah. Hal ini didukung fakta bahwa kinerja LPMP Provinsi Sumatera Barat telah berhasil merealisasikan semua indikator kinerja dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari tujuan strategis LPMP Provinsi Sumatera Barat yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

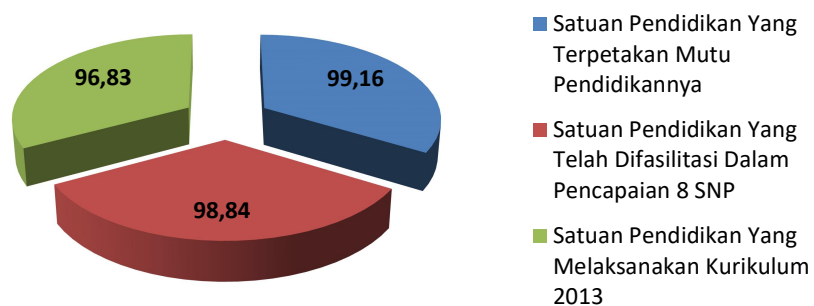
Tabel 4.1 Indikator Kinerja LPMP Sumatera Barat Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Satuan Pendidikan Yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	5,499 Sekolah	5,453 Sekolah	99.16
Satuan Pendidikan Yang Telah Difasilitasi Dalam Pencapaian 8 SNP	344 Sekolah	340 Sekolah	98.84
Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Kurikulum 2013	2,053 Sekolah	1,988 Sekolah	96.83



Gambar 4.1 Indikator Kinerja LPMP Sumatera Barat

Realisasi



Gambar 4.2 Realisasi Indikator Kinerja LPMP Sumatera Barat

Hasil evaluasi kinerja terkait dengan pencapaian target indikator kinerja LPMP Sumatera Barat, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

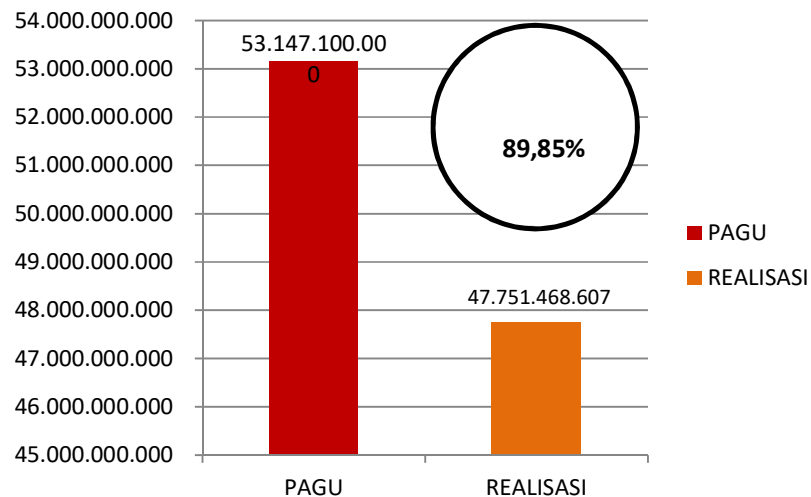
1. Peran pengawas, kepala sekolah, operator sekolah, TPMPS dan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) di Provinsi/Kabupaten/Kota di Sumatera Barat perlu dioptimalkan agar seluruh sekolah yang menjadi target

pemetaan mutu pendidikan dapat mengirimkan data mutu pendidikan yang valid dan akurat sehingga dihasilkan peta mutu sekolah yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja sekolah;

2. Program sekolah model, LPMP perlu meningkatkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota khususnya dalam optimalisasi peran TPMPD dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal di sekolah;
3. Program kurikulum 2013, perlu mengoptimalkan koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh sekolah yang sudah melaksanakan Kurikulum 2013 mendapatkan fasilitasi dan bimbingan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang telah dicanangkan oleh pemerintah.

Dalam hal kinerja keuangan, dapat ditampilkan ringkasan sebagai berikut:

PAGU	REALISASI	%
53,147,100,000	47,751,468,607	89.85



Gambar 4.3 Ringkasan Capaian Kinerja Anggaran Tahun 2018 Dalam Bentuk Grafik

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokoknya, LPMP Sumatera Barat pada tahun 2018 mendapatkan anggaran yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah sebesar Rp. 53.147.100.000,- dengan capaian serapan anggaran sebesar Rp. 47.751.468.607,- (89,85 persen) dengan sisa anggaran adalah sebesar Rp.8.395.631.393,- (10,15 persen).

Secara ringkas, seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga dalam upaya meningkatkan kinerja lembaga di masa-masa mendatang. Berdasarkan hasil analisis pencapaian target diatas dapat dirumuskan beberapa langkah penting untuk dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan Rencana Kinerja pada tahun berikutnya.

Adapun langkah-langkah penting yang harus dilaksanakan sebagai berikut :

1. Tetap konsisten untuk selalu melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, baik dengan pemerintah pusat maupun daerah dan pihak-pihak terkait lainnya.
2. Terus berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan anggaran yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis lembaga dengan sebaik-baiknya.
3. Pada pengelolaan keuangan lembaga agar dilaksanakan secara optimal yaitu anggaran yang digunakan haruslah benar-benar dapat menghasilkan *output* dan *outcome* secara langsung sesuai dengan indikator sasaran strategis yang dibuat.
4. Perlu melakukan koordinasi/sinkronisasi lebih akurat dengan Ditjen Dikdasmen terkait penetapan sasaran strategis/indikator kinerja bagi LPMP.
5. Perlu melakukan koordinasi yang lebih baik dalam penyusunan program, sehingga dapat tergambar jelas keterhubungan antara sasaran strategis, indikator

kinerja dengan *output-output* yang akan mengerucut menjadi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di LPMP. Hal ini dapat memudahkan dalam memberikan deskripsi capaian kinerja dalam format pengukuran kinerja.

6. Perlu menggali informasi yang lebih akurat tentang penetapan bahwa hal-hal yang diukur dalam format pengukuran kinerja adalah seperti yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja.
7. Perlu menggali informasi yang lebih akurat terkait penetapan indikator kinerja yang menaungi kegiatan dukungan manajemen dan tata kelola kelembagaan yang dilakukan di LPMP.
8. Terus berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana yang dimiliki untuk mewujudkan target kinerja sebaik-baiknya dan mampu menghasilkan output yang relevan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja LPMP.
9. Rencana kinerja tahunan yang disusun dalam matrik pentahapan program/kegiatan sebagai bentuk penegasan dari Rencana Strategis LPMP Sumatera Barat 2015-2019, harus terus dilakukan kajian, analisis dan evaluasi secara baik atas kapasitas dan kuantitas target capaian yang terukur dan realistis.

LAKIP tahun 2018 ini sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kepada para *stakeholders* dan sumber informasi penting dalam mengambil keputusan untuk peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik, bagi LPMP, LAKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi:

1. Rencana Kerja (*Operational Plan*);
2. Rencana Kinerja (*Performance Plan*);
3. Rencana Anggaran (*Financial Plan*);
4. Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.